

BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Surabaya dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan dalam Target APBD tahun 2013.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Surabaya dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Maksud disusunnya Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Walikota Surabaya atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Surabaya.
- b. Tujuan laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang andal dan relevan mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah juga digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensinya, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Secara rinci landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2013 meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota

- Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
 29. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 24 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
 30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
 31. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2011 ;
 32. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
 33. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
 34. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2013 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 88 tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013;
 35. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2013, tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013;
 36. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ;

37. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ;
38. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2013 Perubahan ke dua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat informasi tentang: Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, Landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

Memuat informasi tentang: Ekonomi makro, Kebijakan keuangan dan Pencapaian target kinerja APBD.

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

Memuat informasi tentang: Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan akuntansi

Memuat informasi tentang: Entitas pelaporan keuangan daerah, Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

Memuat informasi tentang: Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan, Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan.

BabVII Penutup

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan

Kondisi perekonomian suatu wilayah dapat diamati melalui beberapa indikator makro, diantaranya nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor produksi yang dikenal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB Kota Surabaya merupakan jumlah dari seluruh nilai tambah dari produk barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai aktivitas ekonomi di Kota Surabaya. Peningkatan PDRB secara tidak langsung juga menunjukkan peningkatan total output, barang dan jasa Kota Surabaya.

Pada tahun 2013 perekonomian Kota Surabaya terus mengalami kemajuan, kondisi tersebut tercermin dari tingginya nilai PDRB Kota Surabaya tahun 2013 yang dihitung berdasarkan harga berlaku, yaitu mencapai Rp.302.756.079,72 juta mengalami peningkatan sebesar 12,69% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp.264.335.620.09 juta. Jika dilihat dari komponennya, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran masih memiliki kontribusi tertinggi terhadap PDRB, yaitu sebesar Rp.135.688.792,84 juta (44,82%) kemudian diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar Rp.63.849.201,18 juta (21,09%) dan sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar Rp.30.990.989,46 juta (10,24%).

Tabel 1.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2013 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2012	%	2013*	%
I. Primer	205.977,98	0,08	223.016,52	0,07
Pertanian	192.395,48	0,07	207.965,27	0,07
Pertambangan dan Penggalian	13.582,50	0,01	15.051,25	0,00
II. Sekunder	84.533.184,74	31,98	95.289.305,10	31,47
Industri Pengolahan	56.979.281,61	21,56	63.849.201,18	21,09
Listrik, Gas dan Air Bersih	9.399.428,68	3,56	10.364.239,67	3,42
Bangunan/Kontruksi	18.154.474,45	6,87	21.075.864,24	6,96
III. Tersier	179.596.457,37	67,94	207.243.758,10	68,46
Perdagangan, Hotel dan Restoran	116.631.353,72	44,12	135.688.792,84	44,82
Pengangkutan dan Komunikasi	26.887.741,57	10,17	30.990.989,46	10,24
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	16.032.979,68	6,07	18.411.544,47	6,08
Jasa-Jasa	20.044.382,40	7,58	22.152.432,33	7,32
Total PDRB ADHB	264.335.620,09	100	302.756.079,72	100

Sumber data: BPS Kota Surabaya, Januari 2014

Catatan : *) data sementara

Pertumbuhan PDRB total juga dapat dilihat dari kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap total PDRB di Kota Surabaya, kontribusi baik dari sektor primer, sektor sekunder maupun dari sektor tersier. Berdasarkan data pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa struktur perekonomian di Kota Surabaya masih didominasi oleh sektor tersier. Sektor tersier memberikan kontribusi terhadap total PDRB Kota Surabaya pada tahun 2013 mencapai Rp.207.243.758,10 juta (68,46%). Tingginya angka tersebut menandakan bahwa pertumbuhan sektor tersier sedang berkembang pesat di Kota Surabaya, sedangkan PDRB pada kelompok primer dan sekunder, yaitu masing-masing sebesar Rp.223.016,52 juta (0,07%) dan Rp.95.289.305,10 juta (31,47%).

Tabel 1.2
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012-2013 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2012	%	2013*	%
I. Primer	84.756,49	0,08	85.212,51	0,08
Pertanian	78.013,26	0,08	78.118,87	0,07
Pertambangan dan Penggalian	6.743,23	0,01	7.093,65	0,01
II. Sekunder	30.453.747,12	29,95	32.212.090,31	29,53
Industri Pengolahan	21.421.547,93	21,07	22.451.869,62	20,58
Listrik, Gas dan Air Bersih	2.249.960,99	2,21	2.412.997,85	2,21
Bangunan/Konstruksi	6.782.238,21	6,67	7.347.222,84	6,74
III. Tersier	71.133.129,96	69,96	76.778.157,90	70,39
Perdagangan, Hotel dan Restoran	43.981.948,90	43,26	47.716.555,67	43,75
Pengkangkutan dan Komunikasi	12.054.700,61	11,86	13.056.016,81	11,97
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	6.613.389,33	6,5	7.068.116,51	6,48
Jasa-Jasa	8.483.091,12	8,34	8.937.468,90	8,19
Total PDRB ADHK	101.671.091,12	100,00	109.075.460,72	100,00

Sumber data: BPS Kota Surabaya, Januari 2014
 Catatan : *) data sementara

Sementara itu, total PDRB Kota Surabaya pada tahun 2013 berdasarkan perhitungan harga konstan mencapai Rp.109.075.460,72 juta juga mengalami peningkatan dibandingkan total PDRB pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp.101.671.633,57 juta.

Jika ditinjau dari peran setiap sektor, hal yang sama juga terjadi pada total PDRB atas dasar harga konstan dimana sektor tertinggi yang berperan terhadap PDRB total Kota Surabaya adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Kondisi tersebut dilihat dari tingginya nilai PDRB sektor Perdagangan yang mencapai Rp.47.716.555,67 juta (43,75%). Pesatnya pertumbuhan menandakan bahwa sampai saat ini sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan perekonomian Kota Surabaya. Sektor tertinggi kedua yang berkontribusi terhadap total PDRB Kota Surabaya adalah sektor Industri Pengolahan, dengan kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kota Surabaya pada tahun 2013, yaitu Rp.22.451.869,62 juta (20,58%) dari total PDRB Kota Surabaya.

Ekspor Import Kota Surabaya

Surabaya dengan berbagai aktivitas perekonomiannya tentu tidak terlepas dari adanya berbagai penawaran dan permintaan komoditas yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Pada Tabel 1.3 disajikan rincian nilai ekspor-import Kota Surabaya pada tahun 2013 berdasarkan komoditas.

Tabel 1.3
Komoditas Ekpor-Impor Non Migas Kota Surabaya
Tahun 2013*

Ekspor	Nilai (Juta US\$)	Impor	Nilai (Juta US\$)
15. Lemak & Minyak Nabati	1.363,95	84. Mesin-mesin/Peralatan Mekanik	2.448,93
71. Perhiasan dan Permata	1.189,67	72. Besi dan Baja	1.826,79
29. Bahan Kimia Organik	1.052,68	23. Sisa Industri Makanan	1.253,75
48. Kertas dan Karton	959,12	39. Plastik dan Barang dari Plastik	1.130,85
44. Kayu dan Barang-barang dari Kayu	934,87	10. Gandum-gandum	1.032,85
03. Ikan dan Udang	918,75	31. Pupuk	701,43
74. Tembaga	636,94	28. Bahan Kimia Anorganik	622,99
94. Perabot dan Penerangan Rumah	549,96	29. Bahan Kimia Organik	569,21
40. Karet dan Barang dari Karet	584,83	85. Mesin dan Peralatan Listrik	563,88
85. Mesin dan Peralatan Listrik	583,94	12. Biji-bijian Minyak	447,79
Jumlah Komoditas 10 Komoditas	8.774,71	Jumlah Komoditas 10 Komoditas	10.598,47
Jumlah Komoditas Lainnya	6.124,13	Jumlah Komoditas Lainnya	7.152,85
Nilai Total Ekspor Non Migas	14.898,84	Nilai Total Impor Non Migas	17.303,57

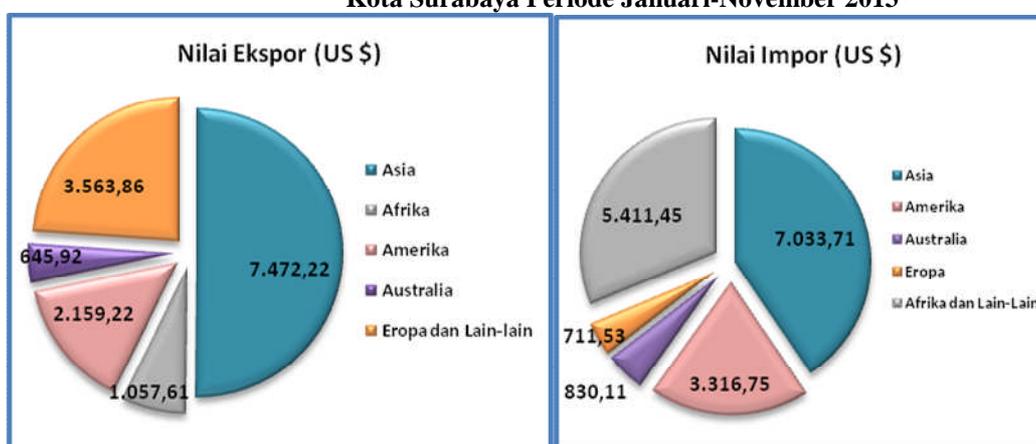
Sumber data : Bank Indonesia, Januari 2014
Catatan : *) data sementara

Realisasi ekspor Kota Surabaya pada tahun 2013 senilai US\$14.898,84 juta atau 3,56% lebih rendah dibanding realisasi ekspor Kota Surabaya tahun sebelumnya pada periode yang sama, yaitu sebesar US\$15.448,54 juta. Realisasi ekspor Kota Surabaya saat ini tidak terlepas dari kondisi perekonomian dunia yang masih belum kembali stabil menjadi penyebab utama turunnya nilai ekspor Kota Surabaya ke sejumlah negara lain. Begitu pula, kebijakan pemberhentian layanan pemerintah atau lebih dikenal dengan shutdown yang dilakukan oleh Amerika, berimbas kepada ekspor Kota Surabaya. Seperti yang diketahui, Amerika merupakan salah satu negara besar yang menjadi negara tujuan ekspor Kota Surabaya, seperti yang terangkum pada Gambar 1.1. Selain itu, turunnya ekspor Kota Surabaya juga disebabkan turunnya permintaan di beberapa negara mitra dagang Indonesia dan melemahnya harga beberapa komoditas utama ekspor kota Surabaya.

Terdapat 5 komoditas non migas yang menjadi andalan Kota Surabaya dalam menembus pasar mancanegara adalah Lemak dan Minyak Nabati (US\$ 1.363,95 juta) Perhiasan dan Permata (US\$ 1.189,67 juta); Bahan Kimia Organik (US\$ 1.052,68); Kertas dan Karton (US\$ 959,12 juta), disusul Kayu dan Barang-Barang dari Kayu (US\$ 934,87 juta).

Pada sisi impor, realisasi impor non migas Kota Surabaya pada tahun 2013 senilai US\$17.303,57 juta atau 3,07% meningkat dibandingkan realisasi impor non migas Kota Surabaya pada tahun 2012. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa Kota Surabaya masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap produk-produk impor. Mayoritas komoditas yang diimpor oleh Kota Surabaya termasuk dalam kelompok barang berat, seperti Mesin-mesin/Peralatan (US\$2.448,93 juta); Besi dan Baja (US\$ 1.614,01 juta), Barang-barang Sisa Industri (US\$ 1.164,94 juta), Mesin dan Peralatan Listrik (US\$564,98 juta) dan beberapa komoditas lainnya.

Gambar 1.1
Kawasan Negara Tujuan Ekspor-Impor Non-Migas
Kota Surabaya Periode Januari-November 2013*



Sumber data : Bank Indonesia, Januari 2014

Catatan : *) data sementara

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa tujuan ekspor Kota Surabaya ke pasar Asia sebesar US\$ 7.472,22 juta atau separuh dari total keseluruhan ekspor Kota Surabaya, dengan lebih tepatnya sebesar 50,15%. Angka tersebut menempati peringkat pertama, kemudian disusul dengan pasar Eropa yang mencapai US\$ 3.563,86 juta atau sebesar 23,92% dan sisanya pasar Afrika dan timur dan Australia. Tingginya permintaan pasar Asia disebabkan oleh kemampuan perusahaan besar di Kota Surabaya mampu memenuhi selera pasar sehingga produk yang diekspor bisa diterima masyarakat Asia. Selain kawasan Asia, Eropa merupakan salah satu tujuan utama pemasaran produk perusahaan besar di Kota Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan memiliki daya saing yang cukup baik pasar global.

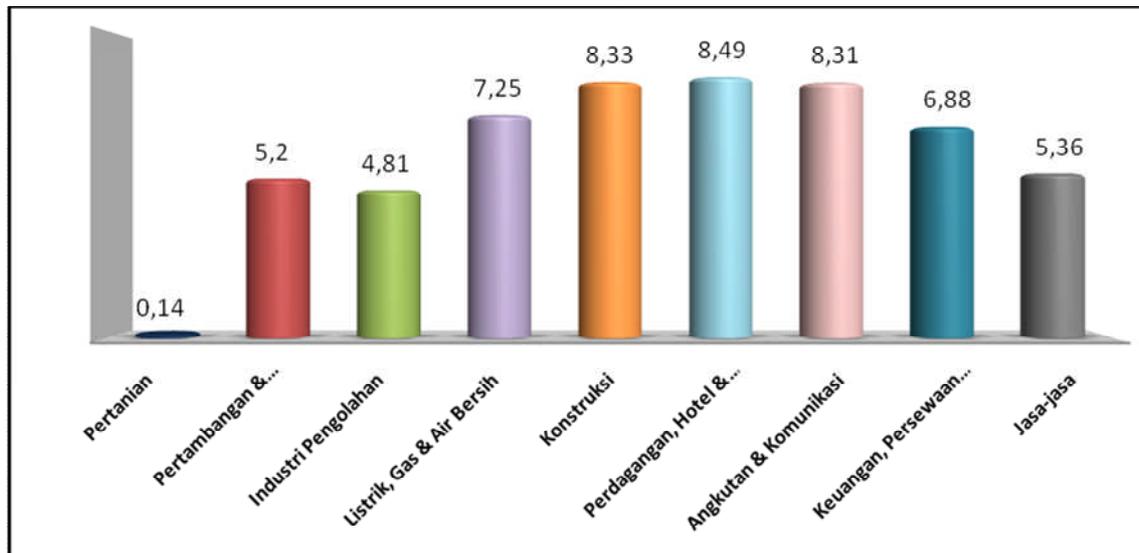
Hal yang sama pun terjadi pada sisi impor, yang menjadi asal negara pengimpor barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan domestik Kota Surabaya mayoritas berasal dari negara-negara di kawasan Asia. Negara-negara tersebut seperti Cina, Jepang, India, Thailand, Korea Selatan dan Negara Asia lainnya. Negara Cina dan Amerika merupakan dua negara tertinggi yang menjadi tujuan asal impor Kota Surabaya dengan nilai impor masing-masing sebesar US \$ 3.943,45 juta atau 22,79% dan US\$ 2.668,39 juta dari total keseluruhan impor Kota Surabaya pada tahun 2013.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian, Kota Surabaya memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya mencapai nilai diatas 7 persen lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional.

Untuk mengetahui lebih rinci mengenai perkembangan perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2013 juga dapat dilihat dari distribusi persentase masing-masing sektor ekonomi terhadap pertumbuhan kota Surabaya. Pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam bentuk persentase menunjukkan bahwa kontribusi masing-masing sektor dalam kemampuan menciptakan nilai tambah pada pendapatan daerah Surabaya. Persentase dari masing-masing sektor lapangan usaha terangkum pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2
Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Surabaya
Tahun 2013*



Sumber data: BPS Kota Surabaya, Januari 2014
 Catatan : *) data sementara

Rata-rata sub sektor ekonomi memiliki kontribusi yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya, yaitu di atas 5 persen. Sektor yang tertinggi dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi Surabaya pada tahun 2013 masih didominasi oleh sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran dengan nilai sebesar 8,49%. Selain itu terdapat tiga sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan diatas pertumbuhan agregat Kota Surabaya. Sektor tersebut antara lain, yaitu sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 8,49%. Kemudian disusul sektor Kontruksi sebesar 8,33 % dan yang terakhir adalah sektor Angkutan dan Komunikasi sebesar 8,31%. Namun dari sembilan sektor ekonomi terdapat satu sektor yang memiliki pertumbuhan kurang dari 1%, yaitu sektor Pertanian. Untuk waktu yang akan datang pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya diperkirakan masih cukup menjanjikan melihat masih banyaknya sektor-sektor ekonomi yang tumbuh pesat.

Pertumbuhan ekonomi yang didominasi oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran merupakan pertanda baik karena dapat meningkatkan perekonomian riil Kota Surabaya. Selain itu, tingginya peran dari sektor Kontruksi dalam menyediakan infrastruktur juga turut andil dalam mendorong perekonomian Kota

Surabaya untuk berkembang lebih maju sehingga arus perekonomian di Kota Surabaya dapat berjalan dengan lancar.

Tabel.1.4
Perbandingan Indikator Ekonomi
Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2013*

Keterangan	Surabaya	Jawa Timur	Nasional
Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,28	6,55	5,78
PDRB Atas Harga Berlaku (Juta Rp)	302.756,07	1.136.326,86	4.040.317
PDRB Atas Harga Konstan (Juta Rp)	109.075,46	419.428,44	1.293.760,70
Pendapatan Perkapita	34,44	29,62	36,5

Sumber data: BPS Kota Surabaya, Januari 2014

Catatan : *) data sementara

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2013 yang diukur berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan kinerja yang baik dengan pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen. Namun, dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tumbuh sedikit lebih lambat. Kendati demikian, perekonomian Kota Surabaya tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional. Nilai total PDRB Kota Surabaya yang dihitung berdasarkan harga berlaku (ADHB) mencapai Rp.302.756,079 miliar, atau setara dengan Rp.109.075,46 miliar bila dihitung berdasarkan harga konstan (ADHK) tahun 2000, sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 1.4.

Inflasi

Kriteria penilaian kinerja ekonomi makro yang mudah diukur selain tingkat PDRB wilayah adalah tingkat inflasi, dimana tingkat inflasi merupakan gambaran perekonomian disuatu wilayah tersebut dikatakan baik atau buruk. Tingkat inflasi yang terlalu tinggi dan terlalu rendah mengidentifikasi jika perekonomian wilayah tersebut dalam kondisi tidak baik atau dapat dikatakan buruk. Perkembangan laju Inflasi yang terjadi di Kota Surabaya pada tahun 2007-2013 dapat diketahui pada Gambar 1.3.

Gambar 1.3
Perkembangan Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2007- Tahun 2013 (%)



Sumber data: BPS Kota Surabaya, Januari 2014

Catatan : *) data sementara

Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional pada tahun 2013 sama-sama menunjukkan pola tren yang meningkat. Kota Surabaya pada tahun 2013 mengalami inflasi sebesar 7,52% (*year to year*) atau meningkat dibandingkan inflasi pada tahun sebelumnya yang hanya 4.39%. Meskipun demikian, Inflasi Kota Surabaya sampai tahun 2013 sama seperti tahun-tahun sebelumnya selalu lebih rendah dibandingkan inflasi Jawa Timur pada tahun 2013, yaitu sebesar 7,59% dan Nasional sebesar 8.38%.

Berdasarkan Gambar 1.3 selama 5 tahun terakhir, inflasi Kota Surabaya pada tahun 2013 merupakan inflasi tertinggi dibanding inflasi di tahun sebelumnya. Tingginya nilai inflasi Kota Surabaya akhir tahun ini salah satunya dikarenakan dampak dari adanya kebijakan pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak yang diterjadi pada tanggal 22 Juni 2013. Kebijakan tersebut menyebabkan kenaikan harga bensin dari Rp.4.500,- menjadi Rp.6.500,- atau naik sebesar 44,4 persen, dan harga solar naik dari Rp.4.500,- menjadi Rp.5.500,- atau meningkat sebesar 22,22 persen sehingga memicu meningkatnya harga barang dan jasa pada komoditas lainnya.

Dorongan inflasi Kota Surabaya yang tinggi pada tahun 2013 juga dipicu karena meningkatnya beberapa komoditas yang tercermin dari meningkatnya nilai indeks harga konsumennya. Mayoritas komoditas-komoditas yang mengalami inflasi tersebut merupakan komoditas yang memiliki ketergantungan yang tinggi pada faktor alam sehingga harga dan ketersediaannya sangat berfluktuasi mempengaruhi harga pasar.

2.2. Kebijakan Keuangan

a. Pendapatan Daerah

Memperhatikan potensi yang masih akan dihadapi pada Tahun 2013, maka sasaran pendapatan daerah yang ditetapkan adalah meningkatnya PAD dan penerimaan daerah lainnya, yang tercermin dari adanya peningkatan penerimaan PAD sebesar 122,46% dari Rp.2.279.613.848.832,61 (2012), dibandingkan dengan realisasi untuk tahun anggaran 2013 sebesar Rp.2.791.580.050.709,51.

Terkait gambaran proyeksi pendapatan di atas, maka pendapatan daerah yang merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah. Selain itu, perlu tetap dihindari upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang akan menambah beban masyarakat dan dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

b. Belanja Daerah

1. Pada sisi belanja daerah, dana yang disediakan akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program RPJM Daerah sebesar Rp.3.892.080.447.268,00 dialokasikan untuk belanja non program sebesar Rp.2.063.247.100.922,00.
2. Sehubungan dengan aspek belanja daerah ini, maka penggunaan belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut adalah sektor perdagangan-hotel-restoran, sektor industri

pengolahan (pendukung sektor jasa), sektor pengangkutan–komunikasi dan sektor jasa-jasa, serta sektor konstruksi.

3. Penggunaan belanja juga harus dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman), penanggulangan masalah sosial, menjaga kelayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
4. Keseluruhan upaya penggunaan belanja sebagaimana tersebut diatas harus tetap dalam koridor pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pelaksanaan program daerah yang telah tertuang dalam target APBD tahun 2013.

c. Pembiayaan

1. Pada sisi pembiayaan daerah yang direncanakan, penerimaan sebesar Rp.805.419.392.938,00 dan pengeluaran sebesar Rp.18.982.907.370,00.
2. Terkait dengan aspek pembiayaan daerah ini, maka pada sisi penerimaan pembiayaan daerah, harus dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan untuk dapat dimanfaatkan dalam mengantisipasi munculnya defisit anggaran yang diperkirakan akan terjadi. Disamping itu pula dalam kaitan penerimaan pembiayaan ini perlu mulai dipertimbangkan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Selanjutnya dari sisi pengeluaran pembiayaan, harus dapat memenuhi kewajiban angsuran utang pokok serta penyertaan modal yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja BUMD.

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Belanja Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2013 direncanakan sebesar Rp.5.955.327.548.190,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.4.192.882.705.877,00, Belanja Modal sebesar Rp.1.747.356.759.354,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.10.000.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp.5.088.082.959,00. Sedangkan Anggaran Belanja Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2012 direncanakan sebesar Rp.5.158.264.830.659,00 yang terdiri dari Belanja

Operasi sebesar Rp.3.960.920.145.441,00, Belanja Modal sebesar Rp.1.182.671.510.989,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.10.000.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp.4.673.174.229,00.

Realisasi belanja Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 adalah sebesar Rp.5.057.279.664.344,95 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.3.770.796.965.236,89, Belanja Modal sebesar Rp.1.281.394.616.149,06, dan Belanja Transfer sebesar Rp.5.088.082.959,00. Sedangkan Realisasi belanja Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2012 sebesar Rp.4.299.150.223.080,63 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.3.382.179.570.371,63,00, Belanja Modal sebesar Rp.912.716.142.120,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.3.054.510.589,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp.1.200.000.000,00

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2013 direncanakan sebesar Rp.5.255.244.153.444,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.2.657.109.226.595,00, Pendapatan transfer sebesar Rp.2.598.043.013.849,00 dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp.91.913.000,00. Dibanding Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2012 direncanakan sebesar Rp.4.693.361.549.064,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.2.341.265.681.882,00, Pendapatan transfer sebesar Rp.2.352.095.182,00 dan Lain-lain Pendapatan yang sah pada tahun 2012 tidak dianggarkan.

Realisasi pendapatan Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2013 adalah sebesar Rp.5.235.293.716.914,17 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.2.791.580.050.709,51, Pendapatan transfer sebesar Rp.2.443.621.753.204,66 dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp.91.913.000. Sedangkan Realisasi pendapatan Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2012 adalah sebesar Rp.4.634.301.938.653,61 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.2.279.613.848.832,61, Pendapatan transfer sebesar Rp.2.354.670.621.821,00 dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp.17.468.000,00.

Berikut ini ringkasan rencana dan realisasi anggaran untuk masing-masing program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2013 dan 2012.

Tabel 1.5.1
Rencana dan Realisasi Belanja Program
Tahun 2013

KODE KEG.	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
10101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.133.749.174	5.916.606.827	64,78
10102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.184.334.349	3.522.178.102	84,18
10115	Program Pendidikan Anak Usia Dini	22.936.315.868	19.731.388.860	86,03
10116	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	458.457.330.423	348.954.383.038	76,11
10117	Program Pendidikan Menengah	173.991.993.401	117.686.441.236	67,64
10118	Program Pendidikan Non Formal	17.109.749.311	15.171.102.925	88,67
10120	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	71.172.996.364	49.114.477.535	69,01
10201	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	106.004.205.649	87.459.450.712	82,51
10202	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	16.176.511.608	12.288.585.085	75,97
10216	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	291.049.203.246	270.137.398.271	92,82
10225	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	49.105.033.644	42.112.065.559	85,76
10226	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	74.218.896.717	60.851.884.684	81,99
10232	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	18.033.682.778	17.084.843.981	94,74
10301	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	21.065.395.294	18.835.185.076	89,41
10302	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.049.664.763	3.691.882.102	91,17
10328	Program pengendalian banjir	406.545.167.551	338.016.706.899	83,14
10331	Program Pembangunan jaringan Air Bersih Perkotaan	3.400.457.395	2.724.074.552	80,11
10332	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	492.776.422.882	393.189.097.310	79,79
10401	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.834.506.944	9.875.200.973	91,15
10402	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12.479.653.422	4.618.352.758	37,01

10421	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	24.760.601.845	21.699.733.306	87,64
10422	Program Utilitas Perkotaan	144.195.610.180	87.023.839.076	60,35
10423	Program Perumahan dan Permukiman	133.145.415.226	75.622.421.611	56,80
10501	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.971.451.814	5.711.840.542	81,93
10502	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	93.233.091.953	73.735.302.744	79,09
10518	Program Penataan Ruang	10.800.329.663	9.292.708.778	86,04
10601	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.139.028.871	1.574.274.822	73,60
10602	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.151.119.634	809.223.968	70,30
10621	Program perencanaan pembangunan daerah	16.885.397.511	13.363.485.589	79,14
10701	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.663.644.020	7.097.277.112	92,61
10702	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.457.177.937	3.078.424.974	89,04
10721	Program Pengembangan Sistem Transportasi	101.383.794.176	83.393.152.024	82,25
10801	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.664.509.136	8.149.019.175	76,41
10802	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.891.450.725	1.515.671.282	80,13
10816	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	14.668.064.635	11.634.273.782	79,32
10824	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	57.730.765.113	36.872.641.688	63,87
10825	Program Pengelolaan Kebersihan Kota	190.720.163.836	180.537.896.953	94,66
10919	Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota	6.993.433.941	5.607.167.163	80,18
11001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.207.911.924	2.991.879.080	93,27
11002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.323.987.146	1.091.347.501	82,43
11015	Program Penataan Administrasi Kependudukan	12.902.489.072	11.059.606.552	85,72
11116	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	5.654.992.655	5.033.099.977	89,00
11117	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1.472.308.234	1.140.594.112	77,47
11201	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.272.061.543	2.152.691.331	94,75
11202	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.600.943.729	2.188.185.610	84,13

11215	Program Keluarga Berencana	3.335.893.345	3.024.155.415	90,66
11301	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.109.050.195	972.054.338	87,65
11302	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	869.085.878	728.833.323	83,86
11316	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	56.791.740.622	50.185.100.961	88,37
11321	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	22.723.405.435	19.893.593.596	87,55
11401	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.744.568.526	1.358.054.866	77,84
11402	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	958.697.187	747.797.465	78,00
11416	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	13.142.358.161	11.310.070.549	86,06
11417	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	2.495.503.187	1.973.309.042	79,07
11501	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.461.482.425	1.167.715.355	79,90
11502	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	460.110.175	350.284.149	76,13
11517	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	24.647.266.909	18.992.954.952	77,06
11518	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	2.922.892.610	2.237.131.839	76,54
11601	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.575.773.626	1.397.255.120	88,67
11602	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	323.171.911	293.511.541	90,82
11616	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	3.627.642.742	3.423.273.048	94,37
11701	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.047.256.357	5.592.394.193	92,48
11702	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	737.315.826	635.509.792	86,19
11717	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	6.516.159.101	6.151.692.722	94,41
11801	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.426.460.551	1.118.718.289	78,43
11802	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	804.815.376	633.647.349	78,73
11816	Program peningkatan peran serta kepemudaan	5.783.245.219	5.372.421.634	92,90
11820	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	69.280.404.769	53.301.099.585	76,94
11901	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.013.277.601	4.912.643.889	81,70
11902	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.138.091.058	2.890.927.101	92,12

11916	Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	42.099.983.390	36.092.930.553	85,73
12001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	96.240.428.597	85.751.807.285	89,10
12002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	45.343.707.979	41.231.097.329	90,93
12015	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	57.837.996.613	34.237.970.386	59,20
12017	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	57.885.297.480	46.955.692.556	81,12
12020	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	5.061.354.595	4.710.873.370	93,08
12024	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	155.222.030	108.217.759	69,72
12025	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	4.922.488.351	3.156.535.751	64,12
12026	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	2.986.930.593	2.430.995.414	81,39
12029	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	12.354.401.706	9.714.148.083	78,63
12031	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	61.814.744.018	54.345.471.116	87,92
12032	Program Penataan Daerah Otonom	18.834.080.952	13.825.170.651	73,41
12101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	500.206.055	441.297.501	88,22
12102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	118.068.860	94.476.799	80,02
12115	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	3.882.678.011	3.471.253.317	89,40
12220	Program Penanggulangan Kemiskinan	15.146.860.727	11.811.184.099	77,98
12415	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	1.448.066.987	1.375.822.826	95,01
12501	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.192.243.255	1.692.092.087	77,19
12502	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	774.350.566	701.554.906	90,60
12515	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	6.788.362.612	6.434.802.523	94,79
1251	Program peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	18.263.020.077	17.241.034.170	94,40
12601	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.776.385.493	1.657.772.144	93,32
12602	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	476.464.099	404.405.070	84,88

1261	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan PeRp.ustakaan	12.577.920.214	12.407.969.481	98,65
20101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.309.766.289	5.127.863.146	96,57
20102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.111.158.201	1.033.315.349	92,99
20115	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	3.554.118.283	3.449.722.411	97,06
20415	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	14.504.895.889	13.410.487.832	92,45
20416	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1.504.711.713	1.446.727.255	96,15
20515	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	3.523.269.899	3.277.581.415	93,03
20601	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.289.914.579	1.993.281.325	87,05
20602	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	1.457.449.398	1.405.066.162	96,41
2061	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	775.109.108	683.654.592	88,20
20619	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	30.018.106.555	18.214.553.020	60,68
JUMLAH TOTAL		3.892.080.447.268	3.112.358.043.032	79,97

Sumber data : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya 2013, diolah

Tabel 1.5.2
Rencana dan Realisasi Belanja Program
Tahun 2012

KODE KEG.	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.392.916.194,00	5.387.086.426,00	64,19
1 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.205.511.683,00	2.390.268.932,00	74,57
1 01 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	11.996.791.335,00	8.921.216.700,00	74,36
1 01 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	415.131.827.371,00	282.380.134.480,00	68,02
1 01 17	Program Pendidikan Menengah	139.933.219.299,00	114.952.588.721,00	82,15
1 01 18	Program Pendidikan Non Formal	9.490.951.828,00	7.867.495.550,00	82,89
1 01 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	47.914.280.080,00	33.899.832.222,00	70,75
1 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	84.471.393.006,00	64.765.187.527,00	76,67
1 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	25.243.411.912,00	21.073.787.270,00	83,48
1 02 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	207.393.002.478,00	182.393.629.626,00	87,95
1 02 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas/puskesmas pembantu	82.457.850.092,00	55.655.709.328,00	67,50
1 02 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa	157.282.592.119,00	148.155.017.793,00	94,20
1 02 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan Anak	40.845.849.106,00	39.622.752.704,00	97,01
1 03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11.810.392.179,00	8.492.354.656,00	71,91
1 03 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.388.766.603,00	2.693.110.469,00	79,47
1 03 28	Program pengendalian banjir	178.198.857.202,00	158.617.577.065,00	89,01
1 03 31	Program Pembangunan jaringan Air Bersih Perkota	5.684.737.188,00	2.999.723.922,00	52,77
1 03 32	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	311.055.785.078,00	252.882.741.734,00	81,30
1 04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.216.590.683,00	2.538.600.981,00	78,92
1 04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	20.015.604.641,00	4.128.408.552,00	20,63
1 04 21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	24.926.456.845,00	20.664.173.626,00	82,90
1 04 22	Program Utilitas Perkotaan	109.953.312.277,00	82.177.179.532,00	74,74
1 04 23	Program Perumahan dan Permukiman	104.769.186.466,00	73.374.719.190,00	70,03
1 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.642.599.981,00	4.451.457.379,00	78,89
1 05 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	65.826.557.251,00	48.673.495.202,00	73,94

1 05 18	Program Penataan Ruang	12.239.934.379,00	8.008.236.015,00
1 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.501.788.713,00	1.256.441.125,00
1 06 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	700.762.970,00	440.263.410,00
1 06 21	Program perencanaan pembangunan daerah	17.098.562.039,00	13.206.095.533,00
1 07 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.795.710.750,00	6.092.931.616,00
1 07 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.381.612.494,00	1.878.603.013,00
1 07 21	Program Pengembangan Sistem Transportasi	64.430.729.158,00	57.461.908.658,00
1 08 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.028.274.798,00	4.282.946.385,00
1 08 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.426.326.957,00	1.176.209.167,00
1 08 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	14.065.517.989,00	13.004.657.700,00
1 08 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	47.026.701.281,00	27.440.330.138,00
1 08 25	Program Pengelolaan Kebersihan Kota	116.650.958.253,00	102.430.224.399,00
1 09 19	Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota	4.874.092.341,00	3.225.132.610,00
1 10 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.452.372.342,00	3.215.968.621,00
1 10 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	766.326.171,00	641.207.936,00
1 10 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	23.643.051.795,00	13.350.265.378,00
1 11 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	4.772.225.485,00	4.044.642.765,00
1 11 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1.514.948.450,00	1.330.557.750,00
1 12 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.576.022.461,00	2.340.593.919,00
1 12 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.800.201.748,00	1.616.577.930,00
1 12 15	Program Keluarga Berencana	3.151.070.846,00	2.626.992.650,00
1 13 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.010.888.293,00	841.368.381,00
1 13 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	623.404.558,00	507.114.889,00
1 13 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	25.139.133.077,00	21.291.693.716,00
1 13 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	2.756.915.400,00	2.278.750.105,00

1 14 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.093.197.427,00	865.582.980,00	79,18
1 14 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	782.352.190,00	622.121.566,00	79,52
1 14 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	11.403.807.076,00	9.728.351.743,00	85,31
1 14 17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	2.045.837.480,00	1.728.364.620,00	84,48
1 15 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	980.213.057,00	831.056.988,00	84,78
1 15 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	428.967.060,00	338.190.679,00	78,84
1 15 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Mikro Kecil dan Menengah	18.384.892.633,00	15.125.155.360,00	82,27
1 15 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	2.942.187.888,00	2.350.045.334,00	79,87
1 16 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.327.200.776,00	1.139.881.170,00	85,89
1 16 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	326.180.770,00	281.876.092,00	86,42
1 16 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Inves	4.188.488.085,00	3.610.577.777,00	86,20
1 17 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.656.001.669,00	4.095.236.424,00	87,96
1 17 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	573.710.528,00	504.639.165,00	87,96
1 17 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	15.977.680.309,00	14.698.254.295,00	91,99
1 18 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.021.100.768,00	1.208.703.744,00	59,80
1 18 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	968.936.424,00	520.538.500,00	53,72
1 18 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	4.767.636.680,00	4.263.069.470,00	89,42
1 18 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	52.624.689.692,00	35.136.446.760,00	66,77
1 19 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.277.818.919,00	2.000.027.995,00	87,80
1 19 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.800.530.274,00	1.688.759.807,00	93,79
1 19 16	Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan Kriminal	28.753.171.160,00	24.958.656.492,00	86,80
1 20 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	98.086.797.032,00	79.454.239.680,00	81,00
1 20 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	83.851.593.687,00	65.546.360.364,00	78,17
1 20 15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	62.773.375.506,00	36.142.658.440,00	57,58

1 20 17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan daerah	60.796.401.609,00	40.658.985.434,00	66,88
1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	5.607.940.335,00	5.167.879.300,00	92,15
1 20 24	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	401.259.144,00	323.259.713,00	80,56
1 20 25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	8.304.190.671,00	5.417.180.178,00	65,23
1 20 26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	3.434.344.948,00	2.491.114.113,00	72,54
1 20 29	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	13.616.887.397,00	9.862.259.246,00	72,43
1 20 31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	22.177.371.476,00	18.330.620.726,00	82,65
1 20 32	Program Penataan Daerah Otonom	38.882.852.962,00	34.213.213.540,00	87,99
1 21 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	348.825.686,00	337.655.525,00	96,80
1 21 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	92.406.212,00	76.696.108,00	83,00
1 21 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	6.540.038.809,00	5.174.691.859,00	79,12
1 22 20	Program Penanggulangan Kemiskinan	12.190.571.336,00	9.229.839.322,00	75,71
1 24 15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	1.826.984.889,00	1.624.563.891,00	88,92
1 25 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.142.556.318,00	907.269.286,00	79,41
1 25 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	440.243.548,00	405.921.507,00	92,20
1 25 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	6.921.298.812,00	6.387.823.102,00	92,29
1 25 19	Program peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi	13.420.403.735,00	12.371.840.375,00	92,19
1 26 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.300.718.503,00	1.200.570.592,00	92,30
1 26 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	392.436.649,00	362.558.253,00	92,39
1 26 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	10.264.607.726,00	9.862.514.719,00	96,08
2 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.177.191.743,00	3.935.007.693,00	94,20
2 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	665.660.793,00	637.030.327,00	95,70
2 01 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	4.681.498.217,00	4.148.460.634,00	88,61
2 04 15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	12.635.841.794,00	11.419.810.496,00	90,38
2 04 16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1.724.638.049,00	1.626.882.879,00	94,33
2 05 15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	8.506.794.722,00	8.204.326.044,00	96,44

2 05 15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	8.506.794.722,00	8.204.326.044,00	96,44
2 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.246.972.137,00	1.042.935.601,00	83,64
2 06 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	1.449.291.778,00	1.374.272.165,00	94,82
2 06 15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	997.729.992,00	882.651.532,00	88,47
2 06 19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	17.554.064.951,00	3.239.931.411,00	18,46
JUMLAH TOTAL		3.109.454.367.676,00	2.430.904.524.412,00	78,18

Sumber data : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya 2012, diolah

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka pada Tahun 2013 Pemerintah Kota Surabaya telah menganut anggaran defisit.

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2013 sebesar Rp.5.255.244.153.444,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.2.657.109.226.595,00, Dana Perimbangan sebesar Rp.1.567.049.863.846,00, Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp.664.150.585.652,00, Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp.359.911.885.000,00, Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah daerah Lainnya Rp.6.173.385.000,00, Bagi Hasil Lainnya Propinsi sebesar Rp.757.294.351,00, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp.91.913.000,00. Sedangkan Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2012 sebesar Rp.4.693.361.549.064,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.2.341.265.681.882, Dana Perimbangan sebesar Rp.1.409.496.932.932,00, Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp.607.033.790.222,00, Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp.309.819.125.000,00, Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah daerah Lainnya Rp.23.066.440.000,00, Bagi Hasil Lainnya Propinsi sebesar sebesar Rp.2.679.579.028,00.

Realisasi pendapatan Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2013 adalah sebesar Rp.5.235.293.716.914,17 (tercapai 99,62%) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.2.791.580.050.709,51 (tercapai 105,06%), Dana Perimbangan

sebesar Rp.1.460.891.497.629,00 (tercapai 93,23%), Bagi Hasil Pajak Propinsi sebesar Rp.613.629.385.380,00 (tercapai 92,39%), Penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp.359.911.885.000,66 (tercapai 100%), Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp.8.238.075.000,00 (tercapai 133,45%), dan Bagi Hasil Lainnya Propinsi sebesar Rp.950.910.195,00 (tercapai 125,57%), Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp.91.913.000,00 (tercapai 100%). Sedangkan realisasi pendapatan Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2012 adalah sebesar Rp.4.634.301.938.653,61 (tercapai 98,74%) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.2.279.613.848.832,61 (tercapai 97,37%), Dana Perimbangan sebesar Rp.1.433.067.691.897,00 (tercapai 101,67%), Bagi Hasil Pajak Propinsi sebesar Rp.594.448.090.669,00 (tercapai 97,93%), Penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp.309.819.125.000,00 (tercapai 100%), Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp.16.777.000.000,00 (tercapai 72,73%), dan Bagi Hasil Lainnya Propinsi sebesar Rp.558.714.255,00 (tercapai 20,85%), Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp.17.468.000,00

Anggaran Belanja Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2013 sebesar Rp.5.955.327.548.190,00 dan tahun 2012 sebesar Rp.5.158.264.830.659,00. Sedangkan realisasi belanja Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 adalah sebesar Rp.5.057.279.664.344,95 dan tahun 2012 sebesar Rp.4.299.150.223.080,63 yang terdiri dari belanja tidak langsung tahun 2013 sebesar Rp.1.944.921.621.312,84 dan tahun 2012 sebesar Rp.1.868.245.698.669,19, belanja langsung/program tahun 2013 sebesar Rp.3.112.358.043.032,11 dan tahun 2012 sebesar Rp.2.430.904.524.411,44.

Realisasi pendapatan pada tahun 2013 sebesar Rp.5.235.293.716.914,17 bila dibandingkan dengan pengeluaran belanja sebesar Rp.5.057.279.664.344,95 maka terjadi surplus sebesar Rp.178.014.052.569,22. Sedangkan penerimaan pembiayaan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp.805.523.587.176,25 dan pengeluaran pembiayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota sebesar Rp.6.448.485.000,00 sehingga menghasilkan SILPA tahun 2013 sebesar Rp.977.089.154.745,47. Sedangkan Realisasi untuk pendapatan tahun 2012 sebesar Rp.4.634.301.938.653,61 dibandingkan belanja sebesar Rp.4.299.150.223.080,63 maka terjadi surplus sebesar Rp.335.151.715.572,98. Sedangkan penerimaan pembiayaan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp.503.149.922.343,27 dan pengeluaran pembiayaan yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Kota sebesar Rp.32.882.244.978,00 sehingga menghasilkan SILPA tahun 2012 sebesar Rp.805.419.392.938,25. Secara rinci realisasi APBD kota Surabaya Tahun 2013 dan 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.1
Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2013

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi
1.	Pendapatan		
a.	Pendapatan Asli Daerah	2,657,109,226,595.00	2,791,580,050,709.51
b.	Dana Perimbangan	1,567,049,863,846.00	1,460,891,497,629.00
c.	Hibah	-	-
d.	Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	664,150,585,652.00	613,629,385,380.00
e.	Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus	359,911,885,000.00	359,911,885,000.66
f.	Bantuan Keuangan dari Propinsi	6,173,385,000.00	8,238,075,000.00
g.	Bagi Hasil Lainnya Propinsi	757,294,351.00	950,910,195.00
h.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	91,913,000.00	91,913,000.00
	Jumlah Pendapatan	5,255,244,153,444.00	5,235,293,716,914.17
2.	Belanja Daerah		
	Belanja Tidak Langsung		
a.	Belanja Pegawai	1,758,471,048,132.00	1,685,058,820,769.00
b.	Belanja Bunga	1,226,354,437.00	-
c.	Belanja Hibah	284,910,615,394.00	253,316,709,084.84
d.	Belanja Bantuan Sosial	1,651,000,000.00	853,703,500.00
e.	Belanja Bagi Hasil & Pemerintah Daerah Lainnya	5,088,082,959.00	5,088,082,959.00
f.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1,900,000,000.00	604,305,000.00
g.	Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000.00	-
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	2,063,247,100,922.00	1,944,921,621,312.84
	Belanja Langsung/Program		
a.	Belanja Pegawai	450,351,680,331.00	364,203,647,705.52
b.	Belanja Barang dan Jasa	1,694,372,007,583.00	1,466,759,779,177.53
c.	Belanja Modal	1,747,356,759,354.00	1,281,394,616,149.06
	Jumlah Belanja Langsung/Program	3,892,080,447,268.00	3,112,358,043,032.11
	Jumlah Belanja Daerah	5,955,327,548,190.00	5,057,279,664,344.95
	Surplus/Defisit	(700,083,394,746.00)	178,014,052,569.22
3.	Pembiayaan		
a.	Penerimaan	805,419,392,938.00	805,523,587,176.25
b.	Pengeluaran	18,982,907,370.00	6,448,485,000.00
	Jumlah Pembiayaan	786,436,485,568.00	799,075,102,176.25
	SILPA Tahun 2013	86,353,090,822.00	977,089,154,745.47

Sumber data : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, 2013, diolah

Tabel 3.1.2
Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2012

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi
1.	Pendapatan		
a.	Pendapatan Asli Daerah	2.341.265.681.882,00	2.279.613.848.832,61
b.	Dana Perimbangan	1.409.496.932.932,00	1.433.067.691.897,00
c.	Hibah	-	0
d.	Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	607.033.790.222,00	594.448.090.669,00
e.	Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus	309.819.125.000,00	309.819.125.000,00
f.	Bantuan Keuangan dari Propinsi	23.066.440.000,00	16.777.000.000,00
g.	Bagi Hasil Lainnya Propinsi	2.679.579.028,00	558.714.255,00
h.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	17.468.000,00
	Jumlah Pendapatan	4.693.361.549.064,00	4.634.301.938.653,61
2.	Belanja Daerah		
	Belanja Tidak Langsung		
a.	Belanja Pegawai	1.728.395.727.636,00	1.601.256.346.557,00
b.	Belanja Bunga	5.646.336.544,00	2.223.619.192,00
c.	Belanja Hibah	297.150.224.574,00	258.999.514.331,19
d.	Belanja Bantuan Sosial	1.045.000.000,00	867.500.000,00
e.	Belanja Bagi Hasil & Pemerintah Daerah Lainnya	4.673.174.229,00	1.200.000.000,00
f.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.900.000.000,00	644.208.000,00
g.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	3.054.510.589,00
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	2.048.810.462.983,00	1.868.245.698.669,19
	Belanja Langsung/Program		
a.	Belanja Pegawai	401.718.035.396,00	307.548.751.751,58
b.	Belanja Barang dan Jasa	1.525.064.821.291,00	1.210.639.630.539,86
c.	Belanja Modal	1.182.671.510.989,00	912.716.142.120,00
	Jumlah Belanja Langsung/Program	3.109.454.367.676,00	2.430.904.524.411,44
	Jumlah Belanja Daerah	5.158.264.830.659,00	4.299.150.223.080,63
	Surplus/Defisit	(464.903.281.595,00)	335.151.715.572,98
3.	Pembiayaan		
a.	Penerimaan	502.999.263.250,00	503.149.922.343,27
b.	Pengeluaran	38.095.981.655,00	32.882.244.978,00
	Jumlah Pembiayaan	464.903.281.595,00	470.267.677.365,27
	SILPA Tahun 2013	-	805.419.392.938,25

Sumber data : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, 2012, diolah

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

a. Penjelasan terkait capaian target pendapatan

Penjelasan terkait belum tercapainya target pendapatan pada beberapa SKPD selama tahun 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. RSUD Bhakti Dharma Husada

Kendala yang dihadapi RSUD Bhakti Dharma Husada :

- a. Akses transportasi dan promosi yang masih kurang menyebabkan belum optimalnya jumlah masyarakat yang berkunjung.
- b. Kekurangan dokter spesialis karena adanya dokter spesialis penyakit dalam dan ortopedi yang mengundurkan diri.
- c. Pendapatan pelayanan persalinan kurang maksimal, karena pasien menggunakan jampersal dan belum diklaim.

Tabel 3.2
Rekapitulasi Pendapatan Daerah Berdasarkan SKPD
Tahun 2013

No	Nama SKPD	Anggaran	Realisasi 2013	Realisasi 2012
1	Dinas Kesehatan	21.306.352.371,00	21.450.065.240,00	22.607.290.561,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soew andhie	76.053.295.812,00	76.633.833.150,89	49.417.253.321,19
3	Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada	18.500.000.000,00	15.650.034.736,22	9.826.180.388,29
4	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	-		18.920.780,00
5	Dinas Kebakaran	2.030.648.477,00	1.980.031.575,00	1.225.409.953,00
6	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	41.242.862.985,00	41.260.069.866,98	40.467.517.999,88
7	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	89.055.233.115,00	121.899.125.120,00	76.752.021.997,00
8	Dinas Perhubungan	37.111.182.500,00	33.640.704.491,00	30.643.203.793,00
9	Badan Lingkungan Hidup	8.000.000.000,00	9.517.808.488,64	7.625.197.441,20
10	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	35.347.169.454,00	55.357.793.071,20	14.562.091.366,04
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4.803.100.000,00	7.344.450.000,00	1.299.545.000,00
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	161.422.500,00	1.645.837,00	13.174.996,00
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.416.405.640,00	4.051.476.692,00	2.590.941.520,00
14	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.000.000.000,00	1.000.846.500,00	1.251.051.319,00
15	Bagian Perlengkapan	1.010.800.000,00	1.420.174.050,00	1.110.344.000,00
16	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan	4.911.368.259.088,00	4.839.810.321.372,24	4.374.465.273.208,01
17	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	256.612.300,00	157.540.150,00	378.312.510,00
18	Badan Arsip dan Perpustakaan	8.045.100,00	33.491.700,00	48.208.500,00
19	Dinas Pertanian	233.604.000,00	-	
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.339.160.102,00	4.030.069.320,00	
21	Bagian Umum dan Protokol		54.235.553,00	
J U M L A H		5.255.244.153.444,00	5.235.293.716.914,17	4.634.301.938.653,61

Sumber data : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, 2013, diolah

2. Dinas Perhubungan

- a. Petugas jasa parkir tidak memberikan karcis dan wajib retribusi yang tidak meminta karcis sehingga pemungutan retribusi parkir belum optimal.
- b. Adanya kendaraan wajib uji yang mutasi keluar kota Surabaya

- c. Masih ada kendaraan bermotor wajib uji yang belum melakukan uji kendaraan bermotor.

3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- a. Peraturan Walikota tentang penerimaan retribusi sentra PKL masih dalam pembahasan sehingga retribusi sentra PKL belum dipungut.
- b. Penyaluran Dana bergulir terakhir terealisasi di Tahun 2009, sisa tunggakan sulit ditagih.

4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Ada beberapa retribusi yang mempunyai kendala, antara lain:

- a. Wajib retribusi penyewa stand masih menunda pembayaran karena tidak setiap hari ada pengunjung.
- b. Beberapa gedung sedang dalam tahap renovasi sehingga tidak dapat dipungut retribusi antara lain Balai Pemuda & GNI (Gedung Nasional Indonesia).

5. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Secara keseluruhan PAD yang ada di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan sudah tercapai sesuai rencana. Namun masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi yaitu :

- a. Pajak daerah yang berasal dari Pajak Reklame belum mencapai target karena masih terdapat wajib pajak yang menunda pembayarannya, sedangkan PBB belum tercapai target karena dalam kenyataannya di lapangan terdapat objek piutang pajak yang belum teridentifikasi.
- b. Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.
PT Abbatoir tidak memberikan deviden karena perusahaan tersebut berdasarkan hasil audit mengalami kerugian
- c. Lain-lain pendapatan :
Pendapatan DAK baru terealisasi 75% dari alokasi anggaran, dan sampai dengan triwulan IV berakhir belanja yang menggunakan DAK masih

terrealisasi sebesar 44,62% dari dana yang telah diterima Pemkot Surabaya.

6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Retribusi pelayanan tera/tera ulang baru efektif dilaksanakan pada Bulan Juli 2013 belum maksimal, karena cap tanda tera baru diterima dari Metrologi Bandung tanggal 22 Juni 2013.

7. Dinas Komunikasi dan Informatika

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi baru efektif dilaksanakan setelah Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) tahun 2013. Sampai dengan akhir tahun terdapat wajib retribusi yang belum memenuhi kewajibannya.

b. Penjelasan terkait capaian target belanja

**Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2013 per SKPD**

Nomor	Nama SKPD	2013		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Dinas Pendidikan	1.526.285.999.126,00	1.358.092.586.491,53	88,98
2	Dinas Kesehatan	429.285.644.748,00	397.798.550.266,00	92,67
3	Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie	143.379.679.486,00	130.250.365.256,00	90,84
4	Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada	101.398.369.014,00	80.765.539.964,00	79,65
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	1.046.023.463.539,00	829.454.549.876,73	79,30
6	Dinas Kebakaran	56.036.693.196,00	51.813.388.381,00	92,46
7	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	79.935.778.696,00	43.590.071.270,00	54,53
8	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	386.392.219.375,00	294.384.038.029,33	76,19
9	Badan Perencanaan Pembangunan	26.688.685.904,00	22.161.524.203,00	83,04
10	Dinas Perhubungan	153.338.312.561,00	133.301.345.845,00	86,93
11	Badan Lingkungan Hidup	23.782.312.478,00	19.989.760.119,00	84,05
12	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	424.923.729.349,00	348.772.432.894,00	82,08
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	18.284.902.362,00	16.288.590.390,00	89,08
14	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	34.815.086.416,00	29.580.807.110,00	84,97
15	Dinas Sosial	89.012.651.658,00	77.979.626.278,00	87,61
16	Dinas Tenaga Kerja	25.146.397.461,00	21.965.127.836,00	87,35
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	23.675.203.373,00	17.669.114.844,00	74,63
18	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal	10.348.763.881,00	9.596.839.272,00	92,73
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	34.528.333.703,00	32.331.054.939,00	93,64
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	79.402.879.982,00	63.777.783.509,00	80,32
21	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	26.234.220.659,00	22.536.694.586,00	85,91
22	Satuan Polisi Pamong Praja	35.944.268.794,00	33.093.603.586,00	92,07
23	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	16.184.260.490,00	14.512.902.498,00	89,67
24	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.189.790.585,00	1.706.156.600,00	77,91
25	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	6.469.899.360,00	6.114.878.803,00	94,51
26	Bagian Hukum	8.142.021.909,00	7.064.657.626,00	86,77
27	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	3.904.059.855,00	3.441.442.378,00	88,15
28	Bagian Kerjasama	12.940.146.400,00	9.047.208.173,00	69,92
29	Bagian Bina Program	11.341.166.003,00	10.393.809.735,00	91,65
30	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah	3.643.080.431,00	3.115.234.411,00	85,51

31	Bagian Kesejahteraan Rakyat	3,154,381,731.00	2,813,325,100.00	89.19
32	Bagian Umum dan Protokol	69,342,356,113.00	61,873,556,868.00	89.23
33	Bagian Perlengkapan	60,095,695,631.00	55,140,997,481.00	91.76
34	Bagian Hubungan Masyarakat	8,075,452,679.00	7,603,583,562.00	94.16
35	Sekretariat DPRD	69,267,012,642.00	43,941,773,980.00	63.44
36	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan	448,229,639,018.00	382,621,202,289.84	85.36
37	Inspektorat	11,577,944,781.00	10,935,855,098.00	94.45
38	Kecamatan Genteng	10,952,834,610.00	10,083,175,297.00	92.06
39	Kecamatan Simokerto	10,404,780,386.00	9,264,062,442.00	89.04
40	Kecamatan Tegalsari	10,823,690,272.00	9,622,713,480.00	88.90
41	Kecamatan Bubutan	10,649,166,345.00	10,047,082,590.00	94.35
42	Kecamatan Kenjeran	8,933,534,106.00	8,055,989,880.00	90.18
43	Kecamatan Pabean Cantian	9,962,455,861.00	8,692,847,899.00	87.26
44	Kecamatan Semampir	10,593,696,271.00	9,235,070,717.00	87.18
45	Kecamatan Krembangan	10,383,718,649.00	9,620,470,620.00	92.65
46	Kecamatan Tambaksari	13,193,375,614.00	12,237,251,465.00	92.75
47	Kecamatan Gubeng	12,389,267,694.00	11,275,211,667.00	91.01
48	Kecamatan Rungkut	10,885,288,719.00	9,838,114,421.00	90.38
49	Kecamatan GunungAnyar	8,399,571,546.00	7,683,155,425.00	91.47
50	Kecamatan Tenggiling Mejoyo	8,725,158,289.00	7,814,248,955.00	89.56
51	Kecamatan Sukolilo	11,946,515,383.00	10,796,523,274.00	90.37
52	Kecamatan Mulyorejo	10,790,546,542.00	9,209,590,014.00	85.35
53	Kecamatan Wonokromo	13,399,719,442.00	12,221,690,977.00	91.21
54	Kecamatan Karang Pilang	8,765,376,972.00	7,974,155,683.00	90.97
55	Kecamatan Dukuh Pakis	8,763,131,476.00	7,881,484,214.00	89.94
56	Kecamatan Gayungan	8,534,576,478.00	7,836,978,227.00	91.83
57	Kecamatan Jambangan	8,315,668,812.00	7,747,597,441.00	93.17
58	Kecamatan Wonocolo	9,608,835,147.00	8,673,665,460.00	90.27
59	Kecamatan Sawahan	13,044,160,133.00	12,175,067,973.00	93.34
60	Kecamatan Wiyung	7,899,767,121.00	7,183,474,721.00	90.93
61	Kecamatan Tandes	10,921,217,032.00	9,821,964,035.00	89.93
62	Kecamatan Asem Rowo	8,314,030,366.00	7,264,869,691.00	87.38
63	Kecamatan Sukomanunggal	9,511,373,716.00	8,852,157,459.00	93.07
64	Kecamatan Benowo	8,288,544,938.00	6,902,721,555.00	83.28
65	Kecamatan Lakarsantri	9,883,721,049.00	8,703,149,537.00	88.06
66	Kecamatan Sambikerep	8,210,552,530.00	7,651,200,756.00	93.19
67	Kecamatan Pakal	9,816,489,717.00	8,726,038,862.00	88.89
68	Kecamatan Bulak	8,590,403,041.00	7,333,466,597.00	85.37
69	Badan Kepegawaian dan Diklat	22,618,774,707.00	19,324,739,399.00	85.44
70	Kantor Ketahanan Pangan	2,889,047,204.00	2,650,630,426.00	91.75
71	Dinas Komunikasi dan Informatika	30,846,425,273.00	28,739,607,671.00	93.17
72	Badan Arsip dan Perpustakaan	20,810,838,241.00	20,151,281,447.00	96.83
73	Dinas Pertanian	28,366,888,656.00	26,692,118,450.00	94.10
74	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	29,473,902,463.00	23,776,118,681.52	80.67
JUMLAH		5,955,327,548,190.00	5,057,279,664,344.95	84.92

Sumber data : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, diolah

Penjelasan terkait belum tercapainya target belanja beberapa SKPD selama tahun 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan

Hal - hal yang mempengaruhi penyerapan adalah sebagai berikut :

- a. Alokasi DAK yang terserap terakhir pada tahun 2011, sedangkan untuk tahun 2012 dan 2013 penyerapan DAK Bidang Pendidikan tidak maksimal karena adanya keterlambatan dan ketidaksesuaian juknis dalam pelaksanaannya.
- b. Adanya beberapa kegiatan yang penyerapannya belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena adanya kendala teknis.
- c. Terdapat sisa mati dari banyak kegiatan yang telah terlaksana dikarenakan efisiensi biaya.

2. Dinas Kesehatan

Beberapa hal yang menyebabkan belum terlaksananya belanja adalah sebagai berikut :

- a. Adanya pemindahan rekrutmen kebutuhan tenaga kesehatan yang rencana semula oleh Dinas Kesehatan diserahkan kepada Badan Kepegawaian dan Diklat.
- b. Sewa alat yang diperuntukkan untuk road show pembinaan kesehatan dibiayai Bagian Umum Sekretariat Daerah, sehingga anggaran tidak terserap.
- c. Biaya operasional dan pemeliharaan kesehatan di Puskesmas tidak terserap keseluruhan karena jumlah pasien rawat inap di puskesmas cenderung menurun.

3. RSUD dr. M. Soewandhie

Adapun rincian permasalahannya adalah sebagai berikut :

- a. Pada kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran alat-alat medis yang dianggarkan untuk dilakukan pemeliharaan, penyerapannya disesuaikan dengan kebutuhan.
- b. Pada kegiatan Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit :
 - Kegiatan pelatihan NICU untuk karyawan RSUD Dr. M. Soewandhie disesuaikan dengan kebutuhan sambil menunggu renovasi ruangan di RS Jantung Harapan Kita, sehingga pelatihan dialihkan ke RSUD dr. Soetomo Surabaya.

4. RSUD Bhakti Dharma Husada

Yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja RSUD Bhakti Dharma Husada antara lain :

- a. Anggaran klaim yang bersumber dari APBN berupa uang kinerja kegiatan dan belanja penggantian jasa pelayanan publik untuk pasien kuota hanya terserap sampai bulan Agustus 2013.
- b. Realisasi BBM kendaraan disesuaikan dengan kebutuhan.
- c. Kegiatan Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat penyerapannya disesuaikan dengan kunjungan pasien rawat inap.
- d. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok yang tidak dapat terealisasi karena keterbatasan waktu.
- e. Terdapat jumlah sisa mati sampai akhir tahun pada kegiatan Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit.

5. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

Kendala yang ditemui antara lain :

- a. Terdapat banyak sisa mati paket pekerjaan sampai akhir tahun.
- b. Beberapa paket pekerjaan diputuskan kontraknya karena tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik (blacklist), yaitu :
 - Kegiatan rehabilitasi untuk kemantapan jalan.
 - Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman.

6. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

Terdapat beberapa permasalahan yang ada antara lain :

- a. Kegiatan pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk prasarana kantor pemerintahan terdapat kendala antara lain :

- Kantor Kelurahan Dr. Soetomo masih dalam tahap appraisal dan menyiapkan berkas pendukung bukti kepemilikan (putusan pengadilan agama tentang pembagian waris).
 - Kantor Kelurahan Kalianak seluas 9.600 M2 telah terbit pertek tgl 27 Nop 2013, telah diajukan permohonan peninjauan lokasi tgl 4 Des 2013.
- b. Kegiatan pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk sarana kesehatan masih menunggu kajian rencana dari Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada.
- c. Kegiatan pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk fasilitas park and ride tidak dapat dilaksanakan karena lokasi yang ditunjuk sudah terjual, sekarang sedang dilakukan pencarian ulang lokasi.
- d. Kegiatan pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk sarana pendukung pengembangan ekonomi masyarakat Surabaya, terdapat beberapa kendala yaitu :
- Pasar Kutisari yang terletak di Jl. Kutisari Indah I / Jl. Kutisari Indah Barat, oleh pemilik tanah sedang disiapkan berkas pendukung bukti kepemilikan tanah (pemilik harus memperpanjang SHGB).
 - Revitalisasi Pasar Wonokromo lama telah dilakukan peninjauan lokasi namun masih menunggu serah terima.
- e. Kegiatan pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk ruang terbuka hijau, kendalanya antara lain :
- Kawasan Sentra Ikan Bulak yang direncanakan terletak di Jl. Cumpat RT 03 RW 01 seluas 11.920 M2, hingga kini pemilik tanah belum dapat menunjuk titik batas tanahnya sehingga belum dapat dilakukan pengukuran tanah oleh BPN dan appraisal belum dapat dilakukan.
 - Pamurbaya yang terletak di Kelurahan Gununganyar Tambak Kecamatan Gununganyar seluas 87.780 M2 dan 42.221 M2 dalam proses kajian terkait batasan lahan yang diperuntukkan sebagai

area konservasi, selanjutnya pengadaan tanah dilaksanakan dengan menggunakan UU No. 2 Tahun 2012.

- Makam Keputih yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo telah dilakukan pengukuran dan pemasangan patok batas atas 2 persil yang harus dibebaskan yang akan digunakan sebagai akses masuk krematorium, diajukan permohonan pertimbangan teknis pertanahan.

7. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Hal-hal yang mempengaruhi penyerapan anggaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan penanganan pembelaan gugatan hukum terhadap penataan ruang dan perijinan bangunan masih dalam proses, sehingga anggarannya belum terserap.
- b. Pembangunan/rehabilitasi fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Gedung Pendidikan Menengah (tahun jamak/multiyears), progress pekerjaan dimulai di Bulan Desember 2013, sehingga belanja yang terserap hanya uang muka saja.
- c. Pembangunan gedung dan peralatan RSUD dr. M. Soewandhie belum selesai dan dilakukan pemutusan pekerjaan.
- d. Untuk kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana dasar pemukiman yang tidak dapat dilaksanakan dan mengalami putus kontrak, yaitu Pengurangan Rusun Romokalisari), selain itu ada beberapa biaya pemasangan listrik yang tidak dapat terserap (sisa mati).
- e. Pengadaan sarana dan prasarana sanitasi (DAK Bidang Sanitasi) mengalami kendala masih menunggu petunjuk teknis dari Pusat tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
- f. Ada 5 (lima) paket pekerjaan untuk kegiatan pembangunan/rehabilitasi dan pengawasan fasilitas gedung pemerintah dan pemerintah daerah yang tidak dapat selesai dan mengalami putus kontrak, yaitu pekerjaan di Gedung Arsip dan Perpustakaan, Balai Pemuda, Selasar Dinas PU, Masjid Muhajirin, dan Kelurahan Sukolilo.

8. Dinas Perhubungan

Sebagian besar kegiatan telah dilaksanakan secara optimal, meskipun terdapat sisa anggaran dari sisa lelang maupun efisiensi anggaran. Adapun hal yang berpengaruh pada penyerapan anggaran yaitu :

- a. Pekerjaan Peningkatan/pengembangan Terminal Angkutan tidak dapat dilakukan pengurukan, landasan paving dan biaya pengawasan berkaitan masalah tanah dengan PT Maspion.
- b. Kegiatan Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan, belum dapat dilakukan pengadaan bus untuk trayek percontohan karena gagal lelang, sehingga pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan yang diperuntukkan untuk pembangunan halte bus guna menunjang kegiatan angkutan massal tidak dapat dilaksanakan.

9. Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Hal-hal yang berpengaruh pada penyerapan anggaran yaitu :

- a. Penyerapan BBM kendaraan disesuaikan dengan kebutuhan.
- b. Penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan pemasangan penerangan jalan umum sebesar Rp.30 Milyar hanya terserap sebanyak Rp.400 juta dikarenakan masih dilakukan uji coba teknologi di 2 (dua) taman saja, yaitu Taman Jayengrono dan Taman Ronggolawe.

10. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang mempengaruhi penyerapan adalah :

- a. Pada kegiatan seleksi & pembinaan program teknologi tepat guna (TTG), uang kinerja dan makan minum untuk jabatan struktural diserap sesuai kebutuhan.
- b. Sosialiasi dan evaluasi untuk program beras untuk masyarakat miskin dilaksanakan sesuai kebutuhan sebanyak satu kali.

- c. Pada kegiatan fasilitas perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan, dari rencana anggaran untuk dua shelter, satu shelter masih dalam tahap renovasi sehingga anggaran diserap sesuai kebutuhan.

11. Dinas Tenaga Kerja

Sebagian besar kegiatan Dinas Tenaga Kerja telah terlaksana namun ada beberapa kendala antara lain:

- a. Peserta magang kerja bagi pencari kerja potensial tidak mencapai 100% karena banyak yang sudah bekerja.
- b. Belanja bantuan peralatan untuk kegiatan fasilitasi penyediaan sarana & prasarana pendukung untuk calon wirausaha baru tersebut belum memenuhi persyaratan untuk diberi bantuan
- c. Ada efisiensi harga untuk kegiatan penyediaan stan di pasar modern, sehingga dari harga sewa stand yang dulu dialokasikan sebesar Rp.2,5 juta sekarang harganya turun menjadi Rp.1,5 juta.
- d. Perda yang mengatur tentang tenaga kerja asing masih dalam proses sehingga honorarium untuk narasumber dan tenaga ahli diserap sesuai kebutuhan.

12. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Hal-hal yang mempengaruhi penyerapan anggaran :

- a. Honor narasumber dan uang kinerja diserap sesuai kebutuhan.
- b. Anggaran kegiatan untuk jasa notaris penyusunan akte koperasi, honor tenaga surveyor, pengadaan rombongan PKL, uang lembur diserap sesuai kebutuhan.

13. Dinas Pertanian

Penyerapan anggaran Dinas Pertanian sampai dengan triwulan IV sebagian besar dapat terserap dengan baik, hanya ada permasalahan pada kegiatan pengembangan perikanan, dengan nama pekerjaan Karamba Jaring Apung III senilai Rp.246.491.850 yang tidak terserap dikarenakan gagal lelang.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan Laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Di Pemerintah Kota Surabaya entitas pelaporan dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Surabaya menggunakan basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran yaitu untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk Neraca yang terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas dana.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

❖ Pendapatan

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

❖ Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran berupa Uang Persediaan, Pengakuan Belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi Perbendaharaan dengan diterbitkannya SP2D GU/ LPJ UP/TU.

❖ **Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Daerah sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah.

❖ **Transaksi dalam mata uang asing**

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

❖ **Kas dan Setara Kas**

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca. Termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek yaitu kurang dari tiga bulan sejak tanggal perolehannya.

Pengakuan saat diterima atau dikeluarkan dan dinilai berdasarkan nilai nominal uang.

Apabila ada kas daerah dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi.

Kas terdiri atas Kas di Umum Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan. Setara kas terdiri atas simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

❖ **Investasi Jangka Pendek**

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Investasi Jangka Pendek terdiri dari Deposito Berjangka tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) serta pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

Pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :

- a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*)

❖ **Piutang**

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang antara lain terdiri dari :

- a. Piutang Pajak
- b. Piutang Retribusi
- c. Piutang Dana Bagi Hasil
- d. Piutang Dana Alokasi Umum
- e. Piutang Dana Alokasi Khusus

Pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang yaitu pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Agar nilai piutang sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) maka disesuaikan dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya piutang sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang.

❖ **Piutang Lain-Lain**

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan definisi antara piutang dengan piutang lain-lain, hanya klasifikasinya saja yang berbeda.

Piutang Lain-Lain terdiri dari :

- a. Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran
- b. Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah
- c. Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah
- d. Piutang Dividen
- e. Piutang Bagi Hasil Laba usaha Perusahaan Daerah
- f. Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

❖ **Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud :

- a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah
- b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan inventarisasi fisik (stock opname).

Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
- Biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri
- Nilai wajar jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan.

Persediaan antara lain terdiri dari :

- a. persediaan alat tulis kantor
- b. persediaan alat listrik
- c. persediaan material/bahan
- d. persediaan benda pos
- e. persediaan bahan bakar
- f. persediaan bahan makanan pokok

❖ **Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria :

- Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah
- Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable)

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :

a. Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan

tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Kriterianya adalah kepemilikan kurang dari 20%.

b. Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi asset tetap. Kriterianya adalah kepemilikan 20% sampai 50% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50%.

c. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode ini digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Investasi Jangka panjang terdiri dari:

- Investasi Permanen yaitu : investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
Terdiri dari : penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara serta investasi permanen lainnya.
- Investasi Non Permanen yaitu : investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
Terdiri dari : pembelian Surat Utang Negara, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, investasi non permanen lainnya.

Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir.

❖ **Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
2. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
3. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
4. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Selain itu juga mempunyai nilai yang material sesuai nilai minimum kapitalisasi sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Surabaya.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, ditambah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut ke kondisi siap untuk digunakan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah :

1. biaya impor
2. biaya persiapan tempat
3. biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost)
4. biaya pemasangan (installation cost)
5. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur
6. biaya konstruksi
7. biaya kepanitiaan

Aset tetap terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Kebijakan akuntansi tentang penyusutan sampai dengan 31 Desember 2013 belum dilaksanakan dan bertahap akan diterapkan setelah penataan aset tetap di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya selesai dilaksanakan.

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang. Aset tetap secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya.

❖ **Dana Cadangan**

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk beberapa tahun anggaran menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olah raga.

❖ **Aset Lainnya**

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri atas:

1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara langsung kepada pegawai Pemerintah daerah/ Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. Contoh: tagihan piutang penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan piutang penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai pemerintah daerah/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara/daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Tuntutan ganti rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah/daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan /atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan antara lain berupa :

- a) **Bangun, Kelola/Guna, Serah** adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. Dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun, Kelola/Guna, Serah tersebut. Aset yang berada dalam Bangun, Kelola/Guna, Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
- b) **Bangun, Serah, Kelola/Guna** adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola/digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut oleh pihak ketiga/investor tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Bangun, Serah, Kelola/Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang dipisahkan dari aset tetap ditambah dengan jumlah aset yang dibangun oleh pihak ketiga/investor sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- c) **Kerjasama Operasi (KSO)** adalah perikatan antara Pemerintah Daerah yang menyediakan aset daerah dengan pihak ketiga menanamkan modalnya, selanjutnya kedua belah pihak secara bersama-sama atau bergantian mengelola manajemen dan proses operasionalnya sesuai dengan kesepakatannya. Pengakuan dan penilaian berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aset lainnya tersebut selesai dibangun.

4. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh : hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud meliputi :

- a. software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun
- b. lisensi dan franchise
- c. hak cipta (copyright), paten dan hak lainnya
- d. hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

5. Aset Lain-Lain

Pos aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah.

❖ **Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi terdiri dari :

❖ **Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Utang PFK merupakan kewajiban yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari SP2D atau dokumen lain yang dipersamakan.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai

dengan tanggal neraca. Terdiri dari : Utang Taspen, Utang askes, Utang PPh Pusat, Utang PPN Pusat, Utang Taperum, Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya.

❖ **Utang Bunga**

Utang bunga timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang.

Nilai yang dicantumkan adalah sebesar biaya bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah daerah.

Utang bunga terdiri dari : Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat, Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya, Utang Bunga kepada BUMN/BUMD, Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan, Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya, Utang Bunga Luar Negeri.

❖ **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Pengakuan dan penilaian pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembayaran bagian lancar utang jangka panjang yang akan dibayarkan di satu periode akuntansi mendatang.

Terdiri dari : Utang Bank, Utang Obligasi, Utang Pemerintah Pusat, Utang Pemerintah Provinsi, Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.

❖ **Pendapatan Diterima Dimuka**

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima kasnya namun pendapatan tersebut belum menjadi hak pada periode yang bersangkutan.

Pengakuan dan penilaian pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah penerimaan kas yang telah diakui dalam periode berjalan.

Terdiri dari : setoran kelebihan pembayaran dari pihak ketiga, uang muka penjualan produk Pemerintah Daerah dari pihak ketiga, uang muka lelang penjualan aset daerah.

❖ **Utang Jangka Pendek Lainnya**

Kewajiban Lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

❖ **Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

1. Utang Dalam Negeri : Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan, Utang Dalam Negeri Obligasi, Utang Pemerintah Pusat, Utang Pemerintah Provinsi, Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Utang Luar Negeri : Utang Luar Negeri Sektor Perbankan.

❖ **Ekuitas Dana**

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Ekuitas Dana diklasifikasikan ke dalam :

a. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

Terdiri dari : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), pendapatan yang ditangguhkan, cadangan piutang, cadangan persediaan, dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

b. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

Terdiri dari : diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, diinvestasikan dalam Aset Tetap, diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan), dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang.

c. Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Terdiri atas : diinvestasikan dalam Dana Cadangan.

❖ **Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa**

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :

1. Kesalahan yang tidak berulang

Adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis yaitu kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

- Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak,

- dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
- Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.
 - Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait.
 - Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.
 - Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar.
 - Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

2. Kesalahan yang berulang dan sistemik
Kesalahan yang berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas pemerintah daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut:

- a. tidak merupakan kegiatan normal dari entitas
- b. tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang
- c. berada diluar kendali atau pengaruh entitas
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran II

Standart Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas menuju Akrua) dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 serta Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 58 tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya.

❖ **Penyajian Laporan Keuangan**

- Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Pemerintah Daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan kecuali terhadap aktiva tetap apabila tidak diperoleh harga perolehan digunakan harga perolehan yang diestimasi
- Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas modifikasi yaitu merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual
- Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode, agar informasi yang dijadikan dapat dipahami atau untuk memudahkan pembaca perlu diberikan penjelasan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan, sejalan dengan maksud tersebut tahapan penjelasan pos-pos Laporan Keuangan ini akan diawali dengan penjelasan Laporan Neraca, Realisasi Anggaran dan Arus Kas.

(I) PENJELASAN LAPORAN NERACA

Neraca merupakan Lampiran II dari Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surabaya tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013 dan disusun berdasarkan peraturan yang ada dan disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk Posisi Keuangan per 31 Desember 2013 Pemerintah Kota Surabaya secara umum sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Aset	Rp 37.450.893.488.257,31
2.	Kewajiban	Rp 100.412.621.185,86
3.	Ekuitas Dana	Rp 37.350.480.867.071,45

Jumlah **Aset** sebesar Rp.37.450.893.488.257,31; terdiri dari Aset lancar sebesar Rp.1.398.840.797.561,11; Investasi Jangka panjang sebesar Rp.1.826.649.121.407,40; Aset Tetap sebesar Rp.32.904.208.124.230,20 serta Aset lainnya sebesar Rp.1.321.195.445.058,60.

Jumlah **Kewajiban** sebesar Rp.100.412.621.185,86; terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.100.412.621.185,86; dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0,00.

Total **Ekuitas Dana** sebesar Rp.37.350.480.867.071,45; terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp.1.298.428.176.375,25; Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp.36.052.052.690.696,20.

I. ASET	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp.37.450.893.488.257,31	Rp.35.358.824.156.594,80

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Jumlah Aset tahun 2013 sebesar Rp.37.450.893.488.257,31 dan tahun 2012 sebesar Rp.35.358.824.156.594,80 mengalami kenaikan sebesar 6%.

Pemerintah Kota Surabaya memiliki aset sebesar Rp.37.450.893.488.257,31 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

No.	Aset	31-Des-13 (Rp)	31-Des-12 (Rp)
1	Aset lancar	1.398.840.797.561,11	1.145.622.991.452,60
2	Investasi jangka panjang	1.826.649.121.407,40	1.697.206.373.389,32
3	Aset tetap	32.904.208.124.230,20	32,276,066,905,289.07
4	Aset lainnya	1.321.195.445.058,60	239.927.886.463,81
Jumlah Aset		37.450.893.488.257,31	35,358,824,156,594.80

A. ASET LANCAR	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp.1.398.840.797.561,11	Rp.1.145.622.991.452,60

Aset Lancar diklasifikasikan jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, serta berupa kas dan setara kas. Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya yang terdiri dari Kas di

Kasda, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD RSUD dr. M.Soewandhie, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lain-lain, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Persediaan.

Jumlah Aset Lancar tahun 2013 sebesar Rp.1.398.840.797.561,11 dan tahun 2012 sebesar Rp.1.145.622.991.452,60 mengalami kenaikan sebesar 22%.

1. Kas di Kas Daerah	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp.978.204.777.201,54	Rp.802.394.710.664,45

Jumlah tersebut merupakan saldo kas dan bank per 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Bank/Rekening	2013	2012
1	Giro Bank Jatim No. Rek 0011007000	Rp 378.204.777.201,54	Rp 702.394.710.664,45
2	Deposito Bank Jatim berjangka satu bulan (DB171778)	-	Rp 100.000.000.000,00
3	Deposito Bank Jatim berjangka satu bulan (DB243552)	Rp 100.000.000.000,00	-
4	Deposito Bank Jatim berjangka satu bulan (DB243793)	Rp 100.000.000.000,00	-
5	Deposito Bank Mandiri berjangka satu bulan (AD327247)	Rp 50.000.000.000,00	-
6	Deposito Bank Mandiri berjangka satu bulan (AD327248)	Rp 50.000.000.000,00	-
7	Deposito BNI berjangka satu bulan (PAA884242)	Rp 50.000.000.000,00	-
8	Deposito BNI berjangka satu bulan (PAA884243)	Rp 50.000.000.000,00	-
9	Deposito BRI berjangka satu bulan (DC2841017)	Rp 100.000.000.000,00	-
10	Deposito BTN berjangka satu bulan (PAA884243)	Rp 100.000.000.000,00	-
Jumlah Bank/Rekening		Rp 978.204.777.201,54	Rp 802.394.710.664,45

2. Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp.1.351.684.885,00	Rp.699.959.598,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013 sebesar Rp.1.351.684.885,00 terdiri dari :

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Perhubungan	1.145.823.552,00
2.	Kecamatan Tambaksari	30.032.493,00
3.	Kecamatan Gubeng	166.362.940,00
4.	Kecamatan Semampir	4.529.100,00
5.	Kecamatan Tegalsari	4.936.800,00
Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran		1.351.684.885,00

Sisa Uang Persediaan (UP) sebesar Rp.1.351.684.885,00 telah disetor kembali oleh Bendahara Pengeluaran SKPD ke Kas Umum Daerah pada Tahun 2014.

3. Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp.182.819.245,00	Rp.245.871.790,00

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp.182.819.245,00 telah disetor oleh bendahara penerimaan ke Kas Umum Daerah pada tahun 2014.

Kas di Bendahara Penerimaan SKPD sebesar Rp.182.819.245,00 terdapat pada SKPD :

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	95.140.000,00
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	35.414.000,00
3	Dinas Perhubungan	33.668.300,00
4	RSUD Bhakti Dharma Husada	18.596.945,00
Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan		182.819.245,00

4. Kas di BLUD RSUD dr.M.Soewandhie	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp.33.903.803.392,69	Rp.32.847.216.891,80

Saldo kas di BLUD RSUD dr. SOEWANDHIE per 31 Desember 2013 sebesar Rp.33.903.803.392,69 terdiri dari :

No.	Bank/Rekening	2013	2012
1.	Bank Jatim No. Rek .0011.233.074	13.879.646.077,69	12.833.786.892,66
2.	Deposito Bank Jatim (berjangka 1 bulan)		
	- DB 221302	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	- DB 221303	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	- DB 221305	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	- DB 221306	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
3.	Kas tunai	24.157.315,00	13.429.999,14
Jumlah Kas di BLUD RSUD dr. Soewandhie		33.903.803.392,69	32.847.216.891,80

5. Piutang Pajak	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp.579.935.528.005,00	Rp.574.367.758.421,00

Saldo piutang pajak daerah per 31 Desember 2013 dan 2012 sebesar Rp.579.935.528.005,00 dan Rp.574.367.758.421,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	2013	2012
1	Piutang Pajak Hotel	Rp 8.967.496.292,00	Rp 7.117.297.877,00
2	Piutang Pajak Restoran	Rp 13.376.410.192,00	Rp 12.402.086.401,00
3	Piutang Pajak Hiburan	Rp 1.335.491.097,00	Rp 1.393.255.295,00
4	Piutang Pajak Reklame	Rp 30.429.161.720,00	Rp 16.807.539.120,00
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan Non PLN	Rp 90.766.446,00	Rp 93.130.558,00
6	Pajak Parkir	Rp 514.320.528,00	Rp 543.761.278,00
7	BPHTB	Rp 2.437.170.562,00	Rp 2.495.619.941,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 522.714.292.788,00	Rp 533.459.374.951,00
9	Pajak Air Tanah	Rp 70.418.380,00	Rp 55.693.000,00
Jumlah (lampiran 1)		Rp 579.935.528.005,00	Rp 574.367.758.421,00

Mutasi Piutang Pajak tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal per 1 Januari 2013	Rp 574.367.758.421,00
2.	Penambahan Tahun 2013	Rp 97.570.528.622,00
3.	Pengurangan Tahun 2013	Rp (92.002.759.038,00)
4.	Saldo Akhir per 31 Desember 2013	Rp 579.935.528.005,00

Mutasi Piutang Pajak Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Awal 1-1-2013	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31-12-2013
1	Pajak Hotel	7.117.297.877,00	2.790.087.545,00	939.889.130,00	8.967.496.292,00
2	Pajak Restoran	12.402.086.401,00	1.203.186.406,00	228.862.615,00	13.376.410.192,00
3	Pajak Hiburan	1.393.255.295,00	0	57.764.198,00	1.335.491.097,00
4	Pajak Reklame	16.807.539.120,00	17.486.324.000,00	3.864.701.400,00	30.429.161.720,00
5	PPJ Non PLN	93.130.558,00	636.365,00	3.000.477,00	90.766.446,00
6	Pajak Parkir	543.761.278,00	615.000,00	30.055.750,00	514.320.528,00
7	BPHTB	2.495.619.941,00	5.234.310,00	63.683.689,00	2.437.170.562,00
8	PBB	533.459.374.951,00	76.024.384.536,00	86.769.466.699,00	522.714.292.788,00
9	Air Tanah	55.693.000,00	60.060.460,00	45.335.080,00	70.418.380,00
Jumlah		574.367.758.421,00	97.570.528.622,00	92.002.759.038,00	579.935.528.005,00

Perkembangan saldo Piutang PBB tersebut dari saat pelimpahan sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

No	KKP Pratama	Berita Acara Serah Terima	Nilai (Rp)
1	Surabaya Genteng	BA-03/WPJ.11/KP.09/2011	14.232.153.134,00
2	Surabaya Gubeng	BA-04/WPJ.11/KP.04/2011	73.079.350.000,00
3	Surabaya Krembangan	BA-042/WPJ.11/KP.0201/2011	15.416.160.000,00
4	Surabaya Pabean Cantikan	BA-05/WPJ.11/KP.03/2011	11.389.989.441,00
5	Surabaya Rungkut	BA-02/WPJ.11/KP08/2011	67.851.398.000,00
6	Surabaya Sawahan	BA-03/WPJ.11/KP.06/2011	42.979.818.000,00
7	Surabaya Simokerto	BA-03/WPJ.11/KP.1004/2011	17.400.283.000,00
8	Surabaya Mulyorejo	BA-10/WPJ.11/KP.12/2011	74.832.464.908,00
9	Surabaya Sukomanunggal	BA-12/WPJ.11/KP.01/2011	146.121.706.871,00
10	Surabaya Tegalsari	BA-04/WPJ.11/KP.0501/2011	15.511.255.775,00
11	Surabaya Wonocolo	BA-03/WPJ.11/KP.07/2011	59.334.972.590,00
12	Surabaya Karangpilang	BA-03 A/WPJ.11/KP.13/2011	81.369.451.362,00
Total			619.519.003.081,00
Koreksi Tambah Tahun 2011			785.227.405,00
Koreksi Kurang Tahun 2011			(18.226.432.683,00)
Penerbitan SPPT PBB TA 2011			441.089.588.831,00
Pelunasan PBB TA 2011			(467.815.337.823,00)
Saldo Piutang PBB 31 Des 2011			575.352.048.811,00
Koreksi Tambah Tahun 2012			8.097.548.164,00
Koreksi Kurang Tahun 2012			(993.772.745,00)
Penerbitan SPPT PBB TA 2012			494.666.680.974,00
Pelunasan PBB TA 2012			(543.663.130.253,00)
Saldo Piutang PBB TA 2012 (per 31 Desember)			533.459.374.951,00
Koreksi Tambah Tahun 2013			28.290.203.817,00
Koreksi Kurang Tahun 2013			(1.211.824.816,00)
Penerbitan SPPT PBB TA 2013			567.279.520.912,00
Pelunasan PBB TA 2013			(605.102.982.076,00)
Saldo Piutang PBB TA 2013 (per 31 Desember)			522.714.292.788,00

Piutang PBB per 31 Desember 2013 senilai Rp522.714.292.788,00 tersebut masih belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan memperhitungkan denda keterlambatan. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok besar yaitu sebagai berikut:

No.	Kategori Piutang	Piutang (Rp)
1.	Konfirmasi (WP yang telah membayar akan tetapi masih tercatat pada piutang PBB)	6.770.059.659,00
2.	Telah dilakukan penagihan dan angsuran (termasuk diantaranya tanah kosong, rumah kosong, fasum, fasos, tanah pemerintahan)	168.534.866.151,00
3.	SPPT ganda Nomor Objek Pajak (NOP)	6.811.083.146,00
4.	Belum ditemukan obyek dan wajib pajak	93.960.303.164,00
5.	Sedang dan akan diidentifikasi	246.637.980.668,00
JUMLAH		522.714.292.788,00

Pemerintah Kota Surabaya akan berupaya untuk memperbaiki permasalahan tersebut melalui beberapa upaya yang berkelanjutan yaitu :

- ❖ Melakukan koordinasi dengan Kanwil DJP Jawa Timur I dan KPP Pratama serta Bank tempat dilakukan PBB;
- ❖ Menyusun Peraturan Walikota tentang perbaikan data dan pendataan kembali tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan;
- ❖ Merencanakan kegiatan/pekerjaan atas pemutakhiran dan pendataan PBB;
- ❖ Menyusun Peraturan Walikota yang berkaitan dengan tindak lanjut piutang PBB antara lain: (1) Penagihan Pajak Daerah; (2) Penghapusan Piutang Daerah yang sudah kadaluarsa.

6. Piutang Retribusi	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp.57.984.042.393,92	Rp.35.452.090.268,36

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2013 dan 2012 sebesar Rp.57.984.042.393,92 dan Rp.35.452.090.268,36 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	2013	2012
1	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Rp 88.653.875,00	Rp 88.653.875,00
2	Retribusi Pasar Grosir (UPTD Pasar Turi)	Rp 758.346.735,00	Rp 758.346.735,00
3	Retribusi Kebersihan pada PDAM	Rp 1.349.348.779,60	Rp 966.776.120,00
4	Retribusi THR	Rp 327.477.914,00	Rp 237.780.843,00
5	Retribusi Balai Pemuda	Rp 181.776.000,00	Rp 181.776.000,00
6	Retribusi Tanah Sempadan (Bina Marga dan Pematusan)	Rp 1.400.050.426,08	Rp 1.400.337.526,08
7	Retribusi IMB - Ciptakarya	Rp 49.908.574.797,00	Rp 29.750.859.565,00
8	Retribusi SKRK-Ciptakarya	Rp 420.905.623,00	Rp 400.115.623,00
9	Retribusi sewa stand Terminal	Rp 297.927.693,00	Rp 221.440.500,00
10	Retribusi Pelayanan-BDH	Rp 2.284.459.379,56	Rp 980.742.444,00
11	Retribusi Ijin Gangguan (HO)	Rp 21.891.180,00	Rp 73.139.790,00
12	Retribusi Gelanggang Remaja	Rp 1.000.000,00	Rp 2.000.000,00
13	Retribusi Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	Rp 240.152.091,68	Rp 390.121.247,28
14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Rp 703.477.900,00	Rp -
Jumlah		Rp 57.984.042.393,92	Rp 35.452.090.268,36

Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Awal 1-1-2013	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31-12-2013
1.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	88.653.875,00	0	0	88.653.875,00
2.	Retribusi Pasar Grosir (UPTD Pasar Turi)	758.346.735,00	0	0	758.346.735,00
3.	Retribusi Kebersihan pada PDAM	966.776.120,00	1.349.348.779,60	966.776.120,00	1.349.348.779,60
4.	Retribusi THR	237.780.843,00	110.509.303,00	20.812.232,00	327.477.914,00
5.	Retribusi Balai Pemuda	181.776.000,00	0	0	181.776.000,00
9.	Retribusi Tanah Sempadan (Bina Marga dan Pematusan)	1.400.337.526,08	0	287.100,00	1.400.050.426,08
10.	Retribusi IMB - Ciptakarya	29.750.859.565,00	145.445.918.477,00	125.288.203.245,00	49.908.574.797,00
11.	Retribusi SKRK-Ciptakarya	400.115.623,00	1.104.209.684,00	1.083.419.684,00	420.905.623,00
12.	Retribusi sewa stand Terminal	221.440.500,00	287.829.484,00	211.342.291,00	297.927.693,00
13.	Retribusi Pelayanan Kesehatan -BDH	980.742.444,00	2.233.322.485,56	929.605.550,00	2.284.459.379,56
14.	Retribusi Ijin Gangguan (HO) BLH	73.139.790,00	9.466.559.878,64	9.517.808.488,64	21.891.180,00
15.	Retribusi Gelanggang Remaja (Dispora)	2.000.000,00	0	1.000.000,00	1.000.000,00
16.	Retribusi Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	390.121.247,28	51.751.812,72	201.720.968,32	240.152.091,68
17.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Diskominfo)	0	703.477.900,00	0	703.477.900,00
Jumlah		35.452.090.268,36	160.752.927.804,52	138.220.975.678,96	57.984.042.393,92

Sumber data : SKPD Kota Surabaya, diolah

7. Piutang lain-lain

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp.138.610.115.263,18

Rp.75.268.588.006,83

Saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2013 dan 2012 sebesar Rp.138.610.115.263,18 dan Rp.75.268.588.006,83, dengan rincian saldo sebagai berikut :

URAIAN		2013	2012
1. Piutang RSUD dr Soewandhie			
a	Piutang jamkesmas kuota RSUD dr. Soewandhie	Rp 14.053.323.269,16	Rp 4.274.045.526,81
b	Piutang jamkesmas non kuota RSUD dr Soewandhie	Rp 1.993.031.000,00	Rp 284.015.391,52
c	Piutang askes sosial RSUD dr. Soewandhie	Rp 218.453.000,00	Rp 104.387.500,00
d	Piutang obat askes RSUD dr. Soewandhie	Rp 193.844.191,00	Rp 131.697.894,00
e	Piutang obat In Health RSUD dr. Soewandhie	Rp 812.133,00	Rp 4.449.531,00
f	Piutang In Health RSUD dr. Soewandhie	Rp 2.225.250,00	Rp 11.354.250,00
g	Piutang PT. KAI RSUD dr. Soewandhie	Rp 107.945.025,00	Rp 85.610.925,00
h	Piutang Jamkesda RSUD dr. Soewandhie	Rp 97.706.751,00	Rp -
2. Piutang Lain-lain eks DPRD		Rp 185.274.343,50	Rp 185.274.343,50
3. Piutang bantuan Parpol		Rp 155.000.000,00	Rp 155.000.000,00
4. Piutang sewa gedung Siola			
a	Piutang Gedung Tunjungan Center Lt I,II,III	Rp 1.883.022.336,00	Rp 1.810.598.400,00
b	Piutang JPO dan Pertokoan diatas Jl. Tunjungan dan Jl Tanjung Anom	Rp 264.343.040,00	Rp 254.176.000,00
c	Piutang tunggakan sewa tanah dan bangunan PT Tunjungan City Hopefull	Rp 1.487.352.937,00	Rp 1.339.957.601,00
5. Piutang tunggakan retribusi tanah dan denda oleh TVRI		Rp 2.696.404.190,00	Rp 2.696.404.190,00
6. Piutang kepada rekanan penyedia barang jasa			
a	Koreksi atas sanksi administrasi penyedia ba-rang	Rp 384.498.301,00	Rp 384.498.301,00
b	Koreksi atas Nilai Jaminan Pelaksanaan dari Rekanan	Rp 871.922.880,00	Rp 871.922.880,00
c	Piutang atas denda keterlambatan (Ciptakarya)	Rp 31.281.816,00	Rp -
7. Piutang dana bagi hasil dari Provinsi			
a	Piutang DBH Provinsi – Pajak	Rp 113.168.501.192,00	Rp 57.987.186.370,00
b	Piutang DBH Provinsi – Sumbangan Pihak Ketiga	Rp 11.588.083,00	Rp 22.362.472,00
8. Piutang sewa Gelora 10 Nopember – Dispora		Rp 89.550.000,00	Rp 95.550.000,00
9. Piutang sewa Gelora Bung Tomo – Dispora		Rp -	Rp 110.000.000,00
10. Piutang dividen PT. SKU Tahun 2012		Rp 274.277.461,00	Rp 274.277.461,00
11. Piutang kontribusi Bangun Guna/Kelola Serah Pasar Turi		Rp 439.758.064,52	Rp 4.185.818.970,00
Jumlah		Rp 138.610.115.263,18	Rp 75.268.588.006,83

Mutasi Piutang Lain-lain Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Awal 1-1-2013	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31-12-2013
1.	Piutang RSUD dr. Soewandhie				
	• Piutang Jamkesmas Kuota	4.274.045.526,81	35.381.969.825,36	25.602.692.083,01	14.053.323.269,16
	• Piutang Jamkesmas Non Kuota	284.015.391,52	30.614.760.514,07	28.905.744.905,59	1.993.031.000,00
	• Piutang askes sosial	104.387.500,00	2.231.460.500,00	2.117.395.000,00	218.453.000,00
	• Piutang Obat Askes	131.697.894,00	2.099.119.462,00	2.036.973.165,00	193.844.191,00
	• Piutang Obat In Health	4.449.531,00	17.856.205,00	21.493.603,00	812.133,00
	• Piutang In Health	11.354.250,00	38.845.200,00	47.974.200,00	2.225.250,00
	• Piutang kepada PT KAI	85.610.925,00	384.129.800,00	361.795.700,00	107.945.025,00
	• Piutang Jamkesda	0	1.395.574.160,56	1.297.867.409,56	97.706.751,00
2.	Piutang Lain-lain eks DPRD	185.274.343,50	0	0	185.274.343,50
3.	Piutang bantuan Parpol Bakesbanglinmas	155.000.000,00	0	0	155.000.000,00
4.	Piutang sewa gedung Siola				
	• Piutang tunggakan sewa tanah dan bangunan PT. Tunjungan City Hopefull	1.339.957.601,00	1.487.352.937,00	1.339.957.601,00	1.487.352.937,00
	• Piutang Gedung Tunjungan Center Lt I,II,III	1.810.598.400,00	1.883.022.336,00	1.810.598.400,00	1.883.022.336,00
	• Piutang JPO dan Pertokoan diatas Jl. Tunjungan dan Jl Tanjung Anom	254.176.000,00	264.343.040,00	254.176.000,00	264.343.040,00
5.	Piutang tunggakan retribusi tanah dan denda oleh TVRI Surabaya	2.696.404.190,00	0	0	2.696.404.190,00
6.	Piutang kepada Rekanan penyedia barang jasa				
	• Koreksi atas sanksi administrasi penyedia barang jasa berdasarkan perhitungan bersama PPK SKPD	384.498.301,00	0	0	384.498.301,00
	• Koreksi atas Nilai Jaminan Pelaksanaan dari Rekanan	871.922.880,00	0	0	871.922.880,00
	• Piutang atas denda keterlambatan (Ciptakarya)	0,00	31.281.816,00	0	31.281.816,00
7.	Piutang dana bagi hasil dari Pemprov				
	• Bagi Hasil Pajak	57.987.186.370,00	113.168.501.192,00	57.987.186.370,00	113.168.501.192,00
	• Sumbangan Pihak Ketiga	22.362.472,00	11.588.083	22.362.472,00	11.588.083
8.	Piutang sewa Gelora 10 Nopember – Dispora	95.550.000,00	0	6.000.000,00	89.550.000,00
9.	Piutang sewa Gelora Bung Tomo-Dispora	110.000.000,00	0	110.000.000,00	0
10.	Piutang dividen PT. SKU tahun 2012	274.277.461,00	0	0	274.277.461,00
11.	Piutang kontribusi Bangun Guna/Kelola Serah Pasar Turi beserta sanksi denda 1% per bulan	4.185.818.970,00	439.758.064,52	4.185.818.970,00	439.758.064,52
Jumlah		75.268.588.006,83	189.449.563.135,51	126.108.035.879,16	138.610.115.263,18

- 1.a. Piutang Jamkesmas Kuota RSUD dr.Mochamad Soewandhie sebesar Rp.14.053.323.269,16 merupakan klaim atas pelayanan kesehatan pasien Jamkesmas Kuota Tahun 2013, sedangkan piutang Tahun 2012 sebesar Rp.4.274.045.526,81 telah dilunasi Tahun 2013.
 - b. Piutang Jamkesmas Non Kuota RSUD dr. Mochamad Soewandhie sebesar Rp.1.993.031.000,00 merupakan klaim atas pelayanan kesehatan pasien Jamkesmas Non Kuota Tahun 2013.
 - c. Piutang askes RSUD dr. Mochamad Soewandhie sebesar Rp.218.453.000,00 merupakan klaim pelayanan kesehatan pasien askes Tahun 2013 ke PT. Askes Surabaya.
 - d. Piutang obat askes RSUD dr. Mochamad Soewandhie sebesar Rp.193.844.191,00 merupakan klaim pemakaian obat Tahun 2013 ke PT. Askes Surabaya.
 - e. Piutang obat In Health dr. Mochamad Soewandhie merupakan klaim pemakaian obat In Health selama 2013 sebesar Rp.812.133,00.
 - f. Piutang In Health dr. Mochamad Soewandhie sebesar Rp.2.225.250,00 merupakan klaim pelayanan In Health Tahun 2013.
 - g. Piutang PT.KAI dr.Mochamad Soewandhie sebesar Rp.107.945.025,00 merupakan klaim pelayanan kesehatan selama tahun 2013.
 - h. Piutang Jamkesda dr.Mochamad Soewandhie sebesar Rp.97.706.751,00 merupakan klaim pelayanan kesehatan selama tahun 2013.
2. Piutang lain-lain eks anggota DPRD sebesar Rp.185.274.343,50 meliputi kelebihan pembayaran penghasilan DPRD Kota Surabaya tahun 2004 yang melebihi ketentuan SE Mendagri No.161/3211/SJ tanggal 2 Desember 2003 dan sisa Dana Pengembangan Sumber Daya Manusia Anggota DPRD Kota Surabaya Tahun 2001-2002 yang digunakan tidak sesuai ketentuan. Adapun nama para pejabat DPRD Kota Surabaya tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) HS,SH anggota DPRD senilai Rp.41.251.668,70
 - b) YSS, anggota DPRD senilai Rp.45.751.668,70
 - c) H.Ism, anggota DPRD senilai Rp.40.051.668,70
 - d) FS, anggota DPRD senilai Rp.36.751.668,70

- e) MB, anggota DPRD senilai Rp.21.467.668,70
3. Piutang bantuan Parpol Bakesbanglinmas tahun 2013 sebesar Rp.155.000.000,00.
- 4 a. Pada Tahun 2013 PT. Tunjungan City Hopefull mempunyai tunggakan sewa tanah dan bangunan sebesar Rp.1.487.352.937,00.
- b. Piutang sewa Tahun 2013 Gedung Tunjungan Center Lt I, II, III Jl. Tunjungan No. 3 sebesar Rp.1.883.022.336,00 oleh PT. Tunjungan City Hopefull.
- c. Piutang sewa selama Tahun 2013 atas JPO dan pertokoan diatas Jl. Tunjungan dan Jl. Tanjung Anom sebesar Rp.264.343.040,00 oleh PT. Tunjungan City Hopefull.
5. Piutang tunggakan retribusi tanah dan denda oleh TVRI Surabaya sebesar Rp.2.696.404.190,00 belum ada pelunasan karena pihak TVRI masih mengajukan banding.
6. a. Piutang kepada rekanan penyedia barang/jasa atas sanksi administrasi penyedia barang jasa sebesar Rp.384.498.301,00 berdasarkan perhitungan bersama PPK SKPD. Tahun 2010 sampai Tahun 2013 belum ada pelunasan.
- b. Sedangkan piutang atas Nilai Jaminan Pelaksanaan dari Rekanan sebesar Rp.871.922.880,00 berasal dari Nilai Jaminan yang semula berada di aset lain-lain, tapi jaminan pelaksanaan tidak bisa dicairkan karena telah melewati batas waktu sehingga di konversi menjadi Piutang Lain-lain. Rincian saldo per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

No.	Rekanan	Piutang sanksi administrasi	Piutang Jaminan Pelaksanaan
1.	PT Rukun Jaya Madura Group	137.412.792,00	402.409.920,00
2.	PT Rukun Jaya Madura Group	121.435.375,00	210.180.000,00
3.	PT Daya Guna Permata	82.100.069,00	198.306.720,00
4.	CV Endah Elok Energi	43.550.065,00	61.026.240,00
Jumlah		384.498.301,00	871.922.880,00

- c. Piutang atas denda keterlambatan (Dinas Cipta Karya) pada tahun 2013 sebesar Rp.31.281.816,00.

7. Piutang Dana Bagi Hasil dari Propinsi yang belum diterima oleh Pemerintah Kota Surabaya selama Tahun 2013 berasal dari : Bagi Hasil Pajak sebesar Rp.113.168.501.192,00 dan Sumbangan Pihak Ketiga sebesar Rp.11.588.083,00.
8. Piutang sewa Gelora 10 Nopember sebesar Rp.89.550.000,00 merupakan penambahan atas sewa pemakaian lapangan Tahun 2013 oleh PSSI Surabaya sebesar Rp.50.091.000,00 dan Panitia Festival Pemuda dan Hari Lapangan (FPHP) 2013 sebesar Rp.39.459.000,00.
9. Piutang sewa Gelora Bung Tomo sebesar Rp.110.000.000,00 telah dilunasi pada tahun 2013.
10. Piutang deviden pada PT Surya Karsa Utama sebesar Rp.274.277.461,00, sesuai data laporan keuangan PT Surya Karsa Utama tahun 2013.
11. Piutang kontribusi Bangun Guna/Kelola Serah Pasar Turi beserta sanksi denda 1% per bulan sebesar Rp.439.758.064,52 berdasar perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan GMI (yang diwakili oleh PT Gala Bumi Perkasa) nomor 180/1096/436.1.2/2010. Pada tanggal 28 Februari 2014, terdapat pelunasan piutang pokok belum termasuk denda sebesar Rp.437.500.000,00 berdasar bukti STS J03544/Kas/II/2014.

8. Bagian Lancar	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Tuntutan Ganti Rugi.	Rp.322.530.471,52	Rp.271.360.000,00

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp.322.530.471,52 merupakan reklasifikasi dari Aset Lainnya. Sesuai Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomer 6 yang mengatur tentang Akuntansi Piutang bahwa piutang ganti rugi yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketetapan penyelesaian yang telah ditetapkan disajikan sebagai aset lancar. Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2013 sebesar Rp.322.530.471,52 terdiri atas :

NO	N A M A	SISA CICILAN (Rp)
1	(Alm) STJ	6.350.000,00
2	(Alm) Drs. M	37.800.000,00
3	(Alm) M	6.000.000,00
4	S, BE	46.000.000,00
5	Drs. A C	8.000.000,00
6	Drs. SMJ	50.000.000,00
7	Drs. SMS	4.700.000,00
8	SNRY	5.350.000,00
9	MNW	36.000.000,00
10	MTN	71.160.000,00
11	FH	11.428.000,00
12	US	13.424.950,00
13	Sla	12.417.522,22
14	ESW	13.899.999,30
J U M L A H		322.530.471,52

9. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	(Rp.462.155.735.876,51)	(Rp.431.166.027.040,33)

Sesuai Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomer 6 yang mengatur tentang Akuntansi Piutang dan Peraturan Walikota no 58 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya maka dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih berdasar atas umur piutang dan jenis piutang sebagai berikut :

No.	URAIAN	2013	2012
1	Penyisihan Piutang Pajak (Lampiran 2)	(449.310.985.329,00)	(424.782.976.430,00)
2	Penyisihan Piutang Retribusi (Lampiran 3)	(8.201.606.591,82)	(2.350.676.910,83)
3	Penyisihan Piutang Lain-lain (Lampiran 4)	(4.371.783.955,69)	(3.761.013.699,50)
4	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(271.360.000,00)	(271.360.000,00)
T O T A L		(462.155.735.876,51)	(431.166.027.040,33)

Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2013 sebesar (Rp.449.310.985.329,00) terdiri dari :

No.	Piutang Pajak	2013	2012
1	Piutang Pajak Hotel	Rp (5.203.075.487,00)	Rp (4.344.716.832,00)
2	Piutang Pajak Restoran	Rp (10.871.153.557,00)	Rp (9.640.126.838,00)
3	Piutang Pajak Hiburan	Rp (1.210.263.032,00)	Rp (1.102.234.478,00)
4	Piutang Pajak Reklame	Rp (7.817.616.095,00)	Rp (5.266.581.020,00)
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan Non PLN	Rp (88.552.293,00)	Rp (84.832.067,00)
6	Pajak Parkir	Rp (452.365.759,00)	Rp (404.467.002,00)
7	BPHTB	Rp (1.808.504.335,00)	Rp (1.199.211.695,00)
8	Pajak Bumi dan Bangunan	Rp (421.851.428.001,00)	Rp (402.739.622.143,00)
9	Pajak Air Tanah	Rp (8.026.770,00)	Rp (1.184.355,00)
Jumlah Piutang Pajak		Rp (449.310.985.329,00)	Rp (424.782.976.430,00)

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2013 sebesar (Rp.8.201.606.591,82) terdiri dari :

No.	Piutang Retribusi	2013	2012
1	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Rp (88.653.875,00)	Rp (88.653.875,00)
2	Retribusi Pasar Grosir (UPTD Pasar Turi)	Rp (680.265.158,75)	Rp (614.611.863,75)
3	Retribusi THR	Rp (115.545.373,50)	Rp (89.107.467,25)
4	Retribusi Balai Pemuda	Rp (174.657.000,00)	Rp (161.238.000,00)
5	Retribusi Tanah Sempadan (Bina Marga dan Pematusan)	Rp (1.265.347.445,58)	Rp (1.042.352.822,58)
6	Retribusi IMB (Cipta Karya)	Rp (5.594.297.407,00)	Rp (238.867.726,25)
7	Retribusi SKRK (Cipta Karya)	Rp (195.962.811,50)	Rp (97.205.155,75)
8	Retribusi sewa stand Terminal	Rp (19.932.989,75)	Rp (11.829.762,75)
9	Retribusi pelayanan (BDH)	Rp (19.594.461,00)	Rp (6.810.237,50)
10	Retribusi Gelanggang Remaja	Rp (250.000,00)	Rp -
11	Retribusi Pemakaian Tanah	Rp (47.100.069,74)	Rp -
Jumlah Piutang Retribusi		Rp (8.201.606.591,82)	Rp (2.350.676.910,83)

Penyisihan Piutang Lain-lain per 31 Desember 2013 sebesar (Rp.4.371.783.955,69) terdiri dari :

No.	URAIAN	2013	2012
1	Piutang Lain-lain eks DPRD	Rp (185.274.343,50)	Rp (185.274.343,50)
2	Piutang Dividen PT SKU	Rp (274.277.461,00)	Rp -
3	Piutang bantuan Parpol Bakesbang-linmas	Rp (155.000.000,00)	Rp (155.000.000,00)
4	Koreksi atas sanksi administrasi penyedia barang jasa berdasarkan perhitungan ber-sama PPK SKPD	Rp (384.498.301,19)	Rp (288.373.726,00)
5	Koreksi atas Nilai Jaminan Pelaksanaan dari rekanan	Rp (653.942.160,00)	Rp (435.961.440,00)
6	Piutang tunggakan retribusi tanah dan denda oleh TVRI Surabaya	Rp (2.696.404.190,00)	Rp (2.696.404.190,00)
7	Piutang gelora 10 November	Rp (22.387.500,00)	Rp -
Jumlah		Rp (4.371.783.955,69)	Rp (3.761.013.699,50)

Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2013 sebesar Rp.271.360.000,00 terdiri dari:

No.	Nama	31 Desember 2013	31 Desember 2012
1	(Alm) STJ	Rp (6.350.000,00)	Rp (6.350.000,00)
2	(Alm) Drs. M	Rp (37.800.000,00)	Rp (37.800.000,00)
3	(Alm) M	Rp (6.000.000,00)	Rp (6.000.000,00)
4	S, BE	Rp (46.000.000,00)	Rp (46.000.000,00)
5	Drs. A C	Rp (8.000.000,00)	Rp (8.000.000,00)
6	Drs. SMJ	Rp (50.000.000,00)	Rp (50.000.000,00)
7	Drs. SMS	Rp (4.700.000,00)	Rp (4.700.000,00)
8	SNRY	Rp (5.350.000,00)	Rp (5.350.000,00)
9	MNW	Rp (36.000.000,00)	Rp (36.000.000,00)
10	MTN	Rp (71.160.000,00)	Rp (71.160.000,00)
Jumlah		Rp (271.360.000,00)	Rp (271.360.000,00)

10. Piutang Bersih	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp.314.696.480.257,11	Rp.254.193.769.655,86

Sesuai Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 6 yang mengatur tentang Akuntansi Piutang dan Peraturan Walikota Nomor 58 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya, maka piutang disajikan berdasar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penyajian piutang secara nilai bersih yang dapat direalisasikan tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Piutang Bersih	2013	2012
1	Piutang bersih Pajak	Rp 130.624.542.676,00	Rp 149.584.781.991,00
2	Piutang bersih Retribusi	Rp 49.782.435.802,10	Rp 33.101.413.357,53
3	Piutang bersih Lain-lain	Rp 134.238.331.307,49	Rp 71.507.574.307,33
4	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	Rp 51.170.471,52	Rp -
Jumlah Piutang Bersih		Rp 314.696.480.257,11	Rp 254.193.769.655,86

Sumber data : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, diolah

11. Persediaan	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp.70.501.232.579,77	Rp.55.241.462.852,49

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut (**Lampiran 5**):

No.	Persediaan	2013	2012
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp 1.618.450.632,33	Rp 1.088.627.586,79
2	Persediaan Obat-obatan		
	· Dinas Kesehatan	Rp 9.682.643.227,00	Rp 12.829.089.927,00
	· RS Dr Soewandhie	Rp 2.521.492.221,29	Rp 3.040.717.763,37
	· Dinas Pertanian	Rp 36.464.738,00	Rp 26.752.308,00
	· RSUD Bhakti Dharma Husada	Rp 16.813.385.027,48	Rp 10.078.426.274,48
3	Persediaan Bahan Makanan		
	· RSUD. Dr. Soewandhie	Rp 92.866.100,00	Rp 107.736.675,00
	· RSUD Bhakti Dharma Husada	Rp 82.968.171,00	Rp 135.751.059,00
4	Persediaan Bahan Material		
	· Aspal dan Material Lainnya Dinas Bina Marga	Rp 1.801.636.176,45	Rp 1.322.730.778,30
	· Aspal dan Material Lainnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Rp 2.537.572.056,00	Rp 2.050.429.638,00
	· Bahan baku bangunan - Dinas Kebakaran	Rp 1.210.000,00	Rp 1.078.000,00
	· Bahan baku bangunan - Dinas Cipta Karya	Rp 652.497.840,00	Rp 42.367.809,00
5	Persediaan Bahan Kimia		
	· Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Rp -	Rp 133.070.095,00
	· Badan Lingkungan Hidup	Rp -	Rp 18.053.200,00
	· Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Rp 56.900,00	Rp -
6	Persediaan Bahan Habis Pakai Kedokteran		
	· RSUD. Dr. Soewandhie	Rp 3.292.352.715,26	Rp 2.688.262.737,00
	· RSUD Bhakti Dharma Husada	Rp 1.489.170.833,40	Rp 667.342.349,71
	· Persediaan bongkaran gedung di Bagian Perlengkapan	Rp 307.687.750,00	Rp 349.053.000,00
	Persediaan Bibit Tanaman pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Rp 98.450.000,00	Rp 483.130.890,00
	Persediaan Ternak Dinas Pertanian	Rp 156.349.100,00	Rp 134.292.405,00
	Persediaan Alat Kontrasepsi di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	Rp 422.444.000,00	Rp 67.632.270,00
	Persediaan alat listrik RSUD Bhakti Dharma Husada	Rp 117.761.389,70	Rp 70.779.591,67
7	Persediaan Habis Pakai Lainnya	Rp 28.775.773.701,86	Rp 19.906.138.495,17
	Jumlah Persediaan	Rp 70.501.232.579,77	Rp 55.241.462.852,49

B. INVESTASI JANGKA PANJANG	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp.1.826.649.121.407,40	Rp.1.697.206.373.389,32

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari dua belas bulan. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu investasi permanen dan investasi nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi jangka panjang pada tahun 2013 sebesar Rp.1.826.649.121.407,40 dan tahun 2012 sebesar Rp.1.697.206.373.389,32 mengalami kenaikan 8%.

Investasi Jangka Panjang yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya Per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 1.826.649.121.407,40 yang terdiri dari Investasi Non Permanen sebesar Rp.1.725.000,00 dan Investasi Permanen sebesar Rp.1.826.647.396.407,40.

1. Investasi Non Permanen	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp.1.725.000,00	Rp.10.750.000,00

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi non permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya berupa dana yang disisihkan oleh Pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat.

a. Investasi Non Permanen Lainnya	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp.3.979.113.717,27	Rp.4.083.307.955,27

Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2013 sebesar Rp.3.979.113.717,27 merupakan dana Pemerintah Kota Surabaya yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat/koperasi di bawah pengawasan Tim Pokja. Dana tersebut terdiri dari :

No.	Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012
1.	Dana Pembangunan Kota/ Kabupaten Surabaya (DPKK) Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Rp 133.703.742,00	Rp 133.703.742,00
2.	Bantuan Kepada Peternak Sapi Kereman Dinas	Rp 18.300.000,00	Rp 18.300.000,00
3.	Bantuan Modal Bergulir untuk Pengembangan Usaha Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Pedagang Kaki Lima -	Rp 3.827.109.975,27	Rp 3.931.304.213,27
Jumlah		Rp 3.979.113.717,27	Rp4.083.307.955,27

- Dana Pembangunan Kota/Kabupaten Surabaya (DPKK) di Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp.133.703.742,00.

Saldo awal dana bergulir sebesar Rp.240.000.000,00 antara lain telah dilakukan penutupan rekening dana bergulir dengan sisa saldo sebesar Rp.83.998.807,59 yang telah disetor ke Kas Umum Daerah tanggal 08 Nopember 2010, selain itu juga terdapat honorarium dan biaya operasional yang diberikan berkaitan dengan penyampaian dana bergulir sesuai Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45/114/402.01.04/2001 dan Nomor 188.45/115/402.01.04/2001 sebesar Rp.22.297.450,00.

Sehingga terdapat tunggakan sebesar Rp.133.703.742,00 yang merupakan pinjaman Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Perdagangan yang digulirkan untuk :

- 22 UKM pada Tahap I dengan sisa tunggakan sebesar Rp.91.355.083,00
- 9 UKM pada Tahap II dengan sisa tunggakan sebesar Rp.42.348.659,00

Sejak Tahun 2003 sampai dengan saat ini tidak terjadi pengangsuran dari para UKM tersebut.

Pada bulan Nopember dan Desember 2009, telah dilakukan konfirmasi penagihan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan dan ditanda tangani langsung oleh pihak UKM atas pengakuan hutang dan kesanggupan membayar, namun sampai dengan saat ini belum ada UKM yang melakukan pengangsuran, meskipun sudah dilakukan penagihan/konfirmasi ulang.

Pada bulan September dan Nopember 2010 dilakukan upaya penagihan kembali dan proses pengembalian pinjaman terhambat dikarenakan beberapa hal antara lain :

- Peminjam telah meninggal dunia, ahli waris tidak mengetahui pinjaman tersebut sehingga tidak bersedia untuk bertanggung jawab
- Usaha peminjam pindah alamat keluar kota dan alamat tidak terdeteksi
- Usaha peminjam tutup dan tidak sanggup untuk melakukan pengembalian
- Peminjam mengakui telah melunasi, namun tidak dapat menunjukkan bukti pelunasan (kwitansi), sementara data yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya tidak terdapat pembayaran sesuai rekening koran bank.

- **Bantuan kepada Peternak Sapi Kereman di Dinas Pertanian sebesar Rp.18.300.000,00.**

Dana bergulir berupa penyerahan sapi kepada pengaduh untuk dipelihara dengan cara penggemukan oleh pengaduh sesuai dengan surat perjanjian no. 524/986.1/402.4.10/2003 tanggal 30 Juni 2003 dengan kewajiban selambat-lambatnya pada bulan ke-12 menyerahkan sapi hasil penggemukan kepada Dinas Pemantapan Pangan/Dinas Pertanian dengan sistem bagi hasil dengan pengembalian modal pokok untuk digulirkan kembali. Saldo awal dana bergulir sebesar Rp.41.600.000,00 berupa modal pokok pembelian 13 ekor sapi anakan seharga Rp.3.200.000,00 per ekornya. Dana tersebut diberikan

kepada 13 pengaduh dilingkungan pemerintah kota surabaya. Posisi per 31 Desember 2013 dari ke 13 pengaduh telah melakukan angsuran kepada Dinas pertanian sebesar Rp.23.300.000,00, sehingga masih tersisa sebesar Rp.18.300.000,00.

Hasil konfirmasi kepada pengaduh diketahui bahwa keberadaan sapi dana bergulir sudah tidak ada. Pengaduh telah menjual sapi yang dipeliharanya untuk kemudian hasil penjualan digunakan sebagai modal kerja, sewa lahan garapan dan membayar operasi keluarganya, namun atas hasil penjualan tersebut tidak disampaikan kepada Pemerintah Kota.Saldo bantuan sebesar Rp.18.300.000,00 merupakan tunggakan seluruh masyarakat kepada Dinas Pertanian. Dan sampai akhir Desember 2013 belum ada pelunasan.

- **Bantuan Modal Bergulir untuk Pengembangan Usaha Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Pedagang Kaki Lima di Dinas Koperasi dan Sektor Informal sebesar Rp.3.827.109.975,27.**

Mutasi tahun 2013 adalah :

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal per 1 Januari 2013	Rp 3.931.304.213,27
2	Penambahan Tahun 2013	Rp -
3	Pengurangan Tahun 2013	Rp (104.194.238,00)
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2013	Rp 3.827.109.975,27

Pengurangan Investasi sebesar Rp.104.194.238,00 merupakan pengembalian Pokok Dana Bergulir ke Kas Umum Pemerintah Kota Surabaya, sehingga pokok dana bergulir berkurang menjadi sebesar Rp.3.827.109.975,27.

b. Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp.3.977.388.717,27	Rp.4.072.557.955,27

Sesuai Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomer 6 yang mengatur tentang Akuntansi Piutang dan Peraturan Walikota Nomor 58 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya maka dilakukan penyisihan

investasi non permanen dana bergulir tidak tertagih berdasar atas investasi non permanen dana bergulir sebagai berikut :

No.	Penyisihan Dana Bergulir tidak Tertagih	2013	2012
1	Penyisihan Dana Pembangunan Kota/Kabupaten (DPKK)	Rp (133.703.742,00)	Rp (133.703.742,00)
2	Penyisihan Dana Bantuan Sapi Kereman	Rp (18.300.000,00)	Rp (18.300.000,00)
3	Penyisihan Dana Pengembangan Koperasi Pengusaha Kecil dan Kaki Lima	Rp (3.825.384.975,27)	Rp (3.920.554.213,27)
Jumlah Penyisihan Dana Bergulir tidak Tertagih (lampiran 6)		Rp (3.977.388.717,27)	Rp (4.072.555.943,27)

c. Investasi Non Permanen Bersih	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp.1.725.000,00	Rp.10.750.000,00

Sesuai Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomer 6 yang mengatur tentang Akuntansi Piutang dan Peraturan Walikota Nomor 58 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya maka dana bergulir disajikan berdasar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penyajian dana bergulir secara nilai bersih yang dapat direalisasikan tersebut adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	2013	2012
1	Dana Pengembangan Koperasi Pengusaha Kecil dan Kaki Lima bersih	Rp 1.725.000,00	Rp 10.750.000,00
TOTAL		Rp 1.725.000,00	Rp 10.750.000,00

2. Investasi Permanen	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp.1.826.647.396.407,40	Rp.1.697.195.623.389,32

a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp.1.826.647.396.407,40	Rp.1.697.195.623.389,32

Penilaian Investasi Pemerintah Kota Surabaya menggunakan Metode Ekuitas untuk kepemilikan 20% sampai 100%, sedangkan untuk kepemilikan kurang dari 20% dinilai dengan Metode Biaya. Rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 31 Desember 2013 dan 2012 sebesar Rp.1.826.647.396.407,40 dan Rp.1.697.195.623.389,32 adalah sebagai berikut :

No.	Perusahaan Milik Daerah	Penyertaan Modal	31 Desember 2013	31 Desember 2012
1. Perusahaan Milik Daerah				
a.	Investasi pada perusahaan Daerah Air Minum	Rp 81.403.538.341,00	Rp 1.041.368.698.955,00	Rp 939.376.752.239,00
b.	Investasi pada PD Pasar Surya	Rp 15.993.122.665,00	Rp 30.649.755.611,00	Rp 29.169.344.035,00
c.	Investasi pada PD Rumah Potong Hewan	Rp 7.045.511.405,00	Rp 10.035.863.651,00	Rp 10.852.836.567,00
d.	Investasi pada PT Surya Karsa Utama	Rp 1.250.000.000,00	Rp 1.547.052.820,80	Rp 1.810.420.573,00
e.	Investasi pada PT BPR Surya Artha Utama (SAU)	Rp 3.871.000.000,00	Rp 7.242.752.151,60	Rp 5.303.304.725,32
f.	PD Taman Satwa KBS	Rp 571.043.085.000,00	Rp 571.188.477.768,00	Rp 565.868.600.000,00
Jumlah 1		Rp 680.606.257.411,00	Rp 1.662.032.600.957,40	Rp 1.552.381.258.139,32
2. Lembaga Keuangan Bank				
a.	Investasi pada PT Bank Jatim	Rp 79.810.864.250,00	Rp 79.810.864.250,00	Rp 79.810.864.250,00
b.	Investasi pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jatim	Rp 198.059.000,00	Rp 198.059.000,00	Rp 198.059.000,00
Jumlah 2		Rp 80.008.923.250,00	Rp 80.008.923.250,00	Rp 80.008.923.250,00
3. Pihak Ketiga				
a.	Investasi pada PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	Rp 7.500.000.000,00	Rp 84.017.250.000,00	Rp 64.253.235.000,00
b.	Investasi pada PT Abbatoir Surya Jaya	Rp 900.000.000,00	Rp -	Rp -
c.	Investasi pada PT Sasana Taruna Aneka Ria (STAR)	Rp 249.000.000,00	Rp 588.622.200,00	Rp 552.207.000,00
Jumlah 3		Rp 8.649.000.000,00	Rp 84.605.872.200,00	Rp 64.805.442.000,00
TOTAL		Rp 769.264.180.661,00	Rp 1.826.647.396.407,40	Rp 1.697.195.623.389,32

1. Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke PDAM adalah 100%. Nilai Investasi pada PDAM yang tersaji sebesar Rp.1.041.368.698.955,00 tersebut, terdapat selisih sebesar Rp.30.085.347.945,00 dengan nilai ekuitas yang disajikan dalam Neraca PDAM. Hal itu karena aset saluran pipa milik Pemkot Surabaya yang digunakan oleh PDAM senilai Rp.30.085.347.945,00, pada Neraca PDAM telah dicatat sebagai penyertaan Pemkot Surabaya. Namun, penyertaan tersebut belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan aset dimaksud masih tercatat sebagai Aset Lainnya dalam Neraca Pemkot Surabaya.
2. Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke PD Pasar Surya adalah sebesar 100% sehingga pencatatan penilaian investasi Pemerintah Kota Surabaya menggunakan metode ekuitas sebesar Rp.30.649.755.611,00.
3. Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke PD Rumah Potong Hewan adalah sebesar 100% sehingga pencatatan penilaian investasi Pemerintah Kota Surabaya menggunakan metode ekuitas sebesar Rp.10.035.863.651,00.
4. Kepemilikan modal Pemerintah Daerah ke PT.Surya Karsa Utama (SKU) adalah sebesar Rp.1.547.052.820,80 atau 96%.
5. Kepemilikan modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR SAU senilai Rp.7.242.752.151,60 atau 98%.
6. Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke PD. Taman Satwa KBS adalah sebesar 100% sehingga pencatatan penilaian investasi Pemerintah Kota Surabaya menggunakan metode ekuitas sebesar Rp.571.188.477.768,00.
7. Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke PT Bank Jatim adalah sebesar 3,99%. Sedangkan untuk kepemilikan modal Pemerintah Daerah ke PT.BPR Jatim adalah sebesar 0,29%. Sehingga pencatatan penilaian investasinya menggunakan Metode Biaya karena kepemilikan modalnya dibawah 20%, jumlah investasi yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya tahun 2013 untuk Bank Jatim dan BPR Jatim sebesar Rp.79.810.864.250,00 dan Rp.198.059.000,00.
8. Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke PT. SIER sebesar 25% sehingga pencatatan penilaian investasi Pemerintah Kota Surabaya menggunakan metode ekuitas sebesar Rp.84.017.250.000,00.

9. Kepemilikan modal PT. Abbatoir Surya Jaya sebesar 30% sehingga pencatatan penilaian investasi Pemerintah Kota Surabaya menggunakan metode ekuitas. Penyertaan pada PT Abbatoir dinilai Rp.0,00 karena Ekuitas PT Abbatoir per 31 Desember 2013 bernilai minus, yaitu Rp.1.526.132.654,10.
10. PT. STAR sebesar 30% sehingga pencatatan penilaian investasi Pemerintah Kota Surabaya menggunakan metode ekuitas sebesar Rp.588.622.200,00.

Jumlah Kepemilikan Modal yang telah disetor Pemerintah Daerah sampai dengan 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut :

1. PDAM sebesar 100% dengan nilai penyertaan modal sebesar Rp.81.403.538.341,00.
2. PD Pasar Surya sebesar 100% dengan nilai penyertaan modal sebesar Rp.15.993.122.665,00.
3. PD Rumah Potong Hewan sebesar 100% dengan nilai penyertaan modal sebesar Rp.7.045.511.405,00.
4. Kepemilikan modal Pemerintah Daerah ke PT.Surya Karsa Utama (SKU) sebesar Rp.1.250.000.000,00 berupa saham sebanyak 1.250 lembar dengan harga per-sahamnya sebesar Rp.1.000.000,00.
5. Penyertaan modal pada PT BPR SAU sebesar Rp.2.597.000.000,00 berupa saham sebanyak 2.597 lembar dengan harga Rp.1.000.000,00 per lembar sahamnya. Pada awalnya, Pemerintah Kota Surabaya menyetor modal ke PT.SKU sebesar Rp.3.700.000.000,00 atau 3.700 lembar saham. Pada Tahun 2004, PT.SKU menyetor modal kepada PT.BPR SAU sebesar Rp.2.450.000.000,00 atau 2.450 lembar saham. Pada Tahun 2010, PT.SKU mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya di PT.BPR SAU (yang semula/Tahun 2004 senilai Rp.2.450.000.000,00 atau 2.450 lembar saham dan pada Tahun 2010 telah menjadi Rp.2.597.000.000,00 atau 2.597 lembar saham kepada Pemerintah Kota Surabaya. Pada tahun 2013 terdapat penambahan modal Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp.1.274.000.000,00 sesuai dengan Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surabaya kepada PT BPR SAU melalui pengalihan saham dari PT SKU kepada Pemerintah Kota Surabaya dan Akta Berita Acara RUPS

Tahunan PT BPR SAU Nomor 28 Tanggal 30 April 2012 yang dibuat oleh Notaris-PPAT Dedy Harijanto, ST, SH.

6. Pada Tahun 2012 Pemerintah Kota Surabaya mempunyai kepemilikan modal ke PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya sebesar Rp.565.868.600.000,00 berupa Tanah seluas 15,3 Ha. Pada tahun 2013 terdapat penambahan sebesar Rp.5.174.485.000,00 kepada PD. Taman Satwa KBS sesuai dengan Perda Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 tentang PD Taman Satwa KBS. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Surat Direktur Utama PD. Taman Satwa KBS Tanggal 18 Juli 2013 Nomor : 001/Ext/PDTS/VII/2013; Hal : Pencairan Dana.

Per 31 Desember 2013, PD KBS menguasai Aset Tetap berupa bangunan gedung dan peralatan yang berada diatas tanah milik Pemerintah Kota Surabaya yang diserahkan kepada PD KBS sebagai penyertaan modal Pemkot Surabaya. Aset Tetap berupa bangunan gedung dan peralatan tersebut merupakan milik Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya (PTFSS) yang merupakan pihak pengelola Kebun Binatang Surabaya sebelumnya dan saat ini digunakan oleh PD KBS dalam kegiatan pengelolaan KBS. Atas aset tersebut masih dalam status sengketa di pengadilan mulai mantan pengurus PTFSS. Berdasarkan laporan keuangan Kebun Binatang Surabaya tahun 2012 audited nilai aset tetap yang berada dalam penguasaan PD KBS adalah sebesar Rp2.854.432.880,00.

7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Lembaga Keuangan Bank adalah dengan Investasi pada PT Bank Jatim dengan total investasi semula sebesar Rp.32.230.000.000,00 berupa kepemilikan saham sebanyak 32.230 lembar harga per sahamnya sebesar Rp.1.000.000,00 mendapat tambahan dana cadangan umum yang dikonversi menjadi saham sehingga total penyertaan menjadi sebesar Rp.79.810.864.250,00 atau sebanyak 319.243.457 lembar harga per sahamnya sebesar Rp.250,00, sesuai Berita Acara RUPS LB No 19 Tanggal 19 Maret 2012. Sedangkan investasi pada PT.Bank Perkreditan Rakyat Jatim sebesar Rp.198.059.000,00 adalah berupa kepemilikan saham sebanyak 198 lembar yang harga persahamnya sebesar Rp.1.000.000,00.

8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga adalah dengan melakukan Investasi pada PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT.SIER) sebesar Rp.7.500.000.000,00, yang merupakan kepemilikan saham sebanyak 7.500 lembar yang harga per-lembaranya adalah sebesar Rp.1.000.000,00.
9. Investasi kepada PT. Abbatoir Surya Jaya sebesar Rp.900.000.000,00 merupakan kepemilikan saham sebanyak 9.000 lembar yang harga persahamnya sebesar Rp.100.000,00,
10. Penyertaan modal kepada PT STAR merupakan kepemilikan saham sebanyak 1.200 lembar saham senilai Rp.249.000.000,00 atau senilai Rp.207.500,00 per lembar saham atas Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya kepada PT. Sasana Wisata sebagai penyertaan (*inbrenng*) sebagai modal saham dalam PT.STAR sesuai perjanjian penggunaan tanah nomor 181.2/1739/411.12/87 tanggal 20 Juli 1987. Atas penyertaan modal tersebut Pemerintah Kota Surabaya telah menerbitkan sertifikasi HGB diatas HPL Nomor 21/K, surat ukur Nomor 1271 Tahun 1988 atas nama PT.Sasana Wisata dan berakhir tahun 2006.

	31 Desember 2013	31 Desember 2012
C. ASET TETAP	Rp.32.904.208.124.230,20	Rp.32.276.066.905.289,07

Aset tetap tahun 2013 sebesar Rp.32.904.208.124.230,20 dan tahun 2012 sebesar Rp.32.276.066.905.289,07 mengalami kenaikan 2%.

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012
1.	Tanah	25.927.505.754.851,52	26.360.913.183.989,70
2.	Peralatan dan Mesin	1.596.950.573.698,57	1.388.948.910.302,04
3.	Gedung dan Bangunan	2.394.705.500.118,86	2.021.660.083.968,87
4.	Jalan, Jaringan dan Instalasi	2.774.347.096.373,03	2.379.557.319.282,78
5.	Aset Tetap Lainnya	48.740.161.128,84	46.519.609.130,27
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	161.959.038.059,38	78.467.798.615,41
Jumlah		32.904.208.124.230,20	32.276.066.905.289,07

1. Tanah**31 Desember 2013**
Rp.25.927.505.754.851,52**31 Desember 2012**
Rp.26.360.913.183.989,70

Tanah senilai Rp.25.927.505.754.851,52 dan Rp.26.360.913.183.989,70 merupakan nilai tanah per 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanah	31 Desember 2013	31 Desember 2012
1	Tanah Kampung	1.052.631.291.234,89	Rp 1.154.046.858.847,38
2	Tanah Kuburan	89.512.084.841,00	Rp 89.766.113.841,00
3	Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami	28.325.250.328,00	Rp 28.325.250.328,00
4	Tanah Kebun Campuran Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain	49.709.000,00	Rp 49.709.000,00
5	Tanah Hutan Untuk Penggunaan Khusus	1.715.199.008.110,00	Rp 1.853.712.217.710,00
6	Tanah Tambak	62.910.421.897,00	Rp 62.910.421.897,00
7	Tanah Danau	7.983.704.000,00	Rp 7.983.704.000,00
8	Tanah Penggalan	589.315.441,00	Rp 589.315.441,00
9	Tanah Bangunan Perumahan / Gedung Tempat Tinggal	9.531.665.497.814,00	Rp 9.588.774.298.814,00
10	Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan /Perusahaan	384.624.186.844,50	Rp 14.450.826.844,50
11	Tanah Untuk Bangunan Industri	12.630.000,00	Rp 12.630.000,00
12	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	1.591.989.994.349,33	Rp 1.574.432.865.400,33
13	Tanah Kosong	59.196.891.708,00	Rp 56.122.491.708,00
14	Tanah Bangunan Pengairan	50.364.180.776,00	Rp 50.364.180.776,00
15	Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	609.367.554.981,50	Rp 609.962.754.981,50
16	Tanah Lembiran/Bantaran/Lepelepe/Stren dll	2.451.020.595,00	Rp 2.451.020.595,00
17	Tanah Lapangan Olahraga	225.901.187.749,00	Rp 247.351.225.949,00
18	Tanah Lapangan Parkir	2.162.530.600,00	Rp 2.162.530.600,00
19	Tanah Lapangan Penimbun Barang	376.537.766,00	Rp 376.537.766,00
20	Tanah Untuk Bangunan Jalan	10.231.003.705.286,80	Rp 10.743.544.796.587,00
21	Tanah Untuk Bangunan Air	238.472.884.729,50	Rp 247.258.166.104,00
22	Tanah Untuk Bangunan Instalasi	18.734.050.000,00	Rp 2.283.150.000,00
23	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	-	Rp -
24	Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	23.982.116.800,00	Rp 23.982.116.800,00
Jumlah Tanah		25.927.505.754.851,52	Rp 26.360.913.183.989,70

Mutasi Tanah tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal per 1 Januari 2013	Rp 26.360.913.183.989,70
2	Penambahan Tahun 2013	Rp 689.029.263.478,00
3	Pengurangan Tahun 2013	Rp (1.122.436.692.616,18)
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2013	25.927.505.754.851,52

Penambahan Tanah tahun 2013 sebesar Rp.689.029.263.478,00 berasal dari:

- Pengadaan/pembelian selama tahun 2013 sebesar Rp.237.607.491.225,00 (**lampiran 7**) diperoleh dari :
 - a. Belanja modal tanah Tahun 2013 dialokasikan sebesar Rp.238.158.398.925,00 namun setelah melalui proses verifikasi dari Bendahara barang SKPD dan Bagian Perlengkapan, maka yang bisa diklasifikasikan menjadi asset tetap tanah sebesar Rp.235.663.704.625,00. Sedangkan sisa belanja modal tanah sebesar Rp.2.494.694.300,00 diklasifikasikan sebagai asset tetap bukan tanah
 - b. Belanja modal selain tanah setelah melalui proses verifikasi antara Bendahara barang SKPD dan Bagian Perlengkapan yang diakui sebagai asset tetap tanah sebesar Rp.1.943.786.600,00 .
- Penyerahan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial perumahan palm spring regency dikelurahan Jambangan kecamatan Jambangan dari PT. Soid Gold Prima berdasarkan BAST 660.5866/436.7.1/2012 – 015/SGP/EKS/XI/2012 berupa tanah sebesar 2.483.220.000,00
- Penambahan dari tanah yang belum tercatat selama tahun 2013 sebesar Rp.397.006.149.600,00.
- Koreksi saldo awal berupa tindakan kapitalisasi dan pemutakhiran nilai tanah yang bernilai Rp.0,- yang mengakibatkan terjadinya koreksi nilai tambah asset tetap tanah selama tahun 2013 sebesar Rp.36.596.402.653,00.
- Koreksi nilai tambah dalam rangka penggabungan dan penambahan nilai tanah, atas kesalahan pencatatan aset tanah Fasum/Fasos yang diserahkan oleh PT. Darmo Satelite Town dari nilai tanah yang dikoreksi hapus sebesar Rp.15.336.000.000,00.

Pengurangan Aset Tanah selama Tahun 2013 sebesar Rp.1.122.436.692.616,18 disebabkan :

- Pengurangan asset tetap tanah selama tahun 2013 sebesar Rp.7.421.502.653,00 merupakan pengurangan yang disebabkan adanya koreksi hapus asset tetap tanah dikarenakan kegiatan kapitalisasi dan pencatatan ganda.
 - Reklasifikasi atas pencatatan ganda Aset Tetap Tanah ke Aset Lainnya sebesar Rp.1.097.220.333.694,18.
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp.107.102.000,00.
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah menjadi Aset Tetap Jalan, Instalasi dan Jaringan sebesar Rp.2.351.754.269,00.
 - Koreksi hapus dalam penggabungan dan penambahan nilai atas kesalahan pencatatan Aset Tanah Fasum/Fasos yang diserahkan oleh PT. Darmo Satelite Town, sebesar Rp.15.336.000.000,00.
- Pengurangan nilai aset tetap tanah
Per 31 Desember 2013 terjadi penurunan nilai aset tetap tanah dibandingkan nilai per 31 Desember 2012 yang disebabkan pencatatan ganda dan kesalahan pencatatan nilai aset tetap tanah sebesar Rp.1.097.220.333.694,17.
 1. Berdasarkan BAST nomor0502/011.3/402.6.01/1997 tanggal 10 Maret 1997, PT. Darmo Satelite Town menyerahkan tanah fasum/fasos seluas 590.934,20m² dimana Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) mencatat tanah tersebut sebagai asset tetap tanah – tanah kampong seluas 1.499.200m² dalam empat register senilai Rp.162.524.500.000,00 sehingga terdapat kelebihan pencatatan asset tetap sebesar Rp.98.462.810.173,49.
 2. Pemerintah Kota Surabaya melakukan pencatatan ganda atas asset tetap tanah yang disajikan DPBT dengan asset tanah – tanah jalan, tanah lapangan, tanah taman, dan tanah puskesmas yang dicatat SKPD lain dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.890.258.293.360,69.
 3. Selain itu Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan pencatatan ganda atas aset tanah yang memiliki luasan dan alamat sama pada dua register yang berbeda dengan nilai keseluruhan sebesar Rp108.499.230.160,00. Atas permasalahan

tersebut aset tetap tanah yang telah teridentifikasi terdapat kesalahan pencatatan direklasifikasi ke Aset Lainnya - aset lain-lain untuk selanjutnya dilakukan verifikasi ulang sebelum dilakukan penghapusan.

- Pemerintah Kota Surabaya telah mengidentifikasi sebesar Rp1.217.229.157.470,00 aset tetap tanah yang belum tercatat dalam neraca per 31 Desember 2013 yang terdiri dari tanah Fasum/Fasos, tanah Bekas Tanah Kas Desa, tanah Brangang, Tanah yang dibebaskan DPUBMP, Tanah terminal Joyoboyo, dan tanah Rusun penjaringsari. Atas hasil identifikasi tersebut akan dilakukan verifikasi ulang sebelum dilakukan koreksi penambahan pada Neraca per 31 Desember 2014.

Dalam tahun 2013 telah selesai disertifikatkan sebanyak 14 bidang tanah yang terletak di wilayah Kecamatan Tandes, Sukomanunggal, Pakal, Genteng, Krembangan, Jambangan, Pabean Cantikan, Gayungan dan Sawahan seluas 74.508 m2 (**lampiran 8**) terdiri dari 14 sertifikat hak pakai yang merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam mengamankan asset dan memperkuat bukti kepemilikan sebagai dasar pencatatan dalam neraca. Upaya sertifikasi ini akan terus dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan prioritas pembangunan di lingkungan kota Surabaya.

Daftar permasalahan hukum terkait sengketa tanah yang masih berada dalam proses peradilan sampai dengan 31 Desember 2013 sesuai **lampiran 9**.

2. Peralatan dan Mesin	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp.1.596.950.573.698,57	Rp.1.388.948.910.302,04

Peralatan dan Mesin sebesar Rp.1.596.950.573.698,57 dan Rp.1.388.948.910.302,04 merupakan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Peralatan dan Mesin	31 Desember 2013	31 Desember 2012
1	Alat Besar/Berat Darat	80.918.248.634,28	Rp 66.992.450.579,30
2	Alat Besar/Berat Apung	8.089.200,00	Rp 8.089.200,00
3	Alat-alat Bantu	76.622.852.373,26	Rp 59.660.494.175,26
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	259.882.490.035,78	Rp 229.781.793.192,32
5	Alat Angkutan darat Tak Bermotor	7.238.482.175,10	Rp 5.166.256.101,75
6	Alat Angkut Apung Bermotor	2.095.210.727,20	Rp 2.095.210.727,20
7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3.872.949.867,00	Rp 1.947.208.637,00
8	Alat Bengkel Bermesin	10.647.022.350,30	Rp 10.291.083.721,30
9	Alat Bengkel Tak Bermesin	2.468.728.623,98	Rp 2.716.866.245,77
10	Alat Ukur	11.851.743.405,22	Rp 11.143.152.055,22
11	Alat Pengolahan	4.380.882.857,02	Rp 4.194.833.820,39
12	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	907.313.840,93	Rp 854.491.765,93
13	Alat Kantor	98.062.857.655,34	Rp 87.567.258.750,99
14	Alat Rumah Tangga	217.421.941.332,05	Rp 186.075.962.554,59
15	Komputer dan Printer	228.437.457.124,24	Rp 216.721.817.364,15
16	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	11.574.720.330,80	Rp 10.028.223.131,83
17	Alat Studio	46.509.816.256,07	Rp 39.028.290.740,83
18	Alat Komunikasi	13.909.043.253,70	Rp 12.549.151.002,14
19	Peralatan Pemancar	6.616.331.679,78	Rp 6.385.929.774,78
20	Alat kedokteran	335.496.403.125,27	Rp 273.891.512.207,43
21	Alat Kesehatan	11.526.994.936,61	Rp 10.055.694.866,61
22	Alat Unit-unit Laboratorium	99.459.540.801,44	Rp 86.094.259.085,73
23	Alat Peraga/Praktik Sekolah	36.961.871.375,89	Rp 29.037.202.409,41
24	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	580.794.186,60	Rp 579.354.186,60
25	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	2.334.242.152,35	Rp 2.224.450.402,35
26	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	3.950.625.664,00	Rp 3.946.699.964,00
27	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	2.547.203.355,08	Rp 2.493.780.024,49
28	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	18.831.482.858,59	Rp 13.927.082.740,59
29	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	1.761.429.470,69	Rp 1.639.194.470,69
30	Senjata Api	4.250.000,00	Rp 4.250.000,00
31	Persenjataan Non Senjata Api	69.554.050,00	Rp 68.554.050,00
Jumlah Peralatan dan Mesin		1.596.950.573.698,57	Rp 1.388.948.910.302,04

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal per 1 Januari 2013	Rp 1.388.948.910.302,04
2	Penambahan Tahun 2013	Rp 249.562.962.854,30
3	Pengurangan Tahun 2013	Rp (41.561.299.457,77)
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2013	Rp 1.596.950.573.698,57

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2013 sebesar Rp.249.562.962.854,30 berasal dari:

- Pengadaan/pembelian selama tahun 2013 sebesar Rp.217.773.596.621,44
(lampiran 10) diperoleh dari :

1. Belanja modal peralatan dan mesin selama tahun 2013 dialokasikan sebesar Rp.205.018.395.845,00 namun setelah melalui proses verifikasi antara Bendahara barang SKPD dengan Bagian Perlengkapan, yang bisa diklasifikasikan menjadi asset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp.203.412.120.517,31. Sisa belanja modal sebesar Rp.1.606.275.327,69 yang menjadi asset tetap bukan peralatan dan mesin sebesar Rp.1.198.934.000,00, yang menjadi bukan asset tetap sebesar Rp.407.341.299,61.
 2. Belanja modal selain peralatan dan mesin setelah proses verifikasi antara Bendahara barang SKPD dengan Bagian Perlengkapan yang diklasifikasikan menjadi asset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp.13.633.073.891,68.
 3. Belanja barang dan jasa yang diklasifikasikan menjadi asset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp.728.402.212,40.
 4. Penambahan koreksi pembulatan sebesar Rp.0,05.
- Mutasi KDP tahun 2012 berupa pompa banjir dan kelengkapannya sebesar Rp.510.752.482,00
 - Hibah Dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Surya Timur Sakti Jatim, Direktorat Jenderal Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2hp), Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, PT Surya Timur Sakti Jatim Dan Beberapa Dari Pihak lainnya selama tahun 2013 sebesar Rp.1.371.796.475,00;
 - Penambahan aset Peralatan dan Mesin yang belum tercatat dalam buku inventaris selama tahun 2013 sebesar Rp.885.000.000,28.
 - Penambahan koreksi tambah atas kesalahan pembacaan system simbada dalam penghapusan asset peralatan dan mesin sesuai dengan keputusan Walikota nomer 188.45/313/436.1.2.2013 sebesar Rp.29.021.817.275,58.

Pengurangan Peralatan dan Mesin tahun 2013 sebesar Rp.41.561.299.457,77 terdiri atas:

- 1) Penghapusan aset Peralatan dan Mesin selama tahun 2013 berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/49/436.1.2/2013;

- 188.45/177/436.1.2/2013;188.45/207/436.1.2/2013;188.45/313/436.1.2/2013;188.45/517/436.1.2/2013;188.45/70/436.1.2/2013; sebesar Rp.35.300.551.732,57;
- 2) Koreksi saldo awal dikarenakan salah entry data (ketidakwajaran nilai asset) yang mengakibatkan terjadinya koreksi nilai kurang asset tetap peralatan dan mesin selama tahun 2013 sebesar Rp.40.500.000,00;
 - 3) Koreksi saldo awal dikarenakan salah entry data (Kepemilikan Departemen/Lembaga Pusat Lainnya) yang mengakibatkan terjadinya koreksi kode kepemilikan terhadap asset tetap peralatan dan mesin selama tahun 2013 sebesar Rp.1.642.520.000,00;
 - 4) Pengurangan peralatan dan mesin selama tahun 2013 sebesar Rp.1.115.600.686,50 merupakan pengurangan yang disebabkan adanya koreksi hapus peralatan dan mesin dikarenakan pencatatan barang pakai habis.
 - 5) Pengurangan peralatan dan mesin selama tahun 2013 sebesar Rp.2.164.514.521,71 merupakan pengurangan yang disebabkan adanya koreksi hapus peralatan dan mesin dikarenakan pencatatan terhadap barang yang sudah dihibahkan
 - 6) Pengurangan peralatan dan mesin selama tahun 2013 sebesar Rp.29.500.712,16 merupakan pengurangan yang disebabkan adanya koreksi hapus peralatan dan mesin dikarenakan adanya bencana/musibah (fisik barang ikut terbakar)
 - 7) Pengurangan peralatan dan mesin selama tahun 2013 sebesar Rp.1.174.680.502,80 merupakan pengurangan yang disebabkan adanya koreksi hapus peralatan dan mesin dikarenakan pencatatan ganda;
 - 8) Pengurangan peralatan dan mesin selama tahun 2013 sebesar Rp.31.949.900,00 merupakan pengurangan yang disebabkan adanya koreksi hapus peralatan dan mesin dikarenakan hilang, TGR dan lain-lain;
 - 9) Pengurangan peralatan dan mesin selama tahun 2013 sebesar Rp.15.163.880,00 merupakan pengurangan yang disebabkan adanya koreksi hapus peralatan dan mesin dikarenakan barang persediaan/ spare part;
 - 10)Reklasifikasi atas aset tetap (kendaraan bermotor) yang hilang dalam TPTGR namun masih tercatat dalam aset tetap sebesar Rp.46.317.521,52.
 - 11) Pengurangan berupa koreksi pembulatan sebesar Rp.0,51

3. Gedung dan Bangunan

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp.2.394.705.500.118,86

Rp.2.021.660.083.968,87

Gedung dan Bangunan sebesar Rp.2.394.705.500.118,86 dan Rp.2.021.660.083.968,87 merupakan nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Gedung dan Bangunan	31 Desember 2013	31 Desember 2012
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.245.192.923.309,12	Rp 1.906.983.950.639,81
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50.466.921.289,95	Rp 37.113.774.778,10
3	Bangunan Menara	1.142.459.346,58	Rp 1.142.459.346,58
4	Bangunan bersejarah	677.795.477,00	Rp 670.447.477,00
5	Tugu peringatan /Prasasti	8.930.311.151,00	Rp 8.995.151.151,00
6	Tugu peringatan	316.282.522,40	Rp 316.282.522,40
7	Tugu Titik Kontrol/Pasti/Tanda Batas	22.251.216.289,62	Rp 18.050.777.314,62
8	Rambu-rambu	32.857.111.404,66	Rp 23.972.700.174,83
9	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	3.897.862.006,70	Rp 3.105.921.806,70
10	Sarana Prasarana Taman	27.378.476.337,29	Rp 20.159.462.155,29
12	Sarana Prasarana Pemakaman	1.594.140.984,54	Rp 1.149.156.602,54
Jumlah Gedung dan Bangunan		Rp 2.394.705.500.118,86	Rp 2.021.660.083.968,87

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal per 1 Januari 2013	Rp 2.021.660.083.968,87
2	Penambahan Tahun 2013	Rp 518.608.977.181,48
3	Pengurangan Tahun 2013	Rp (145.563.561.031,49)
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2013	Rp 2.394.705.500.118,86

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2013 sebesar Rp.518.608.977.181,48 berasal dari:

- Pengadaan tahun 2013 sebesar Rp.317.817.903.754,38 (**lampiran 11**) diperoleh dari :
 1. Belanja modal gedung dan bangunan tahun 2013 dialokasikan sebesar Rp.372.679.990.044,33 namun setelah melalui proses verifikasi dari

Bendahara barang SKPD dan Bagian Perlengkapan yang bisa diklasifikasikan menjadi asset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp.298.159.216.228,73, sedangkan sisa belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp.74.520.773.815,6 diklasifikasikan menjadi asset tetap selain gedung dan bangunan sebesar Rp.70.719.644.585,60 dan non asset tetap sebesar Rp.3.801.129.230,00.

2. Belanja modal selain gedung dan bangunan yang diklasifikasikan menjadi asset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp.17.601.693.129,59.
 3. Belanja barang dan jasa yang diklasifikasikan menjadi asset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp.2.056.993.905,00.
 4. Penambahan berupa koreksi pembulatan Rp.491,06
- Mutasi KDP tahun 2012 yang menjadi asset tetap berupa gedung dan bangunan sebesar Rp.40.873.401.047,15
 - Penyerahan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial perumahan palm spring regency dikelurahan Jambangan kecamatan Jambangan dari PT. Soid Gold Prima berdasarkan BAST 660.5866/436.7.1/2012 – 015/SGP/EKS/XI/2012 berupa lapangan tennis dan bangunan penunjang sebesar Rp.269.730.000,00;
 - Hibah dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk berupa bangunan taman nginden intan sebesar Rp.281.917.000,00;
 - Penyelesaian atas KDP tahun 2012 berupa gedung dan bangunan sebesar Rp.6.930.815.387,65.
 - Penambahan aset tetap gedung dan bangunan yang belum tercatat dalam buku inventaris selama tahun 2013 sebesar Rp.172.800.000,00
 - Pemutakhiran nilai gedung dan bangunan yang mengakibatkan terjadinya koreksi nilai tambah terhadap asset tetap sebesar Rp.7.871.528.333,00.
 - Penambahan asset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp.144.283.779.659,30 diperoleh dari koreksi nilai tambah yang disebabkan adanya kegiatan kapitalisasi pada asset tetap gedung dan bangunan.

- Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp.107.102.000,00 dikarenakan reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2013 sebesar Rp.145.563.561.031,49 terdiri atas :

1. Adanya penghapusan asset Gedung dan Bangunan selama tahun 2013 berdasarkan Kep. Walikota Surabaya Nomor 188.45/264/436.1.2/2013;188.45/252/436.1.2/2013;188.45/75/436.1.2/2013; sebesar Rp.592.780.115,00;
2. Pengurangan asset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp.579.039.474,00 dikarenakan adanya pemutakhiran nilai gedung dan bangunan berdasarkan Laporan hasil penilaian publik no. 256.2/02/ASP/2013 nota dinas no. 028/2566/436.3.2/2013;
3. Adanya penghapusan sebagian gedung dan bangunan berdasarkan kep. Walikota nomor. 188.45/75/436.1.2/2013 sebesar Rp.2.833.768.306,70;
4. Pengurangan gedung dan bangunan selama tahun 2013 sebesar Rp.138.502.134.192,79 adalah pengurangan yang disebabkan adanya koreksi hapus gedung dan bangunan dikarenakan pencatatan ganda.
5. Pengurangan Gedung dan Bangunan selama tahun 2013 sebesar Rp.3.055.838.943,00 dikarenakan reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan menjadi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan.

4. Jalan, Jaringan dan Instalasi	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp.2.774.347.096.373,03	Rp.2.379.557.319.282,78

Jalan, Jaringan, dan Instalasi sebesar Rp.2.774.347.096.373,03 dan Rp.2.379.557.319.282,78 merupakan nilai jalan, jaringan dan instalasi per 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jalan, Jaringan dan Instalasi	31 Desember 2013	31 Desember 2012
1	Jalan	1.299.043.546.828,81	Rp 1.140.103.274.226,51
2	Jembatan	197.518.928.215,30	Rp 174.678.759.147,29
3	Bangunan Air Irigasi	88.615.135.385,00	Rp 88.477.822.847,00
4	Bangunan Air Pasang Surut	45.249.000.528,00	Rp 45.237.033.628,00
5	Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder	12.304.544.061,10	Rp 12.304.544.061,10
6	Bangunan Air Pengaman Sungai dan Penanggulangan bencana alam	774.862.209.128,75	Rp 595.635.542.831,80
7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	5.385.143.557,30	Rp 5.332.359.735,30
8	Bangunan Air Bersih /Air Baku	6.516.075.184,56	Rp 4.338.561.411,56
9	Bangunan Air Kotor	41.406.794.602,70	Rp 41.476.856.020,70
10	Bangunan Air Laut	637.242.332,95	Rp 637.242.332,95
11	Instalasi Air Minum /Air Bersih	18.065.040.057,00	Rp 14.413.575.985,00
12	Instalasi Air Kotor	8.680.313.132,20	Rp 8.594.610.647,20
13	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	13.980.987.208,00	Rp 13.980.987.208,00
14	Instalasi Pembangkit Listrik	1.399.660.565,00	Rp 1.017.968.011,00
15	Instalasi Gardu Listrik	3.857.056.738,60	Rp 3.509.025.198,60
16	Instalasi Gas	1.646.611.186,50	Rp 1.646.611.186,50
17	Instalasi Pengaman	31.380.000,00	Rp 31.380.000,00
18	Jaringan Air Minum	5.691.123.329,00	Rp 5.377.540.476,00
19	Jaringan Listrik	248.034.250.410,86	Rp 221.341.570.406,87
20	Jaringan Telepon	61.789.001,00	Rp 61.789.001,00
21	Jaringan Gas	1.360.264.920,40	Rp 1.360.264.920,40
Jumlah Jalan, Jaringan dan Instalasi		Rp 2.774.347.096.373,03	Rp 2.379.557.319.282,78

Sumber data : Bagian Perlengkapan Kota Surabaya, diolah

Mutasi Jalan, Jaringan, dan Instalasi tahun 2013 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal per 1 Januari 2013	Rp 2.379.557.319.282,78
2	Penambahan Tahun 2013	Rp 402.392.020.615,25
3	Pengurangan Tahun 2013	Rp (7.602.243.525,00)
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2013	Rp 2.774.347.096.373,03

Sumber data : Bagian Perlengkapan Kota Surabaya, diolah

Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Instalasi selama tahun 2013 sebesar Rp.402.392.020.615,25 berasal dari:

- Pengadaan tahun 2013 sebesar Rp.364.514.427.449,95 (**lampiran 12**) diperoleh dari :

1. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2013 dialokasikan sebesar Rp.464.140.371.614,73 namun setelah melalui proses verifikasi antara Bendahara barang SKPD dengan Bagian Perlengkapan yang bisa diklasifikasikan menjadi aset tetap Jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp.363.634.086.236,95 sedangkan sisa belanja modal sebesar Rp.100.506.285.357,78 merupakan belanja modal yang menjadi aset tetap selain Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.100.506.285.357,78.
 2. Belanja modal selain belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi yang setelah melalui proses verifikasi antara Bendahara barang SKPD dengan Bagian Perlengkapan menjadi aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp.880.341.213,00.
- Mutasi KDP tahun 2012 berupa jalan, jembatan dan saluran sebesar Rp.22.059.300.191,36;
 - Penyerahan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial perumahan palm spring regency dikelurahan Jambangan kecamatan Jambangan dari PT. Soid Gold Prima berdasarkan BAST 660.5866/436.7.1/2012 – 015/SGP/EKS/XI/2012 berupa jalan, saluran, jembatan dan PJU sebesar Rp.1.510.500.000,00;
 - Penyelesaian atas KDP tahun 2012 berupa aset tetap jalan, saluran sebesar Rp.6.886.567.887,64.
 - Penambahan aset tetap jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp.5.069.470.817,30 diperoleh dari koreksi nilai tambah yang disebabkan adanya kegiatan kapitalisasi.
 - Penambahan Aset Tetap Jalan, Instalasi dan Jaringan sebesar Rp.2.351.754.269,00 merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah menjadi Aset Tetap Jalan, Instalasi dan Jaringan.

Pengurangan jalan instalasi dan jaringan tahun 2013 sebesar Rp.7.602.243.525,00 terdiri :

1. Pengurangan jalan instalasi dan jaringan selama tahun 2013 sebesar Rp.5.470.160.417,00 merupakan pengurangan yang disebabkan adanya koreksi hapus jalan irigasi dan jaringan dikarenakan kegiatan kapitalisasi.

2. Pengurangan jalan instalasi dan jaringan selama tahun 2013 sebesar Rp.38.132.400,00 merupakan pengurangan yang disebabkan adanya koreksi hapus jalan instalasi dan jaringan dikarenakan salah entry (biaya pemeliharaan).
3. Pengurangan jalan, instalasi dan jaringan selama tahun 2013 sebesar Rp.2.093.950.708,00 merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap jalan, instalasi dan jaringan menjadi Aset Tetap konstruksi dalam pengerjaan.

Biaya Pengawasan dan Perencanaan atas Aset Tetap- Jalan, Jaringan dan Instalasi pada Dinas PU Bina Marga dan Pematuan (DPUBMP) belum diatribusikan secara proporsional ke dalam masing-masing Aset Tetap sesuai paket pekerjaannya. Untuk selanjutnya akan dilakukan identifikasi dan koreksi kedalam Aset Tetap terkait dengan memperhatikan jenis pekerjaan dan status penyelesaian pekerjaannya.

5. Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp.48.740.161.128,84	Rp.46.519.609.130,27

Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.48.740.161.128,84 dan Rp.46.519.609.130,27 merupakan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2013	31 Desember 2012
1.	Buku	Rp 40.743.256.858,10	Rp 39.997.710.223,76
2.	Terbitan Berkala	Rp 234.245.658,00	Rp 232.095.658,00
3.	Barang-barang Perpustakaan	Rp 838.933.189,00	Rp 836.214.689,00
4.	Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	Rp 5.066.516.905,83	Rp 3.214.624.905,83
5.	Alat Olahraga Lainnya	Rp 733.410.976,96	Rp 372.968.476,96
6.	Hewan dan Ternak	Rp 32.528.276,15	Rp 32.528.276,15
7.	Tanaman	Rp 1.091.269.264,80	Rp 1.091.269.264,80
8.	Aset tetap lainnya berasal dr Dana BOS	Rp -	Rp 742.197.635,78
Jumlah Aset Tetap Lainnya		Rp 48.740.161.128,84	Rp 46.519.609.130,28

Mutasi Aset Tetap Lainnya tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal per 1 Januari 2013	Rp 46.519.609.130,28
2	Penambahan Tahun 2013	Rp 2.246.470.299,95
3	Pengurangan Tahun 2013	Rp (25.918.301,39)
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2013	Rp 48.740.161.128,84

Penambahan Aset Tetap Lainnya selama tahun 2013 sebesar Rp.2.246.470.299,95 merupakan :

- Pengadaan/pembelian selama tahun 2013 sebesar Rp.2.246.470.299,95 (**lampiran 13**) diperoleh dari :
 - b. Belanja modal aset tetap lainnya Tahun 2013 dialokasikan Rp.449.432.800,00 namun setelah melalui proses verifikasi antara Bendahara barang SKPD dengan Bagian Perlengkapan yang bisa diklasifikasikan menjadi aset tetap lainnya sebesar Rp.391.072.300,00 sedangkan sisa belanja modal sebesar Rp.58.360.500,00 menjadi aset tetap selain aset tetap lainnya.
 - c. Belanja modal selain Aset Tetap Lainnya yang setelah proses verifikasi antara Bendahara barang SKPD dengan Bagian Perlengkapan yang bisa menjadi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.1.315.875.500,00.
 - d. Belanja barang dan jasa yang diklasifikasikan menjadi aset tetap lainnya sebesar Rp.539.522.500,00.
 - e. Pengurangan karena adanya koreksi pembulatan sebesar Rp.0,05.

Pengurangan Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2013 sebesar Rp.25.918.301,39 terdiri dari :

- a. Pengurangan aset tetap lainnya selama tahun 2013 dikarenakan adanya penghapusan berdasarkan Kep. Walikota Surabaya Nomor 188.45/70/436.1.2/2013, 188.45/313/4361.2/2013, sebesar Rp.7.950.001,00.
- b. Pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp.17.968.300,39 merupakan penghapusan dari pencatatan sehubungan adanya bencana/musibah kebakaran yang mengakibatkan musnahnya aset tetap.

6. Konstruksi dalam	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Pengerjaan	Rp.161.959.038.059,38	Rp.78.467.798.615,41

Mutasi Konstruksi dalam pengerjaan tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal per 1 Januari 2013	Rp 78.467.798.615,11
2	Penambahan Tahun 2013	Rp 146.934.693.164,78
3	Pengurangan Tahun 2013	Rp (63.443.453.720,51)
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2013	Rp 161.959.038.059,38

- Penambahan konstruksi dalam pengerjaan selama tahun 2013 sebesar Rp.141.784.903.513,78 terdiri dari :
 - a. Pengadaan/pembelian selama tahun 2013 sebesar Rp.140.803.346.372,78 diperoleh dari pelaksanaan pekerjaan yang pengerjaannya per 31 Desember 2013 dan 2012 belum selesai dan belum siap dipakai.
 - b. Penambahan Konstruksi dalam pengerjaan yang belum tercatat dalam buku inventaris selama tahun 2013 sebesar Rp.981.557.141,00.
 - c. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp.2.093.950.708,00 merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Instalasi dan Jaringan menjadi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan.
 - d. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp.3.055.838.943,00 merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan menjadi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- Pengurangan Konstruksi dalam pengerjaan selama tahun 2013 sebesar Rp.63.443.453.720,51 dikarenakan adanya pelaksanaan pekerjaan terhadap KDP yang pengerjaannya per 31 Desember 2013 sudah selesai dan siap dipakai.

Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan terdapat dalam **Lampiran 14**.

Saldo Aset Tetap - KDP masih mencatat Biaya Pengawasan dan Perencanaan atas Aset Tetap- Jalan, Irigasi dan Instalasi pada DPUBMP secara global dan belum memperhatikan status penyelesaian pekerjaannya. Biaya Pengawasan dan Perencanaan tersebut belum diatribusikan secara proporsional kedalam masing-

masing Aset Tetap sesuai paket kegiatannya. Untuk selanjutnya akan dilakukan validasi dan dikoreksi kedalam Aset Tetap terkait.

	31 Desember 2013	31 Desember 2012
D. ASET LAINNYA	Rp.1.321.195.445.058,60	Rp.239.927.886.463,81

Aset lainnya tahun 2013 sebesar Rp.1.321.195.445.058,60 dan tahun 2012 sebesar Rp.239.927.886.463,81 mengalami penurunan sebesar 4,51%.

Berikut adalah saldo aset lain-lain per 31 Desember 2013 dan 2012 yang terdiri dari :

a. Tagihan Tuntutan	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Ganti Kerugian Daerah (TPTGR)	Rp.87.906.000,00	Rp.64.164.000,00

Mutasi Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR) tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal per 1 Januari 2013	Rp 64.164.000,00
2	Penambahan Tahun 2013	Rp 94.600.000,00
3	Pengurangan Tahun 2013	Rp (70.858.000,00)
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2013	Rp 87.906.000,00

Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR) Sebesar Rp.87.906.000,00 terdiri atas :

No.	NAMA	SISA CICILAN (Rp)
1.	Drs. M I	Rp 25.000.000,00
2.	M P	Rp 11.656.000,00
3.	W H	Rp 31.250.000,00
4.	YKDC	Rp 20.000.000,00
JUMLAH		Rp 87.906.000,00

b. Aset dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp.186.112.082.293,02	Rp.186.112.082.293,02

Aset dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2013 dan 2012 sebesar Rp.186.112.082.293,02 dan Rp.186.112.082.293,02 terdiri dari :

No.	Aset dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2013	31 Desember 2012
1.	Bangun, Kelola, Serah (BKS)	Rp 147.779.494.793,02	Rp 147.779.494.793,02
2.	Bangun, Serah, Kelola (BSK)	Rp 4.969.192.500,00	Rp 4.969.192.500,00
3.	Kerjasama Operasi (KSO)	Rp 33.363.395.000,00	Rp 33.363.395.000,00
Jumlah Aset dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga		Rp 186.112.082.293,02	Rp 186.112.082.293,02

▪ Bangun, Kelola, Serah (BKS)	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp.147.779.494.793,02	Rp.147.779.494.793,02

Bangun, Kelola, Serah (BKS) per 31 Desember 2013 dan 2012 sebesar Rp.147.779.494.793,02 dan Rp.147.779.494.793,02 dapat dirinci sebagai berikut :

No.	URAIAN	2013	2012
1.	Tempat Usaha Jl. Kusuma bangsa No. 116 Surabaya Perjan-jian No. 511.3/953/ 402.1.02/1989 tanggal 7 April 1989 dengan PT Sasana Boga Berlaku 30 tahun sejak pembangunan selesai Seluruh BKS didanai dari pihak ketiga	Rp 13.490.000.000,00	Rp 13.490.000.000,00
2.	Pembangunan dan pe-ngelolaan Pasar Turi (Jl. Pasar Turi 21). Sesuai perjanjian kerja-sama tanggal 9 Maret 2010 Nomor 180/1096/ 436.1.2/2010 dengan PT. Gala Bumi Per-kasa. Berlaku 25 tahun sejak penyerahan obyek berupa tanah. Seluruh BKS didanai dari pihak ketiga. Dari aset tanah seluas 43.800 m2 senilai Rp.121.720.200.000, yang merupakan milik Pemerintah Kota Sura-baya adalah 27.519 m2 bila dinilai secara proporsional sebesar Rp.76.475.301.000,00.	Rp 76.475.301.000,00	Rp 76.475.301.000,00
3.	Perjanjian Kerjasama Nomor 658.1/4347/ 436.6.5/2012 dan Nomor 88/JBU-SO/8/ 2012 tanggal 8 Agustus 2012 dalam hal kerjasama penyediaan Prasarana dan Sarana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo dengan PT. Sumber Organik dengan jangka waktu 20 Tahun.	Rp 57.814.193.793,02	Rp 57.814.193.793,02
Jumlah		Rp 147.779.494.793,02	Rp 147.779.494.793,02

▪ **Bangun, Serah,
Kelola(BSK)**

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp.4.969.192.500,00

Rp.4.969.192.500,00

Bangun, Serah, Kelola (BSK) per 31 Desember 2013 sebesar Rp.4.969.192.500,00 merupakan tanah Pemkot Surabaya yang disertakan dalam kerjasama pembangunan Rumah Susun di Lokasi Warugunung Kecamatan Karangpilang, sesuai perjanjian dengan Perum Perumnas Nomor 648.21.1412.1/402.601/97 dan Nomor Dirut/507/22/V/97 tanggal 9 Mei 1997 dan berakhir sampai dengan Pemerintah Kota Surabaya menyelesaikan pengembalian investasi tersebut. Dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Bangunan merupakan milik Perum Perumnas sampai dengan Pemerintah Kota Surabaya menyelesaikan pengembalian investasi tersebut. Pengembalian biaya investasi yang telah dibayar Pemerintah Kota

Surabaya kepada Perum Perumnas hingga Desember 2013 sebesar Rp.1.131.803.832,00.

▪ Kerjasama Operasi (KSO)	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp.33.363.395.000,00	Rp.33.363.395.000,00

Kerjasama Operasi (KSO) per 31 Desember 2013 sebesar Rp.33.363.395.000,00 merupakan Pembangunan Instalasi Pembakaran Sampah (Incenerator), perjanjian dengan PT.Unicomindo Perdana Nomor 658.1/11/402.1.02/ 1989 tanggal 26 Juli 1989 yang berlaku selama 9 tahun, sebagaimana telah diadendum dengan kontrak Nomor 658.1/11/402.1.01/1989 tanggal 16 Nopember 1989 yang berlaku selama 8 tahun. Saat ini Incenerator tersebut dalam kondisi rusak dan sudah tidak difungsikan serta belum ada penyelesaian pembayaran selisih kurs, angsuran pokok serta beban biaya operasional dan pemeliharaan antara PT.Unicomindo dengan Pemerintah Kota Surabaya.

3. Aset Tak Berwujud	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp.5.981.739.200,87	Rp.5.019.695.615,20

Aset Tak Berwujud senilai Rp.5.981.739.200,87 dan Rp.5.019.695.615,20 merupakan nilai aset tak berwujud per 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Aset Tak Berwujud	2013	2012
1.	Perangkat Lunak/software	Rp 5.223.894.802,47	Rp 4.474.571.453,80
2.	Hak Cipta/Paten/Lisensi	Rp 757.844.398,40	Rp 545.124.161,40
Jumlah Aset Tak Berwujud		Rp 5.981.739.200,87	Rp 5.019.695.615,20

Mutasi Aset Tak Berwujud tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah	
1	Saldo Awal per 1 Januari 2013	Rp	5.019.695.615,20
2	Penambahan Tahun 2013	Rp	962.043.585,67
3	Pengurangan Tahun 2013	Rp	-
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2013	Rp	5.981.739.200,87

Penambahan Aset Tak Berwujud tahun 2013 sebesar Rp.962.043.586,67 (**lampiran 15**) berasal dari:

- Belanja modal asset tetap lainnya yang bisa diklasifikasikan menjadi asset tetap lainnya sebesar Rp.897.976.920,00.
- Belanja modal selain Aset Tak Berwujud setelah proses verifikasi antara Bendahara barang SKPD dengan Bagian Perlengkapan yang bisa menjadi Aset Tak Berwujud sebesar Rp.64.066.666,67.
- Pengurangan berupa koreksi pembulatan sebesar Rp.1,00.

4. Aset Lain-lain	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp.1.129.013.717.564,71	Rp.48.731.944.555,59

Aset lain – lain per 31 Desember 2013 dan 2012 mempunyai saldo sebesar Rp.1.129.013.717.564,71 dan Rp.48.731.944.555,59 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Aset Lain-Lain	31 Desember 2013	31 Desember 2012
1.	Piutang Banpol Bakesbang Linmas	Rp 660.000.000,00	Rp 660.000.000,00
2.	Inventaris yang akan dihapus – Bagian Perlengkapan	Rp 1.098.264.369.619,71	Rp 997.718.404,00
3.	Pembayaran dana bergulir – Dinas Koperasi	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00
4.	Penyertaan Modal PDAM	Rp 30.085.347.945,00	Rp 30.085.347.945,00
5.	Belanja dibayar dimuka	Rp -	Rp 16.984.878.206,59
Jumlah Aset Lain-lain		Rp 1.129.013.717.564,71	Rp 48.731.944.555,59

- Aset lain-lain berupa piutang Banpol dari Bakesbang Linmas sebesar Rp.645.000.000,00 yang disita dan menjadi barang bukti di Kejaksaan Negeri Surabaya sesuai surat No.24/O.5.10.4/Fd.1/05/2007 tanggal 9 Mei 2007 sebesar

Rp.445.000.000,00 dan dua penyetoran tanggal 10 Juli 2007 dengan total sebesar Rp.200.000.000,00. Dan berdasar hasil konfirmasi BPK RI ke Kejaksaan Negeri Surabaya, terdapat pengembalian yang disetor langsung ke Kejaksaan Negeri Surabaya sebesar Rp.15.000.000,00.

- Inventaris yang akan dihapuskan sebesar Rp.1.098.264.369.619,71, berupa peralatan dan perlengkapan sekolah yang telah dihibahkan kepada sekolah swasta yang penyerahan fisiknya pada tahun 2008 namun baru dilakukan proses usulan penghapusan TA 2012.
- Saldo sebesar Rp.4.000.000,00 dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan pembayaran bantuan modal dana bergulir yang salah masuk rekening Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur.
- Aset lain-lain sebesar Rp.30.085.347.945,00 merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap Pemerintah Kota Surabaya untuk penyertaan modal kepada PDAM, tetapi karena Perda untuk penyertaan modal masih dalam proses penyusunan maka dicatat dalam Aset Lainnya.
- Aset lain-lain berupa Belanja di bayar dimuka sebesar Rp.16.984.878.206,59 telah direklasifikasi dalam asset tetap kecuali sebesar Rp.2.096.682.318,61 kembali ke Kasda karena 2 lokasi tidak dapat menyelesaikan yaitu untuk lokasi Pembangunan SDN Klampis Ngasem I/246, IV/560 dan Pembangunan SMPN 24 (Dinas Cipta karya dan Tata Ruang) masuk dalam klasifikasi Konstruksi dalam pengerjaan.

Per 31 Desember 2013 terjadi peningkatan nilai aset lainnya - aset lain-lain dibandingkan nilai per 31 Desember 2012, hal tersebut disebabkan kesalahan pencatatan nilai dan pencatatan ganda aset tanah sebesar Rp 1.097.220.333.694,17. Sesuai BAST nomor 0502/011.3/402.6.01/1997 tanggal 10 Maret 1997 PT. Darmo Satellite Town menyerahkan tanah fasum/fasos seluas 590.934,20m² dimana DPBT mencatat tanah tersebut sebagai tanah kampung seluas 1.499.200m² dalam empat register senilai Rp162.524.500.000,00 sehingga terdapat kelebihan pencatatan aset tetap sebesar Rp98.462.810.173,49. Pemerintah Kota Surabaya melakukan pencatatan ganda atas aset tanah yang disajikan DPBT dengan aset tanah tanah jalan,

tanah lapangan, tanah taman, dan tanah puskesmas yang dicatat SKPD lain dengan nilai keseluruhan sebesar Rp890.258.293.360,69. Selain itu Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan pencatatan ganda atas aset tanah yang memiliki luasan dan alamat sama pada dua register yang berbeda dengan nilai keseluruhan sebesar Rp98.664.911.860,00. Atas permasalahan tersebut aset tetap tanah yang telah teridentifikasi terdapat kesalahan pencatatan direklasifikasi ke Aset Lainnya - aset lain-lain untuk selanjutnya dilakukan verifikasi ulang sebelum dilakukan penghapusan.

II. KEWAJIBAN	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp.100.412.621.185,86	Rp.71.947.416.278,83

Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban jangka pendek (Kewajiban lancar) dan Kewajiban jangka panjang .

Kewajiban tahun 2013 sebesar Rp.100.412.621.185,86 dan tahun 2012 sebesar 71.947.416.278,83 mengalami kenaikan sebesar 39,56%.

Pemerintah Kota Surabaya Per 31 Desember 2013 mempunyai kewajiban sebesar Rp.100.412.621.185,86.

A. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp.100.412.621.185,86	Rp.71.947.416.278,83

Kewajiban jangka pendek secara komparatif rinciannya adalah sebagai berikut:

No.	Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2013	31 Desember 2012
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	Rp 36.371.110.733,76	Rp 30.522.494.216,00
2.	Utang Bunga	-	-
3.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
4.	Utang Jangka Pendek lainnya	Rp 64.041.510.452,10	Rp 41.424.922.062,83
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		Rp 100.412.621.185,86	Rp 71.947.416.278,83

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp.36.371.110.733,76	Rp.30.522.494.216,00

Jumlah Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) tersebut di atas dirinci sebagai berikut :

No.	Utang PFK	31 Desember 2013	31 Desember 2012
1.	Titipan Pihak Ketiga	Rp 36.371.110.733,76	Rp 30.522.494.216,00
2.	Utang pajak di Bendahara Pengeluaran SKPD	Rp -	Rp -
Jumlah Utang PFK		Rp 36.371.110.733,76	Rp 30.522.494.216,00

Titipan Fihak Ketiga di BUD sebesar **Rp.36.371.110.733,76** terdiri dari :

NO.	Titipan Fihak ketiga	SALDO PER 31 Desember 2013 (Rp)
1	Bongkar reklame	31.934.612.256,00
2	Rusun Waru Gunung	4.170.995,00
3	Partisipasi pengelolaan kebun bibit	160.000.000,00
4	Pelepasan tanah Jalan Kenari	4.231.318.000,00
5	PFK Gaji PNSD Tahun 2013	31.543.582,76
6	Tunjangan beras yang belum diserahkan pada pegawai (kecamatan semampir)	4.529.100,00
7	Tunjangan beras yang belum diserahkan pada pegawai (kecamatan tegalsari)	4.936.800,00
Jumlah Titipan Fihak Ketiga		36.371.110.733,76

-Bongkar reklame sebesar Rp.31.934.612.256,00 merupakan jaminan biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang perhitungan nilai sewa reklame, tahun 2013 terdapat penambahan titipan bongkar reklame sebesar Rp.5.829.439.000,00.

- Rusun Waru Gunung sebesar Rp.4.170.995,00 merupakan titipan pembayaran penghuni rusun di lokasi Waru Gunung sesuai perjanjian dengan Perum Perumnas No.648.21.1412.1/402.601/97 dan No. Dirut/507/22/V/97 tanggal 9 Mei 1997.
- Partisipasi pengelolaan kebun bibit sebesar Rp.160.000.000,00 berdasarkan perjanjian Nomor 593/19/402.1.04/98 tanggal 17 Pebruari 1998 antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Surya Inti Permata. Atas partisipasi pengelolaan kebun bibit terdapat sengketa gugatan perdata yang diajukan oleh PT. Surya Inti Permata sebagai Penggugat melawan Pemerintah Kota Surabaya sebagai Tergugat I dan PT. Floraya Indah Sentosa sebagai Tergugat II, saat ini pada tingkat peninjauan kembali.
- Pelepasan tanah Jalan Kenari Rp.4.231.318.000,00 merupakan penyetoran uang titipan atas pelepasan ganti rugi tanah di jalan kenari oleh PT. Sentral Tunjungan Perkasa Surabaya.
- PFK Gaji PNSD tahun 2013 yang terdiri dari Iuran Wajib Pegawai, Tapperum, dan ASKES, yang masih belum bisa tersetor ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I sebesar Rp.31.543.582,76.
- Tunjangan beras pegawai yang belum diserahkan pada kecamatan semampir sebesar Rp.4.529.100,00.
- Tunjangan beras pegawai yang belum diserahkan pada kecamatan tegalsari sebesar Rp.4.936.800,00.

2. Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp.64.041.510.452,10	Rp.41.424.922.062,83

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 sebesar Rp.64.041.510.452,10 dan Rp.41.424.922.062,83 terdiri dari :

No.	Utang Jangka Pendek Lainnya	2013	2012
1.	Utang Kepada Pihak Ketiga	Rp 35.935.259.035,97	Rp 15.277.709.539,25
2.	Utang Pemerintah Pusat Inpres No 15/ 1979	Rp 8.707.541,55	Rp 10.238.900,00
3.	Kewajiban utang pokok termijn 15 dan 16 yang belum dibayar sesuai Surat dari PT Unicomindo Nomor : 641/UP/I/2004 tanggal 5 Januari 2004	Rp 3.336.339.500,00	Rp 3.336.339.500,00
4.	Kewajiban akibat beda kurs atas pembayaran termijn 13, 14, 15 dan 16	Rp 15.769.789.528,00	Rp 15.769.789.528,00
5.	Bagi hasil retribusi terminal Purabaya bag Kab Sidoarjo	Rp 1.697.149.260,00	Rp 5.088.082.959,00
6.	Utang pembayaran pengolahan sampah TPA Benowo kepada PT. Sumber Organik – DKP	Rp 6.067.911.150,00	Rp 716.407.200,00
7.	Utang biaya prepayment premium atas percepatan pembayaran pinjaman Pemerintah Kota Surabaya.	Rp 1.226.354.436,58	Rp 1.226.354.436,58
Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya		Rp 64.041.510.452,10	Rp 41.424.922.062,83

Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp.35.935.259.035,97 merupakan utang yang timbul sebagai akibat adanya belanja dengan pihak ketiga yang sampai dengan 31 Desember 2013 belum dibayar oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Mutasi Utang Kepada Pihak Ketiga selama tahun 2013 adalah sebagai berikut :

No.	Mutasi Utang Pihak Ketiga	Jumlah
1	Saldo Awal per 1 Januari 2013	Rp 15.277.709.539,25
2	Penambahan Tahun 2013	Rp 439.221.685.535,93
3	Pengurangan Tahun 2013	Rp (418.564.136.039,21)
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2013	Rp 35.935.259.035,97

Utang kepada Pihak Ketiga tersebut terdiri dari :

No.	Utang Pihak Ketiga	31 Desember 2013	31 Desember 2012
1.	Utang Belanja atas tambahan penghasilan dan tunjangan profesi guru (Dinas Pendidikan)	Rp -	Rp 6.142.896.612,00
2.	Utang Belanja atas pekerjaan yang belum diselesaikan pembayarannya (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang)	Rp 3.917.347.930,00	Rp 910.869.327,00
3.	Utang pembelian obat dan alat kesehatan (RSUD dr Soewandhie)	Rp 1.198.121.581,00	Rp 40.260.480,00
4.	Utang pelayanan jamkesmas dan askes (RSUD dr Soewandhie)	Rp 4.955.128.945,97	Rp 2.101.352.173,25
5.	Utang klaim jamkesmas non kuota (Dinas Kesehatan)	Rp 24.781.547.700,00	Rp 5.614.421.200,00
6.	Utang klaim jamkesda propinsi (Dinas Kesehatan)	Rp 1.083.112.879,00	Rp 467.909.747,00
Jumlah Utang Pihak Ketiga		Rp 35.935.259.035,97	Rp 15.277.709.539,25

Mutasi Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No.	Utang Pihak Ketiga	Saldo Awal 01/01/2013	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31/12/2013
1.	Utang Belanja atas Tambahan Penghasilan dan Tunjangan Profesi Guru (Dinas Pendidikan)	6.142.896.612,00	342.719.375.640,00	348.862.272.252,00	0,00
2.	Utang Belanja atas pekerjaan yang belum diselesaikan (Cipta Karya)	910.869.327,00	3.006.478.603,00	0	3.917.347.930,00
3.	Utang pembelian obat dan alat kesehatan (RSUD dr Soewandhie)	40.260.480,00	33.583.047.063,00	32.425.185.962,00	1.198.121.581,00
4.	Utang pelayanan jamkesmas dan askes (RSUD dr Soewandhie)	2.101.352.173,25	34.048.123.650,93	31.194.346.878,21	4.955.128.945,97
5.	Utang klaim jamkesmas non kuota (Dinas Kesehatan)	5.614.421.200,00	24.781.547.700,00	5.614.421.200,00	24.781.547.700,00
6.	Utang klaim jamkesda propinsi (Dinas Kesehatan)	467.909.747,00	1.083.112.879,00	467.909.747,00	1.083.112.879,00
Jumlah Utang Pihak Ketiga		15.277.709.539,25	439.221.685.535,93	418.564.136.039,21	35.935.259.035,97

Utang Kepada Pihak Ketiga selama tahun 2013 sebesar Rp.35.935.259.035,97, dengan perincian sebagai berikut :

- Utang belanja atas pekerjaan yang belum diselesaikan pembayarannya sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp.3.917.347.930,00 terdiri atas :

No	Utang Belanja atas Pekerjaan yang Belum diselesaikan	Jumlah
1	PT. Daya Guna Permata	Rp 143.386.035,00
2	PT. Rukun Jaya Madura Group	Rp 147.980.587,00
3	PT. Rukun Jaya Madura Group	Rp 187.473.089,00
4	CV. Endah Elok Energi	Rp 78.667.680,00
5	PT. Royan Jaya	Rp 177.563.153,00
6	PT. Surya Unggul Nusa Cons	Rp 25.261.827,00
7	PT. Surya Unggul Nusa Cons	Rp 16.669.651,00
8	CV. Dinamika Raya	Rp 49.644.705,00
9	CV. Dinamika Raya	Rp 34.589.500,00
10	PT. Delta Buana	Rp 49.633.100,00
11	PT. Mitra Karya Mandiri Jaya	Rp 224.614.881,00
12	PT. Mitra Karya Mandiri Jaya	Rp 265.278.824,00
13	CV. Bintang Jaya	Rp 100.068.219,00
14	CV. Wahyu Nugroho	Rp 786.718.800,00
15	CV. Cipta Karya Wiguna	Rp 12.435.276,00
16	CV. Azita Abadi	Rp 21.522.560,00
17	PT. Designo	Rp 40.802.283,00
18	PT. Aprilian Dwipa Internusa	Rp 1.555.037.760,00
Jumlah Utang Belanja atas Pekerjaan yang Belum diselesaikan		Rp 3.917.347.930,00

- Utang pembelian obat dan alat kesehatan sebesar Rp.1.198.121.581,00 merupakan utang yang timbul sebagai akibat adanya belanja dengan pihak ketiga yang sampai 31 Desember 2013 belum dibayar oleh RSUD dr.M Soewandhie.
- Utang pelayanan jamkesmas dan askes RSUD Soewandhie selama tahun 2013 sebesar Rp.4.955.128.945,97, terdiri dari pelayanan jamkesmas non kuota sebesar Rp.791.299.790,00, pelayanan jamkesmas kuota sebesar Rp.3.524.189.143,37, pelayanan askes In Health PT. KAI sebesar Rp.491.647.568,00, pelayanan jamkesda sebesar Rp.46.378.599,60 dan pelayanan pasien umum sebesar Rp.101.613.845,00.

- Utang klaim jamkesmas non kuota Dinas Kesehatan tahun 2013 dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1.	RSUD dr. Soetomo	Rp 17.503.753.200,00
2.	BKMM	Rp 85.382.100,00
3.	RSIA Yani	Rp 22.109.400,00
4.	Al Irsyad	Rp 607.854.000,00
5.	Darus Syifa	Rp 63.750.600,00
6.	RSI Jemursari	Rp 119.246.200,00
7.	RS Mata Undaan	Rp 135.174.900,00
8.	RS Brawijaya	Rp 69.549.500,00
9.	Karang Tembok / BP 4	Rp 575.154.400,00
10.	Bhakti Rahayu	Rp 18.711.000,00
11.	RS Jiwa Menur	Rp 846.598.500,00
12.	RSU Haji Surabaya	Rp 2.634.450.600,00
13.	RSUD Soewandhie	Rp 1.993.031.000,00
14.	RSJ Lawang	Rp 21.310.200,00
15.	RS UNAIR	Rp 85.472.100,00
	Jumlah	Rp 24.781.547.700,00

- Utang klaim jamkesda propinsi Dinas Kesehatan selama tahun 2013, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1.	RSUD dr. Soetomo	Rp 767.215.093,00
2.	BKMM	Rp 771.751,00
3.	RSJ Menur	Rp 126.344.746,00
4.	RSU Haji	Rp 123.555.663,00
5.	BP4	Rp 15.961.772,00
6.	RSUD Soewandhie	Rp 48.178.742,00
7.	RS Kusta Kediri	Rp 1.085.112,00
	Jumlah	Rp 1.083.112.879,00

Utang Pemerintah Pusat sesuai Inpres No.15/1979 sebesar Rp.8.707.541,55 merupakan utang yang digunakan untuk membangun Pasar Blauran.

Utang Belanja Kepada PT Unicomindo Perdana sebesar Rp.3.336.339.500,00 merupakan kewajiban utang pokok termijn 15 dan 16 yang belum dibayar sesuai Surat dari PT Unicomindo Nomor : 641/UP/I/2004 tanggal 5 Januari 2004 perihal Laporan

Posisi Kewajiban Pemerintah Kota Surabaya dan Perkembangan Keadaan Pabrik Pembakaran Sampah di Sukolilo Surabaya.

Hutang ini timbul sebagai akibat adanya Perjanjian/Kontrak antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. UNICOMINDO PERDANA Nomor 658.1/11/402.1.02/1989 tanggal 26 Juli 1989 tentang Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Manajemen dalam rangka Pembangunan Instalasi Pembakaran Sampah dan telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri sesuai Surat Keputusan Nomor 658.1-676 tanggal 2 September 1989. Terhadap Kontrak diatas telah diadakan Addendum Nomor 658.1/34/402.01.02/1989 tanggal 16 Nopember 1989 jo 658.1/14/402.1.02/94 tanggal 7 Maret 1994.

Pengadilan Negeri Surabaya melalui Putusan Nomor 81/Pdt.6/2011 Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 September 2011 mewajibkan Pemerintah Kota Surabaya untuk membayar kerugian yang diminta oleh PT. UNICOMINDO PERDANA atas kerugian materiil sebesar Rp.4.137.060.980,00, dengan rincian Pembayaran termin 15 dan 16 sebesar Rp.3.336.339.500,00 dan beban bunga (moratorium) sebesar 6% per tahun atas keterlambatan pemenuhan setoran hasil usaha ke 15 dan 16 sebesar Rp.800.721.480,00. Atas putusan PN Surabaya tersebut, Pemerintah Kota Surabaya mengajukan banding, dan sampai dengan tanggal 6 Mei 2012 belum ada keputusan hukum yang berlaku tetap (inkrah) atas hal tersebut.

Kewajiban akibat beda Kurs sebesar Rp.15.769.789.528,00 dihitung berdasarkan kurs Rp.6.250 / US\$ sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 658.1/183/PUMDA tanggal 18 April 2000 tentang kesepakatan mengenai nilai kurs yang digunakan untuk menghitung kewajiban beda kurs atas sisa pembayaran (termijn 13, 14, 15 dan 16) dan Surat dari PT. Unicomindo kepada Pemerintah Kota Surabaya Nomor SP.10.05.01.2000 tanggal 10 Mei 2000, tentang Permohonan Pembayaran Biaya Beda Kurs termijn 13,14, 15 dan 16 Pabrik Pembakaran Sampah di Sukolilo Surabaya.

Pada tanggal 01 November 2011, PT Unicomindo mengajukan gugatan sebesar Rp.133.075.549.248,00 (terdiri dari piutang Rp.137.212.610.228,00 dikurangi Rp.4.137.060.980,00 yang diajukan gugatan dengan Nomor 81/Pdt.G/2011/PN.SBY) kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya atas kewajiban yang belum terpenuhi sekaligus dampak kewajiban yang belum dipenuhi oleh Pemerintah Kota Surabaya,

terdiri dari Setoran Hasil Usaha (SHU) ke 15 dan 16, serta beda kurs termin SHU ke 13, 14, 15 dan 16. Atas gugatan PT. Unicomindo tersebut, sudah ada putusan sela tanggal 10 April 2012, yang isinya antara lain "pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan atas perkara tersebut, karena berdasarkan pertimbangan mejelis hakim penyelesaian melalui panitia arbitrase sebagaimana dalam perjanjian. Sampai dengan tanggal 6 Mei 2012 belum ada kesepakatan dalam bentuk perjanjian lebih lanjut antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Unicomindo untuk pembayaran beda kurs termin 13, 14, 15, 16.

Bagi hasil retribusi Terminal Purabaya bagian Kabupaten Sidoarjo untuk sisa pembayaran hutang bulan Oktober, November, Desember 2008 sampai dengan tahun 2012 telah dilunasi pada tahun 2013 dengan SP2D No.08212/LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 sebesar Rp.4.673.174.229,00 dan SP2D No.18940/LS/2013 tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp.414.908.730,00, sehingga saldo tahun 2013 yang belum terbayar Rp.1.697.149.260 yang merupakan hutang atas bagi hasil tahun 2013.

Utang Biaya Pengolahan Sampah TPA Benowo merupakan utang untuk periode 01-31 Desember 2013 sebesar Rp.6.067.911.150,00. Hal ini dikarenakan adanya Surat Perjanjian Kerjasama Penyediaan Prasarana dan Sarana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo Nomor 658.1/4347/436.6.5/2012 tanggal 08 Agustus 2012 antara 88/JBU-SO/8/2012 Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Sumber Organik, dimana serah terima obyek kerjasama telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima `Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo Nomor 415.4/14583/436.6.5/2012 tanggal 23 017/SO-X/2012 Oktober 2012.

Utang biaya prepayment premium atas percepatan pembayaran pinjaman Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp.1.226.354.436,58, merupakan salah satu komponen kewajiban dalam percepatan pembayaran yang harus dibayar oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Penutupan atas perjanjian penerusan pinjaman No.SLA-764/DP3/1994 tanggal 14 September 1994 akan diproses oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia, setelah

Pemerintah Kota Surabaya melakukan pembayaran biaya prepayment premium dimaksud.

III. EKUITAS DANA	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp.37.350.480.867.071,45	Rp.35.286.876.740.315,97

Saldo Ekuitas Dana per 31 Desember 2013 dan 2012 sebesar Rp.37.350.480.867.071,45 dan Rp.35.286.876.740.315,97 kenaikan sebesar 5,85% yang terdiri dari :

A. Ekuitas Dana Lancar	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp.1.298.428.176.375,25	Rp.1.073.675.575.173,77

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012. Ekuitas dana lancar terdiri dari :

NO.	Ekuitas Dana Lancar	31 Desember 2013	31 Desember 2012
1.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	977.089.154.745,47	805.419.392.938,25
2.	Pendapatan yang Ditangguhkan	182.819.245,00	245.871.790,00
3.	Cadangan Piutang	314.696.480.257,11	254.193.769.655,86
4.	Cadangan Persediaan	70.501.232.579,77	55.241.462.852,49
5.	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	(64.041.510.452,10)	(41.424.922.062,83)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		1.298.428.176.375,25	1.073.675.575.173,77

1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp.977.089.154.745,47	Rp.805.419.392.938,25

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.977.089.154.745,47 berasal dari realisasi Pendapatan sebesar Rp.5.235.293.716.914,17 dikurangi dengan jumlah realisasi Belanja sebesar Rp.5.057.279.664.344,95 ditambah dengan jumlah realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp.799.075.102.176,25.

SILPA milik Pemkot Surabaya sebesar Rp.977.089.154.745,47 terdiri dari:

- a. Kas di Kas Umum Daerah sebesar Rp.941.843.132.367,78, yang berasal dari rekening kas umum daerah sebesar Rp.978.204.777.201,54 dikurangi dengan utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp.36.361.644.833,76.
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran berupa sisa Uang Persediaan sebesar Rp.1.342.218.985,00.
- c. BLUD RSUD dr.M. Soewandhie sebesar Rp.33.903.803.392,69.

2. Pendapatan Yang	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Ditangguhkan	Rp.182.819.245,00	Rp.245.871.790,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Yang Ditangguhkan per 31 Desember 2013 dan 2012 sebesar Rp.182.819.245,00 dan Rp.245.871.790,00. Pendapatan yang ditangguhkan merupakan lawan Akun dari Kas di Bendahara Penerimaan.

3. Cadangan Piutang	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp.314.696.480.257,11	Rp.254.193.769.655,86

Saldo Cadangan Piutang per 31 Desember 2013 sebesar Rp.314.696.480.257,11 merupakan lawan Akun Piutang bersih sebesar Rp.256.597.481.607,34.

4. Cadangan Persediaan	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp.70.501.232.579,77	Rp.55.241.462.852,49

Jumlah tersebut merupakan saldo Cadangan Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 sebesar Rp.70.501.232.579,77 dan Rp.55.241.462.852,49, yang merupakan lawan akun Persediaan.

5. Dana Yang Harus	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Disediakan untuk		
Pembayaran Utang Jangka Pendek	Rp.(64.041.510.452,10)	Rp.(41.424.922.062,83)

Jumlah tersebut merupakan saldo Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 2012 sebesar Rp.(64.041.510.452,10) dan Rp.(41.424.922.062,83). Jumlah ini merupakan lawan dari kewajiban jangka pendek, kecuali Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

B. EKUITAS DANA INVESTASI	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp.36.052.052.690.696,20	Rp.34.213.201.165.142,20

Saldo Ekuitas dana investasi tahun 2013 sebesar Rp.36.052.052.690.696,20 dan 2012 sebesar Rp.34.213.201.165.142,20 mengalami kenaikan sebesar 5,37%.

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2013 dan 2012. Ekuitas Dana Investasi terdiri dari :

No.	Ekuitas Dana Investasi	31 Desember 2013	31 Desember 2012
1.	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	1.826.649.121.407,40	1.697.206.373.389,32
2.	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	32.904.208.124.230,20	32.276.066.905.289,07
3.	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	1.321.195.445.058,60	239.927.886.463,81
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		36.052.052.690.696,20	34.213.201.165.142,20

1. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp.1.826.649.121.407,40	Rp.1.697.206.373.389,32

Jumlah tersebut merupakan saldo Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2013 dan 2012 merupakan lawan akun Investasi jangka panjang. Untuk tahun 2013, Investasi Jangka panjang Non Permanen bersih sebesar Rp.1.725.000,00 dan Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar Rp.1.826.647.396.407,40. Sedangkan untuk tahun 2012, Investasi

Jangka Panjang Non Permanen bersih sebesar Rp.10.750.000,00 dan Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar Rp.1.697.195.623.389,32.

2. Diinvestasikan	31 Desember 2013	31 Desember 2012
dalam Aset	Rp.32.904.208.124.230,20	Rp.32.276.066.905.289,07
Tetap		

Jumlah tersebut merupakan saldo Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012, merupakan lawan Akun Aset Tetap yang terdiri atas Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Jaringan dan Instalasi, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi dalam Pengerjaan dengan perincian sebagai berikut :

No.	ASET TETAP	2013	2012
1	Tanah	25.927.505.754.851,52	26.360.913.183.989,70
2	Peralatan dan Mesin	1.596.950.573.698,57	1.388.948.910.302,04
3	Gedung dan Bangunan	2.394.705.500.118,86	2.021.660.083.968,87
4	Jalan Jaringan dan Instalasi	2.774.347.096.373,03	2.379.557.319.282,78
5	Aset Tetap Lainnya	48.740.161.128,84	46.519.609.130,27
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	161.959.038.059,38	78.467.798.615,41
Jumlah		32.904.208.124.230,20	32.276.066.905.289,07

3. Diinvestasikan dalam	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Aset Lainnya	Rp.1.321.195.445.058,60	Rp. 239.927.886.463,81

Jumlah tersebut merupakan saldo Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012. Jumlah ini merupakan lawan Akun Aset Lainnya terdiri atas Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Negara, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset tak Berwujud dan Aset lain-lain dengan perincian sebagai berikut :

No.	ASET LAINNYA	2013	2012
1	Tuntutan Ganti Kerugian Negara	87.906.000,00	64.164.000,00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	186.112.082.293,02	186.112.082.293,02
3	Aset Tak Berwujud	5.981.739.200,87	5.019.695.615,20
4	Aset Lain - lain	1.129.013.717.564,71	48.731.944.555,59
Jumlah		1.321.195.445.058,60	239.927.886.463,81

Dengan demikian per 31 Desember 2013 Pemerintah Kota Surabaya mempunyai Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana sebesar Rp.37.450.893.488.257,31. Jumlah ini merupakan jumlah dari Kewajiban total Rp.100.412.621.185,86 dan Ekuitas Dana sebesar Rp.37.350.480.867.071,45.

(II). PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surabaya merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar Sumber, Alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Dalam penjelasan LRA ini akan disajikan sesuai dengan Struktur APBD yang meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

I. PENDAPATAN

Sebagaimana yang tertera dalam Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2013 dan 2012 bahwa sasaran pendapatan daerah yang ditetapkan adalah meningkatnya PAD dan penerimaan daerah lainnya. Realisasi Pendapatan pada Tahun anggaran 2013 dan 2012 sebesar Rp.5.235.293.716.914,17 dan Rp.4.634.301.938.653,61 dari target pendapatan tahun 2013 dan 2012 sebesar Rp.5.255.244.153.444,00 dan Rp.4.693.361.549.064,00 atau terealisasi pada tahun 2013 sebesar 99,62% dan pada tahun 2012 terealisasi sebesar 99,62%. Realisasi Pendapatan tersebut meliputi realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana ikhtisar sebagai berikut :

Tabel 5.1
Realisasi Pendapatan 2013

Kode	Uraian	JUMLAH (Rp)			
		Anggaran	Realisasi 2013	Realisasi 2012	%
1	2	3	4	5	7
1	PENDAPATAN	5,255,244,153,444.00	5,235,293,716,914.17	4,634,301,938,653.61	99.62
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,657,109,226,595.00	2,791,580,050,709.51	2,279,613,848,832.61	105.06
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	2,118,292,666,000.00	2,154,652,323,797.88	1,852,977,636,886.55	101.72
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	235,196,801,853.00	229,680,153,171.85	183,482,993,434.78	97.65
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	111,966,678,336.00	111,967,697,968.77	97,696,057,372.81	100.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	191,653,080,406.00	295,279,875,771.01	145,457,161,138.47	154.07
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2,598,043,013,849.00	2,443,713,666,204.66	2,354,670,621,821.00	94.06
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1,567,049,863,846.00	1,460,891,497,629.00	1,433,067,691,897.00	93.23
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	325,840,995,606.00	255,690,446,250.00	299,746,830,080.00	78.47
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	13,002,385,240.00	15,247,050,379.00	18,467,773,817.00	117.26
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1,160,025,693,000.00	1,160,025,693,000.00	1,061,625,528,000.00	100.00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	68,180,790,000.00	29,928,308,000.00	53,227,560,000.00	43.90
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	359,911,885,000.00	360,003,798,000.66	309,819,125,000.00	100.03
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0.00		0.00	0.00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	359,911,885,000.00	360,003,798,000.66	309,819,125,000.00	100.03
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	671,081,265,003.00	622,818,370,575.00	611,783,804,924.00	92.81
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	664,150,585,652.00	613,629,385,380.00	594,448,090,669.00	92.39
1.2.3.2	Bantuan Keuangan	6,173,385,000.00	8,238,075,000.00	16,777,000,000.00	133.45
1.2.3.3	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	757,294,351.00	950,910,195.00	558,714,255.00	125.57
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	91,913,000.00	0.00	17,468,000.00	0.00
1.3.1	Pendapatan Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	17,468,000.00	0.00
1.3.7	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	91,913,000.00	0.00		0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	5,255,244,153,444.00	5,235,293,716,914.17	4,634,301,938,653.61	99.62

Sumber data : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, diolah

Rekapitulasi Pendapatan daerah berdasarkan SKPD Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 dan Tahun 2012 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.2
Realisasi Pendapatan 2013 dan 2012 untuk SKPD

No	Nama SKPD	2013			2012		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Kesehatan	21.306.352.371,00	21.450.065.240,00	100,67	20.012.506.700,00	22.607.290.561,00	112,97
2	Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soew andhie	76.053.295.812,00	76.633.833.150,89	100,76	43.000.000.000,00	49.417.253.321,19	114,92
3	Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada	18.500.000.000,00	15.650.034.736,22	84,59	15.000.000.000,00	9.826.180.388,29	65,51
4	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	-	-	0,00	-	18.920.780,00	100,00
5	Dinas Kebakaran	2.030.648.477,00	1.980.031.575,00	97,51	1.723.117.174,00	1.225.409.953,00	71,12
6	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	41.242.862.985,00	41.260.069.866,98	100,04	39.393.807.110,00	40.467.517.999,88	102,73
7	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	89.055.233.115,00	121.899.125.120,00	136,88	61.788.826.497,00	76.752.021.997,00	124,22
8	Dinas Perhubungan	37.111.182.500,00	33.640.704.491,00	90,65	37.084.968.620,00	30.643.203.793,00	82,63
9	Badan Lingkungan Hidup	8.000.000.000,00	9.517.808.488,64	118,97	7.500.000.000,00	7.625.197.441,20	101,67
10	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	35.347.169.454,00	55.357.793.071,20	156,61	30.940.641.116,00	14.562.091.366,04	47,06
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4.803.100.000,00	7.344.450.000,00	152,91	980.350.000,00	1.299.545.000,00	132,56
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	161.422.500,00	1.645.837,00	1,02	16.500.000,00	13.174.996,00	79,85
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.416.405.640,00	4.051.476.692,00	118,59	2.957.199.640,00	2.590.941.520,00	87,61
14	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.000.000.000,00	1.000.846.500,00	100,08	900.000.000,00	1.251.051.319,00	139,01
15	Bagian Perlengkapan	1.010.800.000,00	1.420.174.050,00	140,50	1.010.800.000,00	1.110.344.000,00	109,85
16	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan	4.911.368.259.088,00	4.839.810.321.372,24	98,54	4.430.674.519.697,00	4.374.465.273.208,01	98,73
17	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	256.612.300,00	157.540.150,00	61,39	378.312.510,00	378.312.510,00	100,00
18	Badan Arsip dan Perpustakaan	8.045.100,00	33.491.700,00	416,30	-	48.208.500,00	100,00
19	Dinas Pertanian	233.604.000,00	-	-	-	-	0,00
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.339.160.102,00	4.030.069.320,00	92,88	-	-	0,00
21	Bagian Umum dan Protokol	-	54.235.553,00	100,00	-	-	0,00
J U M L A H		5.255.244.153.444,00	5.235.293.716.914,17	99,62	4.693.361.549.064,00	4.634.301.938.653,61	98,74

Sumber data : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, diolah

1. Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, dengan target pada tahun 2013 sebesar Rp.2.657.109.226.595,00 dan tahun 2012 sebesar Rp.2.341.265.681.882,00 terealisasi sebesar Rp.2.791.580.050.709,51 atau 105,06% pada tahun 2013 dan terealisasi sebesar Rp.2.279.613.848.832,61 atau 97,37% pada tahun 2012, terdiri dari :

a) Pajak Daerah

Pada tahun 2013 dan tahun 2012 ditargetkan sebesar Rp.2.118.292.666.000,00 dan Rp.1.909.562.850.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.154.652.323.797,88 dan Rp.1.852.977.636.886,55 atau sebesar 101,72% dari target tahun 2013 dan

sebesar 97,04% dari target tahun 2012. Secara terinci realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk Tahun 2013 dan 2012 bersumber dari:

No.	Pajak	2013	2012
1.	Pajak Hotel	Rp 151.418.187.250,00	Rp 126.540.958.475,55
2.	Pajak Restoran	Rp 211.755.737.412,00	Rp 172.882.689.664,00
3.	Pajak Hiburan	Rp 41.979.608.730,88	Rp 35.403.716.528,00
4.	Pajak Reklame	Rp 106.146.474.640,00	Rp 117.601.450.951,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	Rp 260.672.641.280,00	Rp 224.323.267.329,00
6.	Pajak Parkir	Rp 35.245.703.221,00	Rp 27.286.524.344,00
7.	Pajak Air Bawah Tanah	Rp 1.296.286.760,00	Rp 1.297.629.300,00
8.	Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 606.061.761.816,00	Rp 572.292.265.076,00
9.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Rp 740.075.922.688,00	Rp 575.349.135.219,00
Jumlah		Rp 2.154.652.323.797,88	Rp 1.852.977.636.886,55

Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

No.	Pajak Daerah	2013	2012
Pajak Hotel			
1	Hotel Bintang Lima	Rp 66.663.085.800,00	57.235.884.266,00
2	Hotel Bintang Empat	Rp 37.487.552.188,00	34.730.125.992,00
3	Hotel Bintang Tiga	Rp 21.468.532.083,00	16.318.867.632,00
4	Hotel Bintang Dua	Rp 3.190.194.755,00	1.886.799.587,55
5	Hotel Bintang Satu	Rp 1.261.482.597,00	1.040.981.616,00
6	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos	Rp 685.842.471,00	517.395.754,00
7	Hotel Non Bintang	Rp 20.661.497.356,00	14.810.903.628,00
Jumlah		151.418.187.250,00	126.540.958.475,55
Pajak Restoran			
1	Restoran	Rp 197.262.408.665,00	163.766.258.232,00
2	Katering	Rp 14.493.328.747,00	9.116.431.432,00
Jumlah		211.755.737.412,00	172.882.689.664,00
Pajak Hiburan			
1	Tontonan Film / Bioskop	Rp 20.624.103.500,00	14.358.470.840,00
2	Hiburan Non Bioskop	Rp 19.530.498.155,88	18.116.174.313,00
3	Hiburan Insidental	Rp 1.825.007.075,00	2.929.071.375,00
Jumlah		41.979.608.730,88	35.403.716.528,00
Pajak Reklame			
1	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	Rp 92.727.479.465,00	102.571.767.051,00
2	Reklame Insidental	Rp 13.418.995.175,00	15.029.683.900,00
Jumlah Pajak Reklame		106.146.474.640,00	117.601.450.951,00
Pajak Penerangan Jalan			
1	Pajak Penerangan Jalan PLN	Rp 260.253.065.885,00	223.928.718.954,00
2	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	Rp 419.575.395,00	394.548.375,00
Jumlah		Rp 260.672.641.280,00	224.323.267.329,00
Pajak Parkir			
1	Pajak Parkir	Rp 35.245.703.221,00	27.286.524.344,00
Jumlah Pajak Parkir		Rp 35.245.703.221,00	27.286.524.344,00
Pajak Air Tanah			
1	Pajak Air Tanah	Rp 1.296.286.760,00	1.297.629.300,00
Jumlah Air Tanah		Rp 1.296.286.760,00	1.297.629.300,00
Pajak Bumi Bangunan			
1	Pajak bumi Bangunan	Rp 606.061.761.816,00	572.292.265.076,00
Jumlah Pajak Bumi Bangunan		Rp 606.061.761.816,00	572.292.265.076,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan			
1	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Rp 740.075.922.688,00	575.349.135.219,00
Jumlah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		Rp 740.075.922.688,00	575.349.135.219,00
Jumlah Pajak Daerah		Rp 2.154.652.323.797,88	1.852.977.636.886,55

b) Retribusi Daerah

Pada tahun 2013 dan tahun 2012 ditargetkan sebesar Rp.235.196.801.853,00 dan Rp.203.721.977.378,00, terealisasi sebesar Rp.229.680.153.171,85 dan Rp.183.482.993.434,78 atau terealisasi sebesar 97,65% dari target tahun 2013 dan sebesar 90,07% dari target tahun 2012. Untuk Pendapatan Retribusi tersebut dapat dirinci secara kelompok sebagai berikut :

No.	Retribusi Daerah	2013	2012
1.	Reribusi Jasa Umum	Rp 92,211,812,869.48	Rp 70,805,253,043.90
2.	Retribusi Jasa Usaha	Rp 45,398,093,912.37	Rp 45,500,413,898.88
3.	Retribusi Perijinan Tertentu	Rp 92,070,246,390.00	Rp 67,177,326,492.00
Jumlah Retribusi Daerah		Rp 229,680,153,171.85	Rp 183,482,993,434.78

Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

No.	Retribusi Daerah	2013	2012
Retribusi Jasa Umum			
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	16,904,118,500.00	17,981,722,000.00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	28,020,846,498.00	12,897,134,841.04
3	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	1,183,550,000.00	1,299,545,000.00
4	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	2,157,550,000.00	1,633,380,000.00
5	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	11,805,883,000.00	9,301,939,500.00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	12,592,003,600.00	12,693,725,200.00
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1,980,031,575.00	1,225,409,953.00
8	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	1,081,068,884.00	6,021,152,241.00
9	Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada	12,299,151,342.48	7,721,267,783.86
10	Retribusi Penyedotan Kakus	-	29,976,525.00
11	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	4,030,069,320.00	
12	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	157,540,150.00	
Jumlah Retribusi Jasa Umum		92,211,812,869.48	70,805,253,043.90
Retribusi Jasa Usaha			
1	Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan	-	378,312,510.00
2	Retribusi Terminal	6,945,690,931.00	6,806,094,733.00
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1,486,293,000.00	1,168,329,000.00
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	3,784,466,692.00	2,397,011,520.00
5	Pemakaian Tanah atau Tempat-tempat yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya	31,597,842,937.43	33,353,781,444.41
6	Pemakaian Rumah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya	629,289,351.94	582,923,911.47
7	Pemakaian Gedung Balai Pemuda dan GNI	172,010,000.00	193,930,000.00
8	Penggunaan Gedung Gelanggang Remaja Surabaya	64,970,000.00	47,830,000.00
9	Pemakaian Gedung Serba Guna	717,531,000.00	553,280,000.00
10	Uang atas Pemakaian Tanah	-	18,920,780.00
Jumlah Retribusi Jasa Usaha		45,398,093,912.37	45,500,413,898.88
Retribusi Perizinan Tertentu			
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Rp 81,749,793,102.00	58,900,797,826.00
2	Retribusi Izin Gangguan / Keramaian	Rp 9,509,619,328.00	7,603,413,306.00
3	Retribusi Izin Trayek	Rp 810,833,960.00	673,115,360.00
4	Retribusi Ijin Jasa Konstruksi		0.00
Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu		Rp 92,070,246,390.00	67,177,326,492.00
Jumlah Retribusi Daerah		Rp 229,680,153,171.85	183,482,993,434.78

c) **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**

Pada tahun 2013 dan tahun 2012 ditargetkan sebesar Rp.111.966.678.336,00 dan Rp.97.652.321.173,00, terealisasi sebesar Rp.111.967.697.968,77 dan Rp.97.696.057.372,81 atau sebesar 100% dari target tahun 2013 dan sebesar 100,04% dari target tahun 2012. Rincian pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagai berikut :

No.	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	2013	2012
1.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)	Rp 104.829.908.232,14	Rp 94.589.069.262,81
2.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah (BUMN)	Rp 6.816.890.459,63	Rp 2.797.001.910,00
3.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta	Rp 320.899.277,00	Rp 309.986.200,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan		Rp 111.967.697.968,77	Rp 97.696.057.372,81

Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

No.	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	2013	2012
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD			
1	Bagian Laba PDAM	Rp 89.421.585.052,00	73.893.930.777,00
2	Bagian laba PD Pasar Surya	Rp 1.756.068.839,00	952.646.450,00
3	Bagian Laba PD Rumah Potong Hew an	Rp 300.801.187,00	424.910.042,00
4	Bagian Laba PT.Bank Jatim	Rp 12.686.734.981,18	18.005.208.523,81
5	Bagian Laba PT. BPR Jatim	Rp 13.862.000,00	14.190.000,00
6	Bagian laba PT. Surya Artha Utama	Rp 650.856.172,96	1.298.183.470,00
Jumlah Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD		Rp 104.829.908.232,14	94.589.069.262,81
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah / BUMN			
1	Bagian laba PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER)	Rp 6.816.890.459,63	2.797.001.910,00
Jumlah Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah / BUMN		6.816.890.459,63	2.797.001.910,00
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta			
1	Bagian Laba PT. STAR / Taman Remaja Surabaya	Rp 320.899.277,00	309.986.200,00
Jumlah Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta		320.899.277,00	309.986.200,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan		111.967.697.968,77	97.696.057.372,81

d) **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah**

Pada tahun 2013 dan tahun 2012 ditargetkan sebesar Rp.191.653.080.406,00 dan Rp.130.328.533.331,00 terealisasi sebesar Rp.295.279.875.771,01 dan Rp.145.457.161.138,47 atau sebesar 154,07% dari target tahun 2013 dan sebesar 111,61% dari target tahun 2012, dapat dirinci lebih lanjut atas penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagai berikut :

No.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2013	2012
1.	Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan	Rp 1,349,316,050.00	Rp 1,094,508,000.00
2.	Penerimaan Jasa Giro (Bank Jatim)	Rp 14,832,492,134.93	Rp 8,534,521,351.74
3.	Bunga Deposito (Bank Jatim)	Rp 57,579,864,797.57	Rp 41,143,835,616.08
4.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Bag.Perengkapan)	Rp 70,858,000.00	Rp 337,590,319.00
5.	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Rp 5,513,026,332.46	Rp 5,604,710,875.00
6.	Pendapatan Denda Pajak	Rp 202,500,000.00	Rp 187,500,000.00
7.	Pendapatan Denda Retribusi	Rp 2,668,548,377.25	Rp 45,396,533.20
8.	Hasil Eksekusi Atas Jaminan	Rp 6,015,350,050.09	Rp 1,081,840,227.00
9.	Pendapatan dari Pengembalian (Lampiran 16)	Rp 607,628,352.00	Rp 528,745,241.00
10.	Penerimaan lain-lain	Rp 129,806,458,525.82	Rp 37,481,259,654.26
11.	Pendapatan BLUD-RSUD Dr. Soewandhie	Rp 76,633,833,150.89	Rp 49,417,253,321.19
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		Rp 295,279,875,771.01	Rp 145,457,161,138.47

Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

No.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2013	2012
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan			
1	Pelepasan Hak atas Tanah	0,00	0,00
2	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	1.349.316.050,00	1.094.508.000,00
Jumlah Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		1.349.316.050,00	1.094.508.000,00
Penerimaan jasa Giro			
1	Jasa Giro Kas Daerah	13.354.363.582,50	7.837.608.928,10
2	Jasa Giro Pemegang kas	1.172.382.154,51	553.519.034,00
3	Jasa Giro BOPDA	305.746.397,92	143.393.389,64
Jumlah Penerimaan jasa Giro		14.832.492.134,93	8.534.521.351,74
Pendapatan Bunga Deposito			
1	Rekening Deposito pada Bank Jatim	11.338.356.164,29	41.143.835.616,08
2	Rekening Deposito pada Bank Mandiri	8.157.762.244,34	
3	Rekening Deposito pada Bank Tabungan Negara	16.510.458.610,94	
4	Rekening Deposito pada Bank Rakyat Indonesia	13.264.383.667,00	
5	Rekening Deposito pada Bank Negara Indonesia	8.308.904.111,00	
Jumlah Pendapatan Bunga Deposito		57.579.864.797,57	41.143.835.616,08
Tuntutan ganti Kerugian Daerah			
1	Kerugian Uang Daerah		321.754.319,00
2	Kerugian Barang Daerah	70.858.000,00	15.836.000,00
Jumlah Tuntutan ganti Kerugian Daerah		70.858.000,00	337.590.319,00

No.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2013	2012
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan			
1	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Pendidikan	1.441.275,00	57.255.334,00
2	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Kesehatan	316.472.553,00	469.582.049,00
3	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum	1.226.881.560,00	1.598.753.444,00
4	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Perumahan Rakyat	65.688.890,00	32.333.223,00
5	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Penataan Ruang	1.813.038.660,00	2.640.066.441,00
6	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Perencanaan Pembangunan	0,00	0,00
7	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Perhubungan	358.488.573,00	142.473.205,00
8	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Lingkungan Hidup	348.558.695,00	6.300.422,00
9	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil	15.444.275,00	0,00
10	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Sosial	0,00	0,00
11	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	17.980.900,00	10.593.735,00
12	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Penanaman Modal	0,00	0,00
13	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Pemuda dan Olah Raga	614.975.994,46	465.692.162,00
14	Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	7.811.211,00	
15	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Pemerintahan Umum	526.350,00	0,00
16	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Komunikasi dan Informatika	17.236.681,00	416.351,00
17	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Kelautan dan Perikanan	1.093.010,00	22.803.456,00
18	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Pertanian	0,00	2.439.294,00
19	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Kebersihan dan Pertamanan	701.101,00	0,00
20	Denda atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kehutanan	6.000.000,00	5.141.580,00
21	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Perdagangan	691.704,00	18.905.920,00
22	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Perlengkapan		131.954.259,00
23	Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Kebakaran	699.994.900,00	
Jumlah Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		5.513.026.332,46	5.604.710.875,00
Pendapatan Denda Pajak			
1	Pendapatan BPHTB	202.500.000,00	187.500.000,00
Jumlah Pendapatan Denda Pajak		202.500.000,00	187.500.000,00
Pendapatan Denda Retribusi			
1	Denda Retribusi Jasa Umum	2.346.300,00	26.100,00
2	Denda Retribusi Perizinan Tertentu	2.666.202.077,25	45.370.433,20
Jumlah Pendapatan Denda Retribusi		2.668.548.377,25	45.396.533,20
Pendapatan Hasil eksekusi atas Jaminan			
1	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan	6.015.350.050,09	1.081.840.227,00
Jumlah Pendapatan Hasil eksekusi atas Jaminan		6.015.350.050,09	1.081.840.227,00
Pendapatan dari Pengembalian			
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	607.628.352,00	528.745.241,00
Jumlah Pendapatan dari Pengembalian		607.628.352,00	528.745.241,00
Penerimaan Lain-Lain			
1	Penerimaan Gedung Wanita Chandra Kencana	229.325.000,00	193.800.000,00
2	Penerimaan Lain-Lain	3.248.916.077,30	6.570.660.248,91
3	Pengembalian Gaji Tunjangan		0,00

No.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2013	2012
4	Kolam Renang Brantas		0,00
5	Rumah Peristirahatan	800.000,00	875.000,00
6	Penyetoran atas Temuan Hasil Pemeriksaan	295.525.780,68	1.035.304.602,92
7	Sewa Gedung Jalan Walikota Mustajab nomor 84	136.967.000,00	129.214.000,00
8	Penerimaan Bunga dana Bergulir dari Koperasi dan Sektor Informal	1.645.837,00	13.174.996,00
9	Penerimaan Sewa Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan Halte Bis	1.406.999.162,00	2.231.142.971,00
10	Penerimaan Lain yang belum diketahui informasi jenis pendapatannya	103.575.610,90	602.325,00
11	Sewa Bangunan dan Tanah Gedung Siola	1.339.957.601,00	1.212.631.314,00
12	Sewa Bangunan Tunjungan Center	1.810.598.400,00	1.740.960.000,00
13	Penerimaan dari PT. ASKES	7.840.029.870,74	6.730.481.165,43
14	Pendapatan dari Gelora 10 Nopember	287.176.500,00	511.807.000,00
15	Pendapatan dari Hasil Kontribusi Bangunan Guna Serah (BOT) Pasar Turi	4.331.593.760,00	4.414.893.640,00
16	Sewa Lapangan Hocky/Softball/Baseball		10.600.000,00
17	Sewa stadion Bung Tomo	648.700.000,00	359.060.000,00
18	Penerimaan Pemakaian Sewa Rumah susun	778.834.461,00	399.543.300,00
19	Penerimaan dari Bangunan Gedung Kantin Milik/di kuasai Pemkot	73.666.407,00	86.959.535,00
20	sewa BTS Mobile	54.235.553,00	11.866.524,00
21	Penerimaan Sanksi Administrasi Bahan Pustaka	18.491.700,00	21.223.500,00
22	Pendapatan Sanksi Administrasi Pelanggaran Ketentuan Bangunan	38.961.962.464,00	11.806.459.532,00
23	Pendapatan Sanksi Administrasi Pelanggaran Administrasi Kependudukan	2.098.900.000,00	0,00
24	Pendapatan Sanksi Administrasi Pelanggaran Administrasi Pencatatan Sipil	4.062.000.000,00	0,00
25	Pendapatan Sanksi Administrasi Pelanggaran Administrasi Lahan Makam	21.206.120.629,20	0,00
26	Pendapatan Sanksi Administrasi Pelanggaran Ketentuan Kepariwisataaan	95.000.000,00	0,00
27	Pendapatan Sewa Barang Milik Pemerintah Kota Surabaya Berupa Ruangan di Lingkungan RSUD Bhakti Dharma Husada	56.800.263,00	0,00
28	Pendapatan Kontribusi atas BOT Pembangunan JPO Jl. Embong Malang Surabaya	22.558.323,00	0,00
29	Pendapatan Kontribusi tetap PT. Sumber Organik	3.973.275.944,00	0,00
30	Pendapatan Sanksi Administrasi Pajak Hotel	93.915.312,00	0,00
31	Pendapatan Sanksi Administrasi Pajak Restoran	312.947.375,00	0,00
32	Pendapatan Sanksi Administrasi Pajak Hiburan	101.180.008,00	0,00
33	Pendapatan Sanksi Administrasi Pajak Reklame	8.461.557.073,00	0,00
34	Pendapatan Sanksi Administrasi Pajak PPJ Non PLN	3.213.023,00	0,00
35	Pendapatan Sanksi Administrasi Pajak Parkir	70.471.899,00	0,00
36	Pendapatan Sanksi Administrasi Pajak Air Tanah	13.699.405,00	0,00
37	Pendapatan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	27.665.818.087,00	0,00
Jumlah Pendapatan Lain-Lain		129.806.458.525,82	37.481.259.654,26
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)			
1	Pendapatan BLUD - RSUD Dr. Soewandhie	76.633.833.150,89	49.417.253.321,19
Jumlah Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)		76.633.833.150,89	49.417.253.321,19
Total		292.725.817.224,40	145.457.161.138,47

Pendapatan Lain-lain tahun 2013 sebesar Rp.129.806.458.525,82, yang sudah diketahui jenis dan klasifikasinya sebesar Rp.129.702.883.363,82 (**Lampiran 17**) dan sisanya belum diketahui jenis dan klasifikasinya sebesar Rp.103.575.162,00 (**Lampiran 18**).

2. Pendapatan Transfer

Sumber Pendapatan ini berasal dari Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah Propinsi. Pada tahun 2013 dan tahun 2012 Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp.2.598.043.013.849,00 dan Rp.2.352.095.867.182,00, terealisasi sebesar Rp.2.443.621.753.204,66 dan Rp.2.354.670.621.821,00 atau terealisasi sebesar 94,06% dari target tahun 2013 dan sebesar 100,11% dari target tahun 2012.

a. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Untuk lebih jelasnya Pendapatan dari Dana Perimbangan dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat

Pada tahun 2013 dan tahun 2012 ditargetkan sebesar Rp.325.840.995.606,00 dan Rp.283.859.542.304,00, terealisasi sebesar Rp.255.690.446.250,00 dan Rp.299.746.830.080,00 atau sebesar 78,47% dari target tahun 2013 dan sebesar 105,60% dari target tahun 2012, yang dapat dirinci lebih lanjut atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagai berikut :

No.	Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat	2013	2012
1.	Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 23.076.346.283,00	Rp 25.324.300.633,00
2.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Rp -	Rp 481.469.231,00
3.	Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25, 29, 21	Rp 200.156.562.314,00	Rp 252.390.887.869,00
4.	Cukai Hasil Tembakau	Rp 32.457.537.653,00	Rp 21.550.172.347,00
Jumlah Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat		Rp 255.690.446.250,00	Rp 299.746.830.080,00

- **Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)**

Pada tahun 2013 dan tahun 2012 ditargetkan sebesar Rp.13.002.385.240,00 dan Rp.10.784.302.628,00, terealisasi sebesar Rp.15.247.050.379,00 dan Rp.18.467.773.817,00 atau sebesar 117,26% dari target tahun 2013 dan 171,25% dari target tahun 2012 yang ditetapkan yang bersumber dari :

No.	Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	2013	2012
1.	Provisi Sumber Daya Hutan	Rp 308.370.680,00	Rp 353.986.759,00
2.	Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	Rp 12.457.853,00	Rp 7.215.326,00
3.	Pungutan Hasil Perikanan	Rp 347.408.873,00	Rp 343.986.219,00
4.	Pertambangan Minyak Bumi	Rp 12.491.505.745,00	Rp 14.776.052.218,00
5.	Pertambangan Gas Bumi /Gas Alam	Rp 2.080.538.678,00	Rp 2.986.533.295,00
6.	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	Rp 6.768.550,00	Rp -
Jumlah Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)		Rp 15.247.050.379,00	Rp 18.467.773.817,00

- **Dana Alokasi Umum**

Pada tahun 2013 dan tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp.1.160.025.693.000,00 dan Rp.1.061.625.528.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.160.025.693.000,00 dan Rp.1.061.625.528.000,00 atau sebesar 100% dari target tahun 2013 dan sebesar 100% dari target tahun 2012.

- **Dana Alokasi Khusus**

Pada tahun 2013 dan tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp.68.180.790.000,00 dan Rp.53.227.560.000,00, terealisasi sebesar Rp.29.928.308.000,00 dan Rp.53.227.560.000,00 atau sebesar 43,90% dari target tahun 2013 dan 100% dari target tahun 2012.

- **Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**

- **Dana Penyesuaian**

Pada tahun 2013 dan tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp.359.911.885.000,00 dan Rp.309.819.125.000,00, terealisasi sebesar Rp.360.003.798.000,66, terdapat kelebihan sebesar Rp.91.913.000,00 merupakan reklasifikasi dari lain – lain pendapatan daerah yang sah dan Rp.309.819.125.000,00 atau sebesar

100,03% dari target tahun 2013 dan 100% dari target tahun 2012. yang merupakan Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan, dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Dana Penyesuaian	2013	2012
1.	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2013	Rp 4.385.500.000,00	Rp 7.812.000.000,00
2.	Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun 2013	Rp 355.526.385.000,66	Rp 302.007.125.000,00
3.	Dana Penyesuaian DP2D2	Rp 91.913.000,00	Rp -
4.	Dana Penyesuaian DPIPD	Rp -	Rp -
5.	Dana Penyesuaian untuk Dana BOSNAS SD dan SMP Negeri/Swasta	Rp -	Rp -
6.	Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID)	Rp -	Rp -
Jumlah Dana Penyesuaian		Rp 360.003.798.000,66	Rp 309.819.125.000,00

- **Transfer Pemerintah Provinsi**
 - Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi

Pada tahun 2013 dan tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp.664.150.585.652,00 dan Rp.607.033.790.222,00, terealisasi sebesar Rp.613.629.385.380,00 dan Rp.594.448.090.669,00 atau sebesar 92,39% dari target tahun 2013 dan 97,93% dari target tahun 2012.

Secara terinci pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Propinsi dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Bagi Hasil Pajak Pemerintah Propinsi	2013	2012
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	Rp 206.097.921.542,00	Rp 190.134.343.632,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp 241.408.766.066,00	Rp 229.282.433.756,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp 164.784.080.833,00	Rp 173.590.773.964,00
4.	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	Rp -	Rp -
5.	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	Rp 1.281.517.625,00	Rp 1.405.592.380,00
6.	Sumbangan Pihak Ketiga (SP3)	Rp 57.099.314,00	Rp 34.946.937,00
Jumlah Bagi Hasil Pajak Pemerintah Propinsi		Rp 613.629.385.380,00	Rp 594.448.090.669,00

- **Bagi Hasil Lainnya Pemerintah Provinsi**

Untuk pendapatan dari Bagi Hasil Lainnya Propinsi pada tahun 2013 dan tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp.757.294.351,00 dan Rp.2.679.579.028,00, terealisasi sebesar Rp.950.910.195,00 dan Rp.558.714.255,00 atau sebesar 125,57% dari target tahun 2013 dan 20,85% dari target tahun 2012, yang terdiri dari pendapatan:

No.	Bagi Hasil Lainnya Pemerintah Provinsi	2013	2012
1.	TERA	Rp 950.910.195,00	Rp 558.714.255,00
Jumlah Bagi Hasil Lainnya Pemerintah Provinsi		Rp 950.910.195,00	Rp 558.714.255,00

- **Bantuan Keuangan dari Provinsi**

Untuk pendapatan dari Bantuan Keuangan dari Provinsi pada tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp.6.173.385.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.8.238.075.000,00 Sedangkan pada tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp.23.066.440.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.16.777.000.000,00 atau sebesar 133,45% dari target tahun 2013 dan sebesar 72,73% dari target tahun 2012.

No.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	2013	2012
1.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp 8.238.075.000,00	Rp 16.777.000.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi		Rp 8.238.075.000,00	Rp 16.777.000.000,00

- **Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Pada tahun 2013 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp.91.913.000,00 terealisasi sebesar Rp.91.913.000,00 tapi di reklasifikasi ke pendapatan transfer (Dana Penyesuaian), sedangkan pada tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp.17.468.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.17.468.000,00 dari DP2D2 (Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi).

II. Penjelasan Pos-Pos Belanja

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2013 dan tahun 2012 sebesar Rp.5.057.279.664.344,95 dan Rp.4.299.150.223.080,63 apabila dibandingkan

dengan target belanja sebesar Rp.5.955.327.548.190,00 dan Rp.5.158.264.830.659,00 terdapat pos – pos belanja yang belum terealisasi sebesar Rp.898.047.883.845,05 dan Rp.859.114.607.578,37 atau dari keseluruhan anggaran belanja terealisasi sebesar 84,92 % pada tahun 2013 dan sebesar 83,34 % pada tahun 2012. Laporan ikhtisar atas realisasi belanja tahun 2013 dan 2012 sebagai berikut :

Kode	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		Realisasi 2012
		Anggaran	Realisasi 2013	(Rp)	%	
1	2	3	4	6 = (4-3)	7	5
2	BELANJA DAERAH	5.955.327.548.190,00	5.057.279.664.344,95	(898.047.883.845,05)	84,92	4.299.150.223.080,63
2.1	Belanja Operasi	4.192.882.705.877,00	3.770.796.965.236,89	(422.085.740.640,11)	89,93	3.382.179.570.371,63
2.1.1	Belanja Pegawai	2.208.822.728.463,00	2.049.262.468.474,52	(159.560.259.988,48)	92,78	1.908.805.098.308,58
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.694.372.007.583,00	1.466.759.779.177,53	(227.612.228.405,47)	86,57	1.210.639.630.539,86
2.1.3	Belanja Bunga	1.226.354.437,00	0,00	(1.226.354.437,00)	0,00	2.223.619.192,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	284.910.615.394,00	253.316.709.084,84	(31.593.906.309,16)	88,91	258.999.514.331,19
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.651.000.000,00	853.703.500,00	(797.296.500,00)	51,71	867.500.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan keuangan	1.900.000.000,00	604.305.000,00	(1.295.695.000,00)	31,81	644.208.000,00
2.2	Belanja Modal	1.747.356.759.354,00	1.281.394.616.149,06	(465.962.143.204,94)	73,33	912.716.142.120,00
2.2.1	Belanja Tanah	309.714.099.809,00	238.158.398.925,00	(71.555.700.884,00)	76,90	136.872.202.550,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	264.793.778.831,00	205.018.395.845,00	(59.775.382.986,00)	77,43	282.966.010.775,00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	502.131.712.829,00	372.679.990.044,33	(129.451.722.784,67)	74,22	268.319.373.162,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan	668.911.732.364,00	464.140.371.614,73	(204.771.360.749,27)	69,39	211.703.906.887,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap lainnya	712.112.145,00	449.432.800,00	(262.679.345,00)	63,11	11.965.688.300,00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya/Aset Tak Berwujud	1.093.323.376,00	948.026.920,00	(145.296.456,00)	86,71	888.960.446,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	0,00	(10.000.000.000,00)	0,00	3.054.510.589,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	0,00	(10.000.000.000,00)	0,00	3.054.510.589,00
2.4	Transfer	5.088.082.959,00	5.088.082.959,00	3,00	100,00	1.200.000.000,00
2.4.1	Transfer bagi Hasil	0,00		0,00	0,00	0,00
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	0,00		0,00	0,00	0,00
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	5.088.082.959,00	5.088.082.959,00	0,00	100,00	1.200.000.000,00
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00		0,00	0,00	0,00

Penjelasan Pos-Pos Belanja

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Pusat / Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, pada tahun 2013 dan tahun 2012 dianggarkan sebesar 4.192.882.705.877,- dan

Rp.3.960.920.145.441,00 direalisasikan sebesar 3.770.796.965.236,89 atau 89,93% dan Rp.3.382.179.570.371,63 atau 85.38 %

a. Belanja Pegawai

Pada tahun 2013 dan tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp.2.208.822.728.463,00 dan Rp.2.130.113.763.032,00 terealisasi Rp.2.049.262.468.474,52 dan Rp.1.908.805.098.308,58 atau sebesar 92,78% dari target tahun 2013 dan sebesar 89,61% dari target tahun 2012. Belanja Pegawai yang terkait secara langsung dengan Program/Kegiatan dianggarkan sebesar Rp.450.351.680.331,00 dan Rp.401.718.035.396,00 terealisasi sebesar Rp.364.203.647.705,52 dan Rp.307.548.751.751,58 atau sebesar 80,87% dari target tahun 2013 dan sebesar 76,55% dari target tahun 2012. Sedangkan untuk Belanja Pegawai yang tidak terkait secara langsung dengan Program/Kegiatan dianggarkan sebesar Rp.1.758.471.048.132,00 dan Rp.1.728.395.727.636,00 direalisasikan sebesar Rp.1.685.058.820.769,00 atau sebesar 95,83% dari target yang ditetapkan dan Rp.1.601.256.346.557,00 atau sebesar 92,64% dari target yang ditetapkan.

Rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun 2013 sebesar Rp.2.049.262.468.474,52 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
Belanja Pegawai Tidak Langsung		
1.	Gaji Pokok PNS/Uang representasi	941.416.886.296,00
2.	Tambahan Penghasilan	338.293.636.774,00
3.	B. Penerimaan Lainnya Pimp & angg DPRD serta KDH/WKDH	5.552.922.059,00
4.	B. Penghasilan lainnya (guru PNS)	342.719.375.640,00
5.	Insentif Pemungutan Pajak	57.076.000.000,00
Jumlah Belanja Pegawai Tidak Langsung		1.685.058.820.769,00
Belanja Pegawai Langsung		
1.	Honorarium PNS	1.249.250.000,00
2.	Honorarium Non PNS	47.729.154.525,00
3.	Uang lembur	37.594.034.955,00
4.	Penunjang kinerja kegiatan	189.093.613.361,52
5.	Honorarium Pengelola Keg BOPDA	70.870.897.864,00
6.	Uang Untuk diberikan Kepada Masyarakat	17.666.697.000,00
Jumlah Belanja Pegawai Langsung		364.203.647.705,52
Jumlah Belanja Pegawai		2.049.262.468.474,52

b. Belanja Barang dan Jasa

Pada tahun 2013 dan 2012 dianggarkan sebesar Rp.1.694.372.007.583,00 dan Rp.1.525.064.821.291,00 terealisasi sebesar Rp.1.466.759.779.177,53 atau sebesar 86,57% dan Rp.1.210.639.630.539,86 atau sebesar 79,38% dari target yang ditetapkan.

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2013 sebesar Rp.1.466.759.779.177,53 adalah sebagai berikut :

No.	Belanja Barang dan Jasa	Jumlah
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	175.941.336.426,00
2.	Belanja Bahan / Material	44.130.925.170,00
3.	Belanja Jasa Kantor	366.692.181.354,00
4.	Belanja Premi Asuransi	258.506.313,00
5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.730.449.788,00
6.	Belanja Sewa Rumah / Gedung	7.663.023.334,00
7.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.661.840.303,00
8.	Belanja Sewa Alat Berat	796.821.400,00
9.	Belanja Sewa Perlengkapan	10.801.693.660,00
10.	Belanja Sewa Peralatan Kerja Lapangan	30.291.250,00
11.	Belanja Makan Minum	112.440.797.252,00
12.	Belanja Pakaian dan Atributnya	12.934.644.743,00
13.	Belanja Perjalanan Dinas	40.997.368.217,00
14.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.498.000.000,00
15.	Belanja Kursus/Diklat/Bintek PNS	19.340.171.980,00
16.	Belanja Jasa Konsultansi	33.549.276.055,00
17.	Belanja Pemeliharaan	132.270.956.437,00
18.	Belanja Transport Lokal	63.235.906.006,00
19.	Belanja Rumah Tangga KDH/WKDH	1.762.939.527,00
20.	Belanja Pemberian Hadiah	8.142.415.820,00
21.	Belanja Jasa Operasional Kegiatan	272.082.097.651,00
22.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOPDA	116.042.877.518,53
23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kpd Masyarakat	10.755.258.973,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa		1.466.759.779.177,53

c. Belanja Bunga

Pada tahun 2013 dan 2012 dianggarkan sebesar Rp.1.226.354.437,00 dan Rp.5.646.336.544,00 tidak ada realisasi karena hutang Loan IBRD Nomor 3726 Nomor SLA 764 DP3 1994 telah dilunasi tahun 2012 dan terealisasi sebesar Rp.2.223.619.192,00 atau 39,38% di tahun 2012.

Anggaran sebesar Rp.1.226.354.437,00 merupakan anggaran prepayment premium atas percepatan pembayaran pinjaman pemerintah Kota Surabaya yang sampai dengan akhir tahun 2013 belum terbayarkan.

d. Belanja Hibah (Lampiran 19)

Pada tahun 2013 dan 2012 dianggarkan sebesar Rp.284.910.615.394,00 dan Rp.297.150.224.574,00 , dan direalisasikan sebesar Rp.253.316.709.084,84 atau 88,91% dan Rp.258.999.514.331,19 atau 87,16% dari target yang ditetapkan, digunakan untuk :

No.	Belanja Hibah	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
1.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta	0,00	0,00
2.	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan	0,00	0,00
3.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	2.598.070.383,70
4.	Belanja Hibah kepada Masyarakat	253.316.709.084,84	233.031.335.862,49
5.	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0,00	23.370.108.085,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Belanja Hibah		253.316.709.084,84	258.999.514.331,19

e. Belanja Bantuan Sosial (Lampiran 20)

Pada tahun 2013 dan 2012 dianggarkan sebesar Rp.1.651.000.000,00 dan Rp.1.045.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.853.703.500,00 atau 51,71% dan Rp.867.500.000,00 atau terealisasi 83,01 % dari target yang ditetapkan dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

No.	Belanja Bantuan Sosial	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
1.	Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	0,00	0,00
2.	Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	791.250.000,00	0,00
3.	Bantuan Sosial Kepada individu dan / keluarga dan / atau masyarakat dan/ lembaga non pemerintahan	53.953.500,00	0,00
4.	Bantuan Sosial Kepada Individu, keluarga dan / atau masyarakat	8.500.000,00	867.500.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Belanja		853.703.500,00	867.500.000,00

f. Belanja Bantuan Keuangan

Pada tahun 2013 dan 2012 dianggarkan sebesar Rp.1.900.000.000,00 dan Rp.1.900.000.000,00, terealisasi sebesar Rp.604.305.000,00 atau sebesar 31,81%, sedangkan Rp.644.208.000,00 atau terealisasi 33,90% dari target yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
1.	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	604.305.000,00	644.208.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		604.305.000,00	644.208.000,00

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada tahun 2013 dan 2012 dianggarkan sebesar Rp.1.747.356.759.354,00 dan Rp.1.182.671.510.989,00 direalisasikan sebesar Rp.1.281.394.616.149,06 atau 73,33% dan sebesar Rp.912.716.142.120,00 atau 77,17% dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Tanah

Pada tahun 2013 dan 2012 dianggarkan sebesar Rp.309.714.099.809,00 dan Rp.206.004.210.461,00 terealisasi sebesar Rp.238.158.398.925,00 atau sebesar 76,90% dan Rp.136.872.202.550,00 atau sebesar 66,44% dari target yang ditetapkan. Rincian realisasi Belanja Tanah Tahun 2013 sebesar Rp.238.158.398.925,00 adalah sebagai berikut :

No.	Belanja Tanah	Jumlah
1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Penggunaan Lain	0,00
2.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	14.142.694.300,00
3.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	224.015.704.625,00
Jumlah Belanja Tanah		238.158.398.925,00

b. Belanja Peralatan dan Mesin

Pada tahun 2013 dan 2012 dianggarkan sebesar Rp.264.793.778.831,00 dan Rp.355.177.065.651,00 terealisasi sebesar Rp.205.018.395.845,00 atau sebesar

77,43% dan Rp.282.966.010.775,00 atau sebesar 79,66% dari target yang ditetapkan. Rincian Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2013 sebesar Rp.205.018.395.845,00 adalah sebagai berikut :

No.	Belanja Peralatan dan mesin	Jumlah
1.	Belanja Modal Pengadaan Alat Berat Darat	30.365.411.732,00
2.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan	36.390.691.781,00
3.	Belanja Modal Alat Bantu Kerja	4.700.784.350,00
4.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pertanian/Pertamanan	107.850.875,00
5.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	41.091.742.909,00
6.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio dan Alat Komunikasi	8.553.250.470,00
7.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	70.609.110.010,00
8.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium	13.199.553.718,00
Jumlah Belanja Peralatan dan mesin		205.018.395.845,00

c. Belanja Gedung dan Bangunan

Pada tahun 2013 dan 2012 dianggarkan sebesar Rp.502.131.712.829,00 dan Rp.338.972.036.272,00 terealisasi sebesar Rp.372.679.990.044,33 atau sebesar 74,22% dan Rp.268.319.373.162,00 atau sebesar 79,15% dari target yang ditetapkan. Rincian Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2013 sebesar Rp.372.679.990.044,33 adalah sebagai berikut :

No.	Belanja Gedung dan Bangunan	Jumlah
1.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung	337.601.571.004,33
2.	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman dan pemakaman	11.494.986.547,00
3.	Belanja modal pengadaan sarana dan prasarana lalu lintas	23.583.432.493,00
Jumlah Belanja Gedung dan Bangunan		372.679.990.044,33

d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pada tahun 2013 dan 2012 dianggarkan sebesar Rp.668.911.732.364,00 dan Rp.267.816.802.805,00 terealisasi sebesar Rp.464.140.371.614,73 atau sebesar 69,39% dan Rp.211.703.906.887 atau sebesar 79,05% dari target yang ditetapkan. Rincian Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2012 sebesar Rp.211.703.906.887,00 sebagai berikut :

No.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jumlah
1.	Belanja Modal Pengadaan Jalan dan Jembatan	182.237.131.926,78
2.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air	250.356.249.092,95
3.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi	4.383.662.528,00
4.	Belanja modal Pengadaan Jaringan	27.163.328.067,00
Jumlah Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		464.140.371.614,73

e. Belanja Aset Tetap lainnya

Pada tahun 2013 dan 2012 dianggarkan sebesar Rp.712.112.145,00 dan Rp.13.721.705.550,00 terealisasi sebesar Rp.449.432.800,00 atau sebesar 63,11% dan Rp.11.965.688.300,00 atau sebesar 87,20% dari target yang ditetapkan. Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2013 sebesar Rp.449.432.800,00 sebagai berikut :

No.	Belanja Aset Tetap Lainnya	Jumlah
1.	Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Buku dan Perpustakaan	21.747.300,00
2.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	427.685.500,00
Jumlah Belanja Aset Tetap Lainnya		449.432.800,00

Sumber data : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, diolah

f. Belanja Aset Lainnya (Lampiran 21)

Belanja Aset Tak Berwujud pada tahun 2013 dan 2012 dianggarkan sebesar Rp.1.093.323.376,00 dan Rp.979.690.250,00 terealisasi sebesar Rp.948.026.920,00 atau sebesar 86,71% dan Rp.888.960.446,00 atau sebesar 90,74%.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Belanja Tidak Terduga pada tahun 2013 dan tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp.10.000.000.000,00 dan Rp.10.000.000.000,00, tidak ada realisasi di tahun 2013 sedangkan tahun 2012 realisasi sebesar Rp.3.054.510.589,00.

4. Transfer

Pada Tahun 2013 Transfer dianggarkan sebesar Rp.5.088.082.959,00 untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Terminal Purabaya terealisasi sebesar

Rp.5.088.082.959,00 yang merupakan pelunasan hutang bagi hasil retribusi Terminal Purabaya mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Sedangkan pada Tahun 2012 anggaran Transfer adalah Rp.4.673.174.229,00 dengan realisasi sebesar 1.200.000.000,-.

Dalam pengelolaan belanja, Pemerintah Kota Surabaya menekankan tentang penggunaan Belanja Daerah yang harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan. Pada Tahun 2013 dan tahun 2012 untuk belanja daerah dianggarkan sebesar Rp.5.955.327.548.190,00 dan Rp.5.158.264.830.659,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp.5.057.279.664.344,95 dan Rp.4.299.150.223.080,63 per SKPD dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.2.1

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2013 per SKPD

Nomor	Nama SKPD	2013		Bertambah / (Berkurang)	%
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas Pendidikan	1.526.285.999.126,00	1.358.092.586.491,53	(168.193.412.634,47)	88,98
2	Dinas Kesehatan	429.285.644.748,00	397.798.550.266,00	(31.487.094.482,00)	92,67
3	Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soew andhie	143.379.679.486,00	130.250.365.256,00	(13.129.314.230,00)	90,84
4	Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada	101.398.369.014,00	80.765.539.964,00	(20.632.829.050,00)	79,65
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	1.046.023.463.539,00	829.454.549.876,73	(216.568.913.662,27)	79,30
6	Dinas Kebakaran	56.036.693.196,00	51.813.388.381,00	(4.223.304.815,00)	92,46
7	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	79.935.778.696,00	43.590.071.270,00	(36.345.707.426,00)	54,53
8	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	386.392.219.375,00	294.384.038.029,33	(92.008.181.345,67)	76,19
9	Badan Perencanaan Pembangunan	26.688.685.904,00	22.161.524.203,00	(4.527.161.701,00)	83,04
10	Dinas Perhubungan	153.338.312.561,00	133.301.345.845,00	(20.036.966.716,00)	86,93
11	Badan Lingkungan Hidup	23.782.312.478,00	19.989.760.119,00	(3.792.552.359,00)	84,05
12	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	424.923.729.349,00	348.772.432.894,00	(76.151.296.455,00)	82,08
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	18.284.902.362,00	16.288.590.390,00	(1.996.311.972,00)	89,08
14	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	34.815.086.416,00	29.580.807.110,00	(5.234.279.306,00)	84,97
15	Dinas Sosial	89.012.651.658,00	77.979.626.278,00	(11.033.025.380,00)	87,61
16	Dinas Tenaga Kerja	25.146.397.461,00	21.965.127.836,00	(3.181.269.625,00)	87,35
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	23.675.203.373,00	17.669.114.844,00	(6.006.088.529,00)	74,63
18	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal	10.348.763.881,00	9.596.839.272,00	(751.924.609,00)	92,73
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	34.528.333.703,00	32.331.054.939,00	(2.197.278.764,00)	93,64
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	79.402.879.982,00	63.777.783.509,00	(15.625.096.473,00)	80,32
21	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	26.234.220.659,00	22.536.694.586,00	(3.697.526.073,00)	85,91
22	Satuan Polisi Pamong Praja	35.944.268.794,00	33.093.603.586,00	(2.850.665.208,00)	92,07
23	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	16.184.260.490,00	14.512.902.498,00	(1.671.357.992,00)	89,67
24	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.189.790.585,00	1.706.156.600,00	(483.633.985,00)	77,91
25	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	6.469.899.360,00	6.114.878.803,00	(355.020.557,00)	94,51
26	Bagian Hukum	8.142.021.909,00	7.064.657.626,00	(1.077.364.283,00)	86,77
27	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	3.904.059.855,00	3.441.442.378,00	(462.617.477,00)	88,15
28	Bagian Kerjasama	12.940.146.400,00	9.047.208.173,00	(3.892.938.227,00)	69,92
29	Bagian Bina Program	11.341.166.003,00	10.393.809.735,00	(947.356.268,00)	91,65
30	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah	3.643.080.431,00	3.115.234.411,00	(527.846.020,00)	85,51
31	Bagian Kesejahteraan Rakyat	3.154.381.731,00	2.813.325.100,00	(341.056.631,00)	89,19
32	Bagian Umum dan Protokol	69.342.356.113,00	61.873.556.868,00	(7.468.799.245,00)	89,23
33	Bagian Perlengkapan	60.095.695.631,00	55.140.997.481,00	(4.954.698.150,00)	91,76
34	Bagian Hubungan Masyarakat	8.075.452.679,00	7.603.583.562,00	(471.869.117,00)	94,16
35	Sekretariat DPRD	69.267.012.642,00	43.941.773.980,00	(25.325.238.662,00)	63,44

Nomor	Nama SKPD	2013		Bertambah / (Berkurang)	%
		Anggaran	Realisasi		
36	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan	448.229.639.018,00	382.621.202.289,84	(65.608.436.728,16)	85,36
37	Inspektorat	11.577.944.781,00	10.935.855.098,00	(642.089.683,00)	94,45
38	Kecamatan Genteng	10.952.834.610,00	10.083.175.297,00	(869.659.313,00)	92,06
39	Kecamatan Simokerto	10.404.780.386,00	9.264.062.442,00	(1.140.717.944,00)	89,04
40	Kecamatan Tegalsari	10.823.690.272,00	9.622.713.480,00	(1.200.976.792,00)	88,90
41	Kecamatan Bubutan	10.649.166.345,00	10.047.082.590,00	(602.083.755,00)	94,35
42	Kecamatan Kenjeran	8.933.534.106,00	8.055.989.880,00	(877.544.226,00)	90,18
43	Kecamatan Pabean Cantian	9.962.455.861,00	8.692.847.899,00	(1.269.607.962,00)	87,26
44	Kecamatan Semampir	10.593.696.271,00	9.235.070.717,00	(1.358.625.554,00)	87,18
45	Kecamatan Krembangan	10.383.718.649,00	9.620.470.620,00	(763.248.029,00)	92,65
46	Kecamatan Tambaksari	13.193.375.614,00	12.237.251.465,00	(956.124.149,00)	92,75
47	Kecamatan Gubeng	12.389.267.694,00	11.275.211.667,00	(1.114.056.027,00)	91,01
48	Kecamatan Rungkut	10.885.288.719,00	9.838.114.421,00	(1.047.174.298,00)	90,38
49	Kecamatan Gunung Anyar	8.399.571.546,00	7.683.155.425,00	(716.416.121,00)	91,47
50	Kecamatan Tenggiling Mejoyo	8.725.158.289,00	7.814.248.955,00	(910.909.334,00)	89,56
51	Kecamatan Sukolilo	11.946.515.383,00	10.796.523.274,00	(1.149.992.109,00)	90,37
52	Kecamatan Mulyorejo	10.790.546.542,00	9.209.590.014,00	(1.580.956.528,00)	85,35
53	Kecamatan Wonokromo	13.399.719.442,00	12.221.690.977,00	(1.178.028.465,00)	91,21
54	Kecamatan Karang Pilang	8.765.376.972,00	7.974.155.683,00	(791.221.289,00)	90,97
55	Kecamatan Dukuh Pakis	8.763.131.476,00	7.881.484.214,00	(881.647.262,00)	89,94
56	Kecamatan Gayungan	8.534.576.478,00	7.836.978.227,00	(697.598.251,00)	91,83
57	Kecamatan Jambangan	8.315.668.812,00	7.747.597.441,00	(568.071.371,00)	93,17
58	Kecamatan Wonocolo	9.608.835.147,00	8.673.662.848,00	(935.172.299,00)	90,27
59	Kecamatan Sawahan	13.044.160.133,00	12.175.067.973,00	(869.092.160,00)	93,34
60	Kecamatan Wiyung	7.899.767.121,00	7.183.474.721,00	(716.292.400,00)	90,93
61	Kecamatan Tandes	10.921.217.032,00	9.821.964.035,00	(1.099.252.997,00)	89,93
62	Kecamatan Asem Rowo	8.314.030.366,00	7.264.869.691,00	(1.049.160.675,00)	87,38
63	Kecamatan Sukomanunggal	9.511.373.716,00	8.852.157.459,00	(659.216.257,00)	93,07
64	Kecamatan Benowo	8.288.544.938,00	6.902.721.555,00	(1.385.823.383,00)	83,28
65	Kecamatan Lakarsantri	9.883.721.049,00	8.703.149.537,00	(1.180.571.512,00)	88,06
66	Kecamatan Sambikerep	8.210.552.530,00	7.651.200.756,00	(559.351.774,00)	93,19
67	Kecamatan Pakal	9.816.489.717,00	8.726.038.862,00	(1.090.450.855,00)	88,89
68	Kecamatan Bulak	8.590.403.041,00	7.333.466.597,00	(1.256.936.444,00)	85,37
69	Badan Kepegawaian dan Diklat	22.618.774.707,00	19.324.739.399,00	(3.294.035.308,00)	85,44
70	Kantor Ketahanan Pangan	2.889.047.204,00	2.650.630.426,00	(238.416.778,00)	91,75
71	Dinas Komunikasi dan Informatika	30.846.425.273,00	28.739.607.671,00	(2.106.817.602,00)	93,17
72	Badan Arsip dan Perpustakaan	20.810.838.241,00	20.151.281.447,00	(659.556.794,00)	96,83
73	Dinas Pertanian	28.366.888.656,00	26.692.118.450,00	(1.674.770.206,00)	94,10
74	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	29.473.902.463,00	23.776.118.681,52	(5.697.783.781,48)	80,67
	JUMLAH	5.955.327.548.190,00	5.057.279.664.344,95	(898.047.883.845,05)	84,92

Sumber data : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, diolah

Tabel 5.2.2

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2012 per SKPD

Nomor	Nama SKPD	2012		Bertambah/ (Berkurang)	%
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas Pendidikan	1.427.030.983.841,00	1.239.909.224.476,44	(187.121.759.364,56)	86,89
2	Dinas Kesehatan	410.763.179.135,00	354.474.885.162,00	(56.288.293.973,00)	86,30
3	Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soew andhie	188.010.415.190,00	174.944.622.017,00	(13.065.793.173,00)	93,05
4	Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada	91.135.741.599,00	73.090.187.368,00	(18.045.554.231,00)	80,20
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	599.463.038.613,00	492.475.826.921,00	(106.987.211.692,00)	82,15
6	Dinas Kebakaran	48.743.737.500,00	44.215.717.554,00	(4.528.019.946,00)	90,71
7	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	74.120.268.876,00	26.256.753.194,00	(47.863.515.682,00)	35,42
8	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	337.491.446.703,00	262.979.002.994,00	(74.512.443.709,00)	77,92
9	Badan Perencanaan Pembangunan	26.914.884.295,00	21.608.261.229,00	(5.306.623.066,00)	80,28
10	Dinas Perhubungan	119.175.456.898,00	105.392.649.816,00	(13.782.807.082,00)	88,43
11	Badan Lingkungan Hidup	21.476.888.337,00	19.672.888.498,00	(1.803.999.839,00)	91,60
12	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	307.009.624.753,00	253.629.465.819,00	(53.380.158.934,00)	82,61
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	26.316.207.447,00	14.852.104.926,00	(11.464.102.521,00)	56,44
14	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	32.303.878.271,00	28.227.021.611,00	(4.076.856.660,00)	87,38
15	Dinas Sosial	37.182.581.628,00	30.629.391.656,00	(6.553.189.972,00)	82,38
16	Dinas Tenaga Kerja	22.679.325.554,00	19.576.376.290,00	(3.102.949.264,00)	86,32
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	20.149.004.346,00	12.013.417.893,00	(8.135.586.453,00)	59,62
18	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal	10.765.172.375,00	9.405.774.328,00	(1.359.398.047,00)	87,37
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	31.106.462.191,00	28.131.268.041,00	(2.975.194.150,00)	90,44
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	62.474.765.290,00	43.174.116.037,00	(19.300.649.253,00)	69,11
21	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	16.956.261.898,00	14.973.310.362,00	(1.982.951.536,00)	88,31
22	Satuan Polisi Pamong Praja	29.811.319.358,00	27.238.952.712,00	(2.572.366.646,00)	91,37
23	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	16.049.151.032,00	14.721.124.885,00	(1.328.026.147,00)	91,73
24	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.189.813.185,00	2.159.162.855,00	(30.650.330,00)	98,60
25	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	5.488.592.582,00	5.032.423.145,00	(456.169.437,00)	91,69
26	Bagian Hukum	7.551.640.794,00	6.202.095.738,00	(1.349.545.056,00)	82,13
27	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	3.430.108.545,00	3.058.717.799,00	(371.390.746,00)	89,17
28	Bagian Kerjasama	13.908.095.194,00	9.558.182.853,00	(4.349.912.341,00)	68,72
29	Bagian Bina Program	11.834.032.908,00	10.220.243.077,00	(1.613.789.831,00)	86,36
30	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah	3.041.648.805,00	2.769.921.500,00	(271.727.305,00)	91,07
31	Bagian Kesejahteraan Rakyat	2.683.655.809,00	2.354.052.392,00	(329.603.417,00)	87,72

32	Bagian Umum dan Protokol	61.544.097.775,00	51.139.090.297,00	(10.405.007.478,00)	83,09
33	Bagian Perlengkapan	118.994.088.316,00	95.102.492.664,00	(23.891.595.652,00)	79,92
34	Bagian Hubungan Masyarakat	7.631.860.794,00	7.026.726.665,00	(605.134.129,00)	92,07
35	Sekretariat DPRD	75.803.752.527,00	45.177.094.004,00	(30.626.658.523,00)	59,60
36	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan	451.308.503.856,00	375.438.318.659,19	(75.870.185.196,81)	83,19
37	Inspektorat	11.484.822.948,00	10.910.343.944,00	(574.479.004,00)	95,00
38	Kecamatan Genteng	10.415.275.482,00	8.974.084.032,00	(1.441.191.450,00)	86,16
39	Kecamatan Simokerto	8.820.915.228,00	7.566.524.217,00	(1.254.391.011,00)	85,78
40	Kecamatan Tegalsari	9.858.366.599,00	8.527.930.283,00	(1.330.436.316,00)	86,50
41	Kecamatan Bubutan	9.880.334.767,00	8.762.596.137,00	(1.117.738.630,00)	88,69
42	Kecamatan Kenjeran	8.132.450.300,00	7.009.245.062,00	(1.123.205.238,00)	86,19
43	Kecamatan Pabean Cantian	9.494.532.289,00	7.943.527.128,00	(1.551.005.161,00)	83,66
44	Kecamatan Semampir	9.830.738.002,00	8.089.170.902,00	(1.741.567.100,00)	82,28
45	Kecamatan Krembangan	9.326.357.035,00	8.395.638.081,00	(930.718.954,00)	90,02
46	Kecamatan Tambaksari	11.690.590.577,00	10.105.776.237,00	(1.584.814.340,00)	86,44
47	Kecamatan Gubeng	10.623.339.471,00	9.593.124.314,00	(1.030.215.157,00)	90,30
48	Kecamatan Rungkut	9.800.385.604,00	8.625.757.118,00	(1.174.628.486,00)	88,01
49	Kecamatan Gunung Anyar	7.904.982.565,00	6.849.114.758,00	(1.055.867.807,00)	86,64
50	Kecamatan Tenggiling Mejoyo	7.682.151.733,00	6.363.145.819,00	(1.319.005.914,00)	82,83
51	Kecamatan Sukolilo	10.563.149.465,00	9.447.034.584,00	(1.116.114.881,00)	89,43
52	Kecamatan Mulyorejo	10.042.961.216,00	8.129.362.719,00	(1.913.598.497,00)	80,95
53	Kecamatan Wonokromo	12.285.439.461,00	10.436.746.837,00	(1.848.692.624,00)	84,95
54	Kecamatan Karang Pilang	8.052.729.361,00	7.421.596.039,00	(631.133.322,00)	92,16
55	Kecamatan Dukuh Pakis	7.776.002.354,00	6.689.799.235,00	(1.086.203.119,00)	86,03
56	Kecamatan Gayungan	7.946.206.569,00	6.967.227.140,00	(978.979.429,00)	87,68
57	Kecamatan Jambangan	7.463.811.886,00	6.662.110.842,00	(801.701.044,00)	89,26
58	Kecamatan Wonocolo	9.009.745.975,00	7.832.487.897,00	(1.177.258.078,00)	86,93
59	Kecamatan Sawahan	11.534.602.769,00	10.610.111.562,00	(924.491.207,00)	91,99
60	Kecamatan Wiyung	7.191.071.234,00	6.169.453.665,00	(1.021.617.569,00)	85,79
61	Kecamatan Tandes	10.508.240.599,00	8.260.261.422,00	(2.247.979.177,00)	78,61
62	Kecamatan Asemrowo	7.484.470.605,00	6.360.666.471,00	(1.123.804.134,00)	84,98
63	Kecamatan Sukomanunggal	8.398.954.870,00	7.672.467.321,00	(726.487.549,00)	91,35
64	Kecamatan Benowo	8.349.676.467,00	6.399.786.940,00	(1.949.889.527,00)	76,65
65	Kecamatan Lakarsantri	9.591.007.543,00	8.179.961.107,00	(1.411.046.436,00)	85,29
66	Kecamatan Sambikerep	7.758.722.493,00	6.235.756.889,00	(1.522.965.604,00)	80,37
67	Kecamatan Pakal	8.556.161.269,00	7.463.926.985,00	(1.092.234.284,00)	87,23
68	Kecamatan Bulak	7.665.628.881,00	5.945.867.892,00	(1.719.760.989,00)	77,57
69	Badan Kepegawaian dan Diklat	25.126.398.884,00	17.711.406.433,00	(7.414.992.451,00)	70,49
70	Kantor Ketahanan Pangan	2.619.811.963,00	2.324.702.941,00	(295.109.022,00)	88,74
71	Dinas Komunikasi dan Informatika	25.338.328.849,00	22.669.072.199,00	(2.669.256.650,00)	89,47
72	Badan Arsip dan Perpustakaan	18.116.660.548,00	16.953.424.074,00	(1.163.236.474,00)	93,58
73	Dinas Pertanian	36.141.657.162,00	31.976.402.531,00	(4.165.254.631,00)	88,48
74	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	33.258.461.416,00	26.083.745.886,00	(7.174.715.530,00)	78,43
	JUMLAH	5.158.264.830.659,00	4.299.150.223.080,63	(859.114.607.578,37)	83,34

Sumber data : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, diolah

III. Penjelasan Pos-Pos Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam anggarannya terutama dimaksudkan untuk menutup Defisit atau memanfaatkan Surplus anggaran, sedangkan Pembiayaan Neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Realisasi Pembiayaan Neto tahun anggaran 2013 dan tahun 2012 sebesar Rp.799.075.102.176,25 dan Rp.470.267.677.365,27 apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp.786.436.485.568,25 dan Rp.464.903.281.595,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp.12.638.616.608,00 dan selisih kurang sebesar Rp.5.364.395.770,27. Perangkaan realisasi pembiayaan tahun anggaran 2013 dapat disajikan dalam ikhtisar realisasi pembiayaan sebagai berikut :

Kode	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH				
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	805.419.392.938,25	805.419.392.938,25	-	100,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	0,00	104.194.238,00	104.194.238,00	0,00
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan	805.419.392.938,25	805.523.587.176,25	104.194.238,00	100,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	18.972.668.470,00	6.448.485.000,00	(12.524.183.470,00)	33,99
3.2.3	Pembayaran pokok utang	10.238.900,00	0,00	(10.238.900,00)	0,00
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran	18.982.907.370,00	6.448.485.000,00	(12.534.422.370,00)	33,96
	Pembiayaan Neto	786.436.485.568,25	799.075.102.176,25	12.638.616.608,00	101,61
3.3	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA)	86.353.090.822,00	977.089.154.745,47	890.736.063.923,47	-

Sedangkan Perangkaan realisasi pembiayaan tahun anggaran 2012 dapat disajikan dalam ikhtisar realisasi pembiayaan sebagai berikut :

Kode	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH				
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	502.999.263.250,00	502.999.263.251,27	1,27	100,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	0,00	150.659.092,00	150.659.092,00	0,00
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan	502.999.263.250,00	503.149.922.343,27	150.659.093,27	100,02
3.2	PENGELUARAN DAERAH				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	-
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	5.174.485.000,00	0,00	(5.174.485.000,00)	-
3.2.3	Pembayaran pokok utang	32.921.496.655,00	32.882.244.978,00	(39.251.677,00)	99,88
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	-
	Jumlah Pengeluaran	38.095.981.655,00	32.882.244.978,00	(5.213.736.677,00)	86,31
	Pembiayaan Neto	464.903.281.595,00	470.267.677.365,27	5.364.395.770,27	101,15
3.3	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	805.419.392.938,25	805.419.392.938,25	100,00

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2013 dan Tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp.805.419.392.938,25 dan Rp.502.999.263.250,00 terealisasi sebesar Rp.805.523.587.176,25 dan Rp.503.149.922.343,27 atau 100,01% dan 100,02%. Penerimaan Pembiayaan tersebut berasal dari Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya dan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah.

a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun (SiLPA)

Pada Tahun 2013 dan Tahun 2012, Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun (SiLPA) dianggarkan sebesar Rp.805.419.392.938,25 dan Rp.502.999.263.250,00 terealisasi sebesar Rp.805.419.392.938,25 dan Rp.502.999.263.251,27 atau 100% dan 100%, berasal dari SiLPA tahun sebelumnya.

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Pada Tahun 2013 dan Tahun 2012, Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah dianggarkan masing-masing sebesar Rp.0,00. Namun terdapat realisasi penerimaan yang berasal dari pengembalian dana bergulir, yaitu:

- Tahun 2013 sebesar Rp.104.194.238,00 dari Dinas Koperasi;
- Tahun 2012 sebesar Rp.150.659.092,00 dari Dinas Koperasi;

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Pengeluaran terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Utang Dalam Negeri

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Pada Tahun 2013 dianggarkan penyertaan modal untuk Kebun Binatang Surabaya, PT. BPR Surya Artha Utama dan PD. Pasar Surya sebesar Rp.18.972.668.470,00 dan terealisasi sebesar Rp.6.448.485.000,00 atau 33,98% yang terdiri dari penambahan penyertaan modal Kebun Binatang Surabaya sebesar Rp.5.174.485.000,00 dan PT Surya Artha Utama sebesar Rp.1.274.000.000,00. Pada Tahun 2012 dianggarkan penyertaan modal untuk Kebun Binatang Surabaya dan Rp.5.174.485.000,00 namun belum dapat terealisasi pada tahun bersangkutan.

b. Pembayaran Pokok Utang Dalam Negeri

Pada Tahun 2012 Pembayaran Pokok Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp.32.921.496.655,00 dan direalisasi sebesar Rp.32.882.244.978,00 yang mana sebesar Rp.10.960.748.326,00 merupakan pembayaran pokok pinjaman utang Pemerintah Pusat Loan IBRD 3726-IND PPP SLA-764/DP3/1994 dan nominal sebesar Rp.21.921.496.652,00 merupakan percepatan pelunasan pinjaman IBRD tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2012

3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2013 dan 2012 sebesar Rp.977.089.154.745,47 dan Rp.805.419.392.938,25 terdiri dari :

No.	Uraian	2013	2012
1	SILPA Pemkot	Rp 943.185.351.352,78	Rp 772.572.176.046,45
2	SILPA BLUD RS dr Soewandhie	Rp 33.903.803.392,69	Rp 32.847.216.891,80
Jumlah		Rp 977.089.154.745,47	Rp 805.419.392.938,25

(III). PENJELASAN KOMPONEN – KOMPONEN ARUS KAS

A. INFORMASI UMUM

Pengelolaan pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya akuntabilitas dan transparansi dari instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat.

Dengan akuntabilitas dapat ditentukan, bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan penyajian laporan keuangan yang handal, tepat waktu dan dipublikasikan kepada masyarakat. Dengan diberlakukan Otonomi Daerah, Pemerintah Kota Surabaya harus menyiapkan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan kepada DPRD. Untuk hal tersebut Pemerintah Kota Surabaya berinisiatif menyusun laporan keuangan dalam rangka memenuhi persyaratan pertanggungjawaban dan transparansi kepada DPRD serta masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Surabaya telah mengimplementasikan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja (SABK) dan Sistem Administrasi Penatausahaan Anggaran (SAPA) menghasilkan antara lain laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas dan Neraca sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2011 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 sebagaimana telah diubah dengan kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 58 tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya.

❖ **Penyajian Laporan Keuangan**

- Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Pemerintah Daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan kecuali terhadap aktiva tetap apabila tidak diperoleh harga perolehan digunakan harga perolehan yang diestimasikan
- Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas modifikasian yaitu merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual
- Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran.

❖ **Laporan Arus Kas** adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode akuntansi, serta saldo kas pada awal dan pada akhir periode akuntansi.

Arus kas disajikan ke dalam kelompok aktivitas operasi, aktivitas investasi non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran (Perhitungan Fihak Ketiga).

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional dalam suatu periode akuntansi.

Arus bersih kas dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terdiri dari penerimaan:

- a. Pendapatan Pajak Daerah
- b. Pendapatan Retribusi Daerah
- c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- e. Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Pajak
- f. Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
- g. Pendapatan dari Dana Alokasi Umum
- h. Pendapatan dari Dana Alokasi Khusus
- i. Pendapatan dari Dana Penyesuaian
- j. Pendapatan dari Bagi Hasil Pajak Propinsi

Arus keluar kas dari aktivitas operasi terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang dan Jasa
- c. Belanja Bunga
- d. Belanja Subsidi
- e. Belanja Hibah
- f. Belanja Bantuan Sosial
- g. Belanja Tidak Terduga
- h. Belanja Bagi Hasil

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Aktivitas investasi adalah aktivitas untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap yang bertujuan untuk meningkatkan dan menunjang operasi pemerintahan dan menghasilkan potensi pendapatan daerah di masa datang. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan diperoleh dari pendapatan atas pelepasan/penjualan aset tetap.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan diperoleh dari pembelian aset tetap atau belanja modal.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Aktivitas pembiayaan adalah penambahan atau pengurangan sumber dana pembiayaan, yang menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran.

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan terdiri dari :

- a. Penerimaan Pinjaman dan Obligasi
- b. Pencairan Dana Cadangan
- c. Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan
- d. Penerimaan Kembali Pinjaman

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan terdiri dari :

- a. Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi
- b. Pembentukan Dana Cadangan
- c. Penyertaan Modal (investasi jangka panjang)
- d. Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah atau Pemerintah Daerah Lainnya

d. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Aktivitas non anggaran adalah aktivitas keuangan pemerintah yang tidak mempengaruhi anggaran. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya.

Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga. Transaksi non anggaran berasal dari Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

Transaksi Non anggaran meliputi:

1. Arus Masuk Kas Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Penerimaan perhitungan pihak ketiga (PFK) yaitu penerimaan kas daerah yang berasal dari potongan pembayaran (SP2D), seperti Pajak penghasilan, potongan Taspen, Askes, Taperum dan potongan untuk pihak ketiga lainnya.

2. Arus Keluar Kas Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Pengeluaran perhitungan pihak ketiga (PFK) yaitu pengeluaran kas daerah untuk penyetoran pungutan atau potongan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga yang berhak.

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

	<u>Tahun 2013</u>		<u>Tahun 2012</u>
1. Arus Kas dari	Rp. 1.448.456.264.366,39	Rp.	1.235.591.421.731,79
Aktivitas Operasi			

Arus Kas dari aktivitas operasi sampai dengan 31 Desember 2013 dan Tahun 2012 masing-masing surplus sebesar Rp.1.448.456.264.366,39 dan Rp.1.235.591.421.731,79 Jumlah tersebut merupakan jumlah kas bersih dari aktivitas operasi yaitu arus kas masuk operasi dikurangi dengan arus kas keluar operasi. Rincian arus kas dari aktivitas operasi sebagai berikut :

No.	Uraian	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)
Arus Masuk Kas:			
1.	Pajak Daerah	2.154.652.323.797,88	1.852.977.636.886,55
2.	Retribusi Daerah	229.680.153.171,85	183.482.993.434,78
3.	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	111.967.697.968,77	97.696.057.372,81
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	217.296.726.570,12	94.945.399.817,28
5.	Dana Bagi Hasil Pajak	255.690.446.250,00	299.746.830.080,00
6.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	15.247.050.379,00	18.467.773.817,00
7.	Dana Alokasi Umum	1.160.025.693.000,00	1.061.625.528.000,00
8.	Dana Alokasi Khusus	29.928.308.000,00	53.227.560.000,00
9.	Dana Penyesuaian	360.003.798.000,66	309.819.125.000,00
10.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi	613.629.385.380,00	594.448.090.669,00
11.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Propinsi	950.910.195,00	558.714.255,00
12.	Pendapatan Hibah	-	0,00
13.	Bantuan Keuangan Propinsi	8.238.075.000,00	16.777.000.000,00
14.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	-	17.468.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		5.157.310.567.713,28	4.583.790.177.332,42
Arus Keluar Kas:			
1.	Belanja Pegawai	2.032.535.593.593,52	1.897.483.528.203,58
2.	Belanja Barang dan Jasa	1.416.455.909.209,53	1.183.725.875.284,86
3.	Belanja Bunga	-	2.223.619.192,00
4.	Belanja Hibah	253.316.709.084,84	258.999.514.331,19
5.	Belanja Bantuan Sosial	853.703.500,00	867.500.000,00
6.	Belanja Bantuan Keuangan	604.305.000,00	644.208.000,00
7.	Belanja Tidak Terduga	-	3.054.510.589,00
8.	Belanja Bagi Hasil	5.088.082.959,00	1.200.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		3.708.854.303.346,89	3.348.198.755.600,63
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		1.448.456.264.366,39	1.235.591.421.731,79

Jumlah Arus Masuk Kas Tahun 2013 dan 2012 dari Pendapatan Pajak Daerah adalah sebesar Rp.2.154.652.323.797,88 dan Rp.1.852.977.636.886,55 terdiri dari :

No.	Pajak Daerah	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
1.	Pajak Hotel	151.418.187.250,00	126.540.958.475,55
2.	Pajak Restoran	211.755.737.412,00	172.882.689.664,00
3.	Pajak Hiburan	41.979.608.730,88	35.403.716.528,00
4.	Pajak Reklame	106.146.474.640,00	117.601.450.951,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	260.672.641.280,00	224.323.267.329,00
6.	Pajak Parkir	35.245.703.221,00	27.286.524.344,00
7.	Pajak Air Tanah	1.296.286.760,00	1.297.629.300,00
8.	Pajak Bumi dan Bangunan	606.061.761.816,00	572.292.265.076,00
9.	BPHTB	740.075.922.688,00	575.349.135.219,00
Jumlah Pendapatan Pajak		2.154.652.323.797,88	1.852.977.636.886,55

Dengan perincian sebagai berikut :

No.	Pajak Daerah	2013	2012
Pajak Hotel			
1	Hotel Bintang Lima	66.663.085.800,00	57.235.884.266,00
2	Hotel Bintang Empat	37.487.552.188,00	34.730.125.992,00
3	Hotel Bintang Tiga	21.468.532.083,00	16.318.867.632,00
4	Hotel Bintang Dua	3.190.194.755,00	1.886.799.587,55
5	Hotel Bintang Satu	1.261.482.597,00	1.040.981.616,00
6	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos	685.842.471,00	517.395.754,00
7	Hotel Non Bintang	20.661.497.356,00	14.810.903.628,00
Jumlah Pajak Hotel		151.418.187.250,00	126.540.958.475,55
Pajak Restoran			
1	Restoran	197.263.404.124,00	163.766.258.232,00
2	Katering	14.492.333.288,00	9.116.431.432,00
Jumlah Pajak Restoran		211.755.737.412,00	172.882.689.664,00
Pajak Hiburan			
1	Tontonan Film / Bioskop	20.624.103.500,00	14.358.470.840,00
2	Hiburan Non Bioskop	19.530.498.155,88	18.116.174.313,00
3	Hiburan Insidentil	1.825.007.075,00	2.929.071.375,00
Jumlah Pajak Hiburan		41.979.608.730,88	35.403.716.528,00
Pajak Reklame			
1	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	92.727.479.465,00	102.571.767.051,00
2	Reklame Insidentil	13.418.995.175,00	15.029.683.900,00
Jumlah Pajak Reklame		106.146.474.640,00	117.601.450.951,00
Pajak Penerangan Jalan			
1	Pajak Penerangan Jalan PLN	260.253.065.885,00	223.928.718.954,00
2	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	419.575.395,00	394.548.375,00
Jumlah Pajak Penerangan Jalan		260.672.641.280,00	224.323.267.329,00
Pajak Parkir			
1	Pajak Parkir	35.245.703.221,00	27.286.524.344,00
Jumlah Pajak Parkir		35.245.703.221,00	27.286.524.344,00
Pajak Air Tanah			
1	Pajak Air Bawah Tanah	1.296.286.760,00	1.297.629.300,00
Jumlah Pajak Air Tanah		1.296.286.760,00	1.297.629.300,00
Pajak Bumi Bangunan			
1	Pajak bumi Bangunan	606.061.761.816,00	572.292.265.076,00
Jumlah		606.061.761.816,00	572.292.265.076,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan			
1	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	740.075.922.688,00	575.349.135.219,00
Jumlah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		740.075.922.688,00	575.349.135.219,00
Total		2.154.652.323.797,88	1.852.977.636.886,55

Arus Masuk Kas dari Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2013 dan tahun 2012 sebesar Rp.229.680.153.171,85 dan Rp.183.482.993.434,78 terdiri dari:

No.	Retribusi	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
1.	Retribusi Jasa Umum	92.211.812.869,48	70.805.253.043,90
2.	Retribusi Jasa Usaha	45.398.093.912,37	45.500.413.898,88
3.	Retribusi Perijinan Tertentu	92.070.246.390,00	67.177.326.492,00
Jumlah Retribusi		229.680.153.171,85	183.482.993.434,78

Retribusi Jasa Umum tahun 2013 dan tahun 2012 sebesar Rp.92.211.812.869,48 dan Rp.70.805.253.043,90 terdiri dari:

No.	Retribusi Jasa Umum	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	16.904.118.500,00	17.981.722.000,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Dinas Kebersihan dan Pertamanan)	28.020.846.498,00	12.897.134.841,04
3.	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil (Dinas Catatan Sipil)	1.183.550.000,00	1.299.545.000,00
4.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Dinas Kebersihan dan Pertamanan)	2.157.550.000,00	1.633.380.000,00
5.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Dinas Perhubungan)	11.805.883.000,00	9.301.939.500,00
6.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan)	12.592.003.600,00	12.693.725.200,00
7.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Dinas Kebakaran)	1.980.031.575,00	1.225.409.953,00
8.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang)	1.081.068.884,00	6.021.152.241,00
9.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Dinas Komunikasi dan Informatika)	4.030.069.320,00	0,00
10.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	157.540.150,00	0,00
11.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Bhakti Darma Husada	12.299.151.342,48	7.721.267.783,86
12.	Retribusi Penyedotan Kakus (Dinas Kebersihan dan Pertamanan)	0,00	29.976.525,00
Jumlah Retribusi Jasa Umum		92.211.812.869,48	70.805.253.043,90

Retribusi Jasa Usaha tahun 2013 dan tahun 2012 sebesar Rp.45.398.093.912,37 dan Rp.45.500.413.898,88 terdiri dari:

No.	Retribusi Jasa Usaha	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
1.	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	0,00	378.312.510,00
2.	Retribusi Terminal (Dinas Perhubungan)	6.945.690.931,00	6.806.094.733,00
3.	Retribusi Tempat Khusus Parkir (Dinas Perhubungan)	1.486.293.000,00	1.168.329.000,00
4.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	3.784.466.692,00	2.397.011.520,00
5.	Pemakaian Tanah atau Tempat-tempat yang dikuasai oleh Pemerintah Kota (Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan)	31.597.842.937,43	33.353.781.444,41
6.	Pemakaian Rumah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota (Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah)	629.289.351,94	582.923.911,47
7.	Pemakaian Gedung Balai Pemuda dan GNI (Dinas Pariwisata)	172.010.000,00	193.930.000,00
8.	Penggunaan Gedung Gelanggang Remaja Surabaya (Dinas Pemuda dan Olah Raga)	64.970.000,00	47.830.000,00
9.	Pemakaian Gedung Serba Guna (Bagian Umum dan Protokol)	717.531.000,00	553.280.000,00
10	Uang atas Pemakaian Tanah (Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah)	0,00	18.920.780,00
Jumlah Retribusi Jasa Usaha		45.398.093.912,37	45.500.413.898,88

Retribusi Perijinan Tertentu tahun 2013 dan tahun 2012 sebesar Rp.92.070.246.390,00 dan Rp.67.177.326.492,00 terdiri dari:

No.	Retribusi Perijinan Tertentu	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang)	81.749.793.102,00	58.900.797.826,00
2.	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	9.509.619.328,00	7.603.413.306,00
3.	Retribusi Izin Trayek (Dinas Perhubungan)	810.833.960,00	673.115.360,00
Jumlah Retribusi Perijinan Tertentu		92.070.246.390,00	67.177.326.492,00

Jumlah Arus Masuk Kas dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2013 dan tahun 2012 sebesar Rp.111.967.697.968,77 dan Rp.97.696.057.372,81 terdiri dari :

No.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
1.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)	104.829.908.232,14	94.589.069.262,81
2.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah (BUMN)/ PT SIER	6.816.890.459,63	2.797.001.910,00
3.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta PT STAR / Taman Remaja Surabaya	320.899.277,00	309.986.200,00
Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		111.967.697.968,77	97.696.057.372,81

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) terdiri dari :

No.	Penyertaan Modal	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
1.	Perusahaan Daerah Air minum	89.421.585.052,00	73.893.930.777,00
2.	Perusahaan Daerah Pasar Surya	1.756.068.839,00	952.646.450,00
3.	Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan	300.801.187,00	424.910.042,00
4.	P.T Bank Pembangunan Daerah Jatim	12.686.734.981,18	18.005.208.523,81
5.	P.T Bank Perkreditan Rakyat Jatim	13.862.000,00	14.190.000,00
6.	P.T BPR Surya Artha Utama	650.856.172,96	1.298.183.470,00
Jumlah Penyertaan Modal		104.829.908.232,14	94.589.069.262,81

- Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah (BUMN) adalah bagian laba PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER).
- Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan milik swasta adalah bagian laba PT.STAR/Taman Remaja Surabaya.

Jumlah Arus Masuk Kas dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun 2013 Rp.217.296.726.570,12 dan tahun 2012 sebesar Rp.94.945.399.817,28, terdiri dari :

No.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
1.	Penerimaan Jasa Giro	14.832.492.134,93	8.534.521.351,74
2.	Bunga Deposito	57.579.864.797,57	41.143.835.616,08
3.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	70.858.000,00	337.590.319,00
4.	Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.513.026.332,46	5.604.710.875,00
5.	Denda Pajak	202.500.000,00	187.500.000,00
6.	Denda Retribusi	2.668.548.377,25	45.396.533,20
7.	Hasil Eksekusi Atas Jaminan	6.015.350.050,09	1.081.840.227,00
8.	Pendapatan Pengembalian	607.628.352,00	528.745.241,00
9.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00
10.	Penerimaan Lain-Lain	129.806.458.525,82	37.481.259.654,26
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		217.296.726.570,12	94.945.399.817,28

Jumlah Arus Masuk Kas dari pendapatan bagi hasil pajak tahun 2013 dan tahun 2012 sebesar Rp.255.690.446.250,00 dan Rp.299.746.830.080,00 terdiri dari :

No.	Bagi Hasil Pajak	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
1.	Pajak Bumi dan Bangunan	23.076.346.283,00	25.324.300.633,00
2.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0,00	481.469.231,00
3.	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, 29 dan 21	200.156.562.314,00	252.390.887.869,00
4.	Cukai Hasil Tembakau	32.457.537.653,00	21.550.172.347,00
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Pajak		255.690.446.250,00	299.746.830.080,00

Jumlah Arus Masuk Kas dari pendapatan bagi hasil bukan pajak tahun 2013 dan tahun 2012 sebesar Rp.15.247.050.379,00 dan Rp.18.467.773.817,00 terdiri dari:

No.	Bagi Hasil Bukan Pajak	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
1.	Provisi Sumber Daya Hutan	308.370.680,00	353.986.759,00
2.	Iuran Eksplorasi dan Iuran eksploitasi (Royalti)	12.457.853,00	7.215.326,00
3.	Pungutan Hasil Perikanan	347.408.873,00	343.986.219,00
4.	Pertambangan Minyak Bumi	12.491.505.745,00	14.776.052.218,00
5.	Pertambangan Gas Bumi	2.080.538.678,00	2.986.533.295,00
6.	Pertambangan Panas Bumi	6.768.550,00	0,00
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak		15.247.050.379,00	18.467.773.817,00

Jumlah Arus Masuk kas dari Dana Alokasi Umum untuk Tahun 2013 adalah sebesar Rp.1.160.025.693.000,00 dan pada Tahun 2012 adalah sebesar Rp.1.061.625.528.000,00.

No.	Uraian	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
1.	Dana Alokasi Umum	1.160.025.693.000,00	1.061.625.528.000,00
Jumlah Dana Alokasi Umum		1.160.025.693.000,00	1.061.625.528.000,00

Jumlah Arus Masuk Kas dari Dana Alokasi Khusus untuk tahun 2013 sebesar Rp.29.928.308.000,00 dan pada Tahun 2012 sebesar Rp.53.227.560.000,00 Dana Alokasi Khusus tersebut merupakan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi.

No.	Uraian	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
1.	Dana Alokasi Khusus	29.928.308.000,00	53.227.560.000,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus		29.928.308.000,00	53.227.560.000,00

Jumlah Arus Masuk Kas dari Dana Penyesuaian tahun 2013 dan tahun 2012 sebesar Rp.360.003.798.000,66 dan Rp.309.819.125.000,00 Terdiri dari :

No.	Dana Penyesuaian	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
1	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2010	0,00	7.812.000.000,00
2	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2013	4.385.500.000,00	0,00
3	Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun 2010	0,00	302.007.125.000,00
4	Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun 2013	355.526.385.000,66	0,00
5	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (DP2D2)	91.913.000,00	
Jumlah Dana Penyesuaian		360.003.798.000,66	309.819.125.000,00

Jumlah Arus Masuk Kas dari Bagi Hasil Pajak Propinsi tahun 2013 dan tahun 2012 sebesar Rp.613.629.385.380,00 dan Rp.594.448.090.669,00 yang terdiri dari :

No.	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	206.097.921.542,00	190.134.343.632,00
2	Bea Nalik Nama Kendaraan Bermotor	241.408.766.066,00	229.282.433.756,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	164.784.080.833,00	173.590.773.964,00
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	0,00	0,00
5	Pajak Air Permukaan	1.281.517.625,00	1.405.592.380,00
6	Sumbangan Pihak Ketiga (SP3)	57.099.314,00	34.946.937,00
Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Propinsi		613.629.385.380,00	594.448.090.669,00

Jumlah Arus Masuk Kas dari Bagi Hasil Lainnya Propinsi tahun 2013 dan tahun 2012 sebesar Rp.950.910.195,00 dan Rp.558.714.255,00 yang terdiri dari:

No.	Bagi Hasil Lainnya Provinsi	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
1.	Retribusi TERA	950.910.195,00	558.714.255,00
Jumlah Bagi Hasil Lainnya Provinsi		950.910.195,00	558.714.255,00

Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp.8.238.075.000,00 merupakan bantuan keuangan yang diterima dari provinsi tahun 2013 diperuntukkan untuk infrastruktur dan peningkatan pendidikan.

Jumlah Arus Keluar Kas dari Belanja Pegawai tahun 2013 dan tahun 2012 sebesar Rp.2.032.535.593.593,52 dan Rp.1.897.483.528.203,58 tidak termasuk belanja pegawai yang direalisasikan melalui BLUD RSUD dr. M. Soewandhie sebesar Rp.16.726.874.881,00 dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

No.	Belanja Pegawai	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
1.	Belanja Tidak Langsung	1.685.058.820.769,00	1.601.256.346.557,00
2.	Belanja Langsung	347.476.772.824,52	296.227.181.646,58
Jumlah Belanja Pegawai		2.032.535.593.593,52	1.897.483.528.203,58

Jumlah Arus Keluar Kas dari Belanja Barang dan Jasa selama Tahun 2013 dan tahun 2012 sebesar Rp. dan Rp.1.416.455.909.209,53, tidak termasuk Belanja Barang dan Jasa yang direalisasikan melalui BLUD RSUD dr.M.Soewandhie sebesar Rp.50.303.869.968,00.

Jumlah Belanja Bunga tahun 2013 dan tahun 2012 sebesar Rp.0,00 dan Rp.2.223.619.192,00, tahun 2013 tidak ada transaksi pembayaran Belanja Bunga untuk pinjaman Loan IBRD Nomor 3726 No. SLA 764 DP3 1994 karena telah dilunasi pada tahun 2012.

Jumlah Belanja Bantuan Hibah tahun 2013 dan tahun 2012 sebesar Rp.253.316.709.084,84 dan Rp.258.999.514.331,19 yang terdiri dari :

No.	Belanja Hibah	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
1.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	2.598.070.383,70
2.	Belanja Hibah kepada Masyarakat	253.316.709.084,84	233.031.335.862,49
3.	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	0,00	23.370.108.085,00
Jumlah Belanja Hibah		253.316.709.084,84	258.999.514.331,19

Jumlah Belanja Bantuan Sosial tahun 2013 dan tahun 2012 sebesar Rp.853.703.500,00 dan Rp.867.500.000,00 yang terdiri dari:

No.	Belanja Bantuan Sosial	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
1.	Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	791.250.000,00	0,00
2.	Bantuan Sosial Kepada Individu, keluarga dan / atau masyarakat	8.500.000,00	867.500.000,00
3.	Bantuan Sosila Kepada Individu dan/atau Keluarga dan/atau Masyarakat dan/atau Lembaga Non Pemerintahan	53.953.500,00	0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial		853.703.500,00	867.500.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa pada tahun 2013 dan tahun 2012 sebesar Rp.604.305.000,00 dan Rp.644.208.000,00 terdiri dari :

No.	Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
1.	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	604.305.000,00	644.208.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		604.305.000,00	644.208.000,00

Jumlah Belanja Tak Terduga pada Tahun 2013 sebesar Rp.0,00 dan pada Tahun 2012 sebesar Rp.3.054.510.589,00 yang merupakan pengembalian sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah tahun anggaran 2011.

Jumlah Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa pada tahun 2013 dan tahun 2012 sebesar Rp.5.088.082.959,00 dan Rp.1.200.000.000,00 terkait dengan pembayaran bagi hasil kerjasama pengelolaan Terminal Purabaya Bungurasih.

2. Arus Kas dari

Aktivitas Investasi	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Aset Non Keuangan	(Rp. 1.271.498.798.298,06)	(Rp. 911.543.493.464,00)

Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan Tahun 2013 dan Tahun 2012 masing-masing defisit sebesar Rp.1.271.498.798.298,06 dan Rp.911.543.493.464,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi yaitu arus masuk kas investasi dikurangi dengan arus keluar kas investasi.

Rincian aliran kas dari aktivitas investasi Tahun 2013 dan tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Arus Masuk Kas		2013 (Rp)	2012 (Rp)
1.	Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
2.	Penjualan atas Peralatan dan Mesin (Perlengkapan/Peralatan kantor tak terpakai)	1.349.316.050,00	1.094.508.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas Investasi		1.349.316.050,00	1.094.508.000,00
Arus Keluar Kas			
1.	Belanja Modal	1.272.848.114.348,06	912.638.001.464,00
Jumlah Arus Keluar Kas Investasi		1.272.848.114.348,06	912.638.001.464,00
Jumlah Kas Bersih dari Aktivitas		(1.271.498.798.298,06)	(911.543.493.464,00)

Arus Masuk Kas dari penjualan atas peralatan/perlengkapan kantor tak terpakai senilai Rp.1.349.316.050,00 merupakan hasil dari penjualan alat kantor yang sudah tidak terpakai, penjualan bekas bongkaran selter Terminal Bungur Asih dan Terminal Tambak Oso Wilangun, kendaraan bermotor roda dua dan roda empat.

Arus Keluar Kas Tahun 2013 dan Tahun 2012 sebesar Rp.1.272.848.114.348,06 dan Rp.912.638.001.464 merupakan Belanja Modal atas aset tetap sebagai berikut

:

No.	Belanja Modal	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
1.	Belanja Modal Tanah	238.158.398.925,00	136.872.202.550,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	196.692.158.491,00	282.923.143.775,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	372.541.015.597,33	268.319.373.162,00
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Instalasi	464.140.371.614,73	211.668.633.231,00
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	449.432.800,00	11.965.688.300,00
6.	Belanja Modal Aset Lainnya / Tidak Berwujud	866.736.920,00	888.960.446,00
Jumlah Belanja Modal		1.272.848.114.348,06	912.638.001.464,00

	<u>31 Desember 2013</u>	<u>31 Desember 2012</u>
3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	(Rp. 6.344.290.762,00)	(Rp. 32.731.585.886,00)

Arus kas dari aktivitas pembiayaan Tahun 2013 dan Tahun 2012 masing-masing defisit sebesar Rp.6.344.290.762,00 dan Rp.32.731.585.886,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah kas bersih dari aktivitas pembiayaan yaitu arus masuk kas pembiayaan dikurangi dengan arus keluar kas pembiayaan.

Jumlah Arus Masuk Kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp.104.194.238,00 merupakan Penerimaan Kembali Pinjaman dari dana bergulir dari Dinas Koperasi. Jumlah Arus Keluar Kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp.6.448.485.000,00 merupakan penambahan modal Pemerintah Kota Surabaya kepada :

- PT BPR Surya Artha Utama sebesar Rp.1.274.000.000,00 sesuai Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surabaya kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama Melalui Pengalihan Saham dari PT Surya Karsa Utama Kepada Pemerintah Kota Surabaya dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BPR Surya Artha Utama No. 28 tanggal 30 April 2012 oleh Notaris-PPAT Dedy Harijanto, ST, SH.
- PD Taman Satwa KBS sebesar Rp.5.174.485.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman

Satwa Kebun Binatang Surabaya, Peraturan Walikota Surabaya No. 88 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Surat Direktur Utama PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya Tanggal 18 Juli 2013 No:001/Ext/PDTS/VII/2013

	31 Desember 2013	31 Desember 2012
4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	Rp.5.196.891.230,76	Rp. 4.818.633.037,00

Arus kas dari aktivitas non anggaran tahun 2013 dan tahun 2012 surplus sebesar Rp.5.196.891.230,76 dan Rp.4.818.633.037,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah kas bersih dari arus masuk kas non anggaran (Perhitungan Fihak Ketiga-PFK) dikurangi dengan arus keluar kas non anggaran (PFK).

Rincian arus kas dari aktivitas non anggaran Tahun 2013 dan Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga		
1. (PFK)	93.184.508.295,76	90.961.287.017,00
2. Penerimaan Sisa UP tahun yang lalu	699.959.598,00	6.072.667,00
Jumlah Arus Masuk Kas	93.884.467.893,76	90.967.359.684,00
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga		
1. (PFK)	87.345.357.678,00	85.448.767.049,00
2. Pengeluaran Sisa UP tahun berjalan	1.342.218.985,00	699.959.598,00
Jumlah Arus Keluar Kas	88.687.576.663,00	86.148.726.647,00
Jumlah Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	5.196.891.230,76	4.818.633.037,00

Arus masuk kas dari transaksi non anggaran Tahun 2013 dan Tahun 2012 sebesar Rp.93.884.467.893,76 dan Rp.90.967.359.684,00 terdiri atas penerimaan :

No.	Penerimaan Non Anggaran	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
1.	Iuran Wajib Pegawai	71.424.656.304,76	68.701.786.588,00
2.	Potongan Taperum	1.606.808.835,00	1.699.395.000,00
3.	Potongan ASKES	13.115.322.156,00	13.752.166.529,00
4.	Lain-lain PFK	7.037.721.000,00	6.807.938.900,00
5.	Penerimaan Sisa UP tahun yang lalu	699.959.598,00	6.072.667,00
	Jumlah Penerimaan Non Anggaran	93.884.467.893,76	90.967.359.684,00

Arus Keluar Kas dari transaksi non anggaran sebesar Tahun 2013 dan Tahun 2012 sebesar Rp.88.687.576.663,00 dan Rp.86.148.726.647,00 terdiri dari pembayaran untuk :

No.	Pengeluaran Non Anggaran	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
1.	Iuran Wajib Pegawai	71.417.065.889,00	68.677.447.194,00
2.	Potongan Taperum	1.606.303.000,00	1.699.176.000,00
3.	Potongan ASKES	13.113.901.051,00	13.746.833.504,00
4.	Lain-lain PFK	1.208.087.738,00	1.325.310.351,00
5.	Penerimaan Sisa UP tahun berjalan	1.342.218.985,00	699.959.598,00
Jumlah Pengeluaran Non Anggaran		88.687.576.663,00	86.148.726.647,00

	1 Januari 2013	1 Januari 2012
5. Saldo Awal Kas di		
BUD / Kas Daerah	Rp. 802.394.710.664,45	Rp. 506.259.735.245,66

Saldo kas per tanggal 1 Januari 2013 dan 2012 masing masing sebesar Rp.802.394.710.664,45 dan Rp.506.259.735.245,66 terdiri atas :

No.	Uraian	1 Januari 2013 (Rp)	1 Januari 2012 (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	802.394.710.664,45	506.259.735.245,66
Jumlah Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah		802.394.710.664,45	506.259.735.245,66

	31 Desember 2013	31 Desember 2012
6. Saldo Akhir		
Kas	Rp. 1.013.643.084.724,23	Rp. 836.187.758.944,25

Saldo akhir kas per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp.1.013.643.084.724,23 dan Rp.836.187.758.944,25 terdiri atas :

No.	Uraian	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
1.	Kas Daerah	978.204.777.201,54	802.394.710.664,45
2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.351.684.885,00	699.959.598,00
3.	Kas di Bendahara Penerimaan	182.819.245,00	245.871.790,00
4.	Kas BLUD dr.M. Soewandhie	33.903.803.392,69	32.847.216.891,80
Jumlah Saldo Akhir Kas		1.013.643.084.724,23	836.187.758.944,25

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013 sebesar Rp.1.351.684.885,00 terdiri dari :

Kas di Bendahara Pengeluaran		31 Desember 2013
1	Dinas Perhubungan	1.145.823.552,00
2	Kecamatan Tambaksari	30.032.493,00
3	Kecamatan Gubeng	166.362.940,00
4	Kecamatan Semampir	4.529.100,00
5	Kecamatan Tegalsari	4.936.800,00
Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran		1.351.684.885,00

Sisa Uang Persediaan (UP) sebesar Rp.1.342.218.985,00 dari Dinas Perhubungan, Kecamatan Tambaksari, dan Kecamatan Gubeng telah disetor kembali oleh Bendahara Pengeluaran SKPD ke Kas Daerah pada Tahun 2014.

Tunjangan beras pegawai kecamatan dan kelurahan sebesar Rp.9.465.900,00 yang belum diserahkan kepada pemiliknya dan masih tersimpan dalam rekening bank milik Bendahara Pengeluaran Kecamatan Semampir dan Kecamatan Tegalsari telah diserahkan kepada masing-masing pegawai pada Tahun 2014.

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp.182.819.245,00 merupakan pendapatan Tahun 2013 yang baru dapat disetor oleh bendahara penerimaan ke Kas Daerah pada Tahun 2014, yang terdapat pada SKPD :

No.	Kas di Bendahara Penerimaan	Jumlah (Rp)
1	Dinas Perhubungan	33.668.300,00
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	35.414.000,00
3	Dinas Kesehatan	95.140.000,00
4	RSUD Bhakti Dharma Husada	18.596.945,00
Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan		182.819.245,00

5.4. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

Tidak ada rekonsiliasi, karena entitas pelaporan menerapkan basis kas atas pendapatan dan belanja.

5.5. PENJELASAN LAIN - LAIN

Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas sebesar Rp.1.013.643.084.724,23 terdiri atas SILPA sebesar Rp.977.089.154.745,47, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp.36.371.110.733,76 dan pendapatan ditangguhkan sebesar Rp.182.819.245,00.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yuridiksi tempat entitas tersebut berada

Kota Surabaya dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kota Surabaya merupakan entitas pelaporan yang mempunyai kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Pemerintah Kota Surabaya merupakan daerah otonom yang berada di wilayah Propinsi Jawa Timur, secara administratif terbagi ke dalam 31 Kecamatan dan 160 Kelurahan. Secara geografis terletak pada posisi 07.21' Lintang selatan dan 112.36' – 112.54' Bujur Timur yang berbatasan langsung dengan selat Madura di sebelah Utara, selat Madura di sebelah Timur, Kabupaten Sidoarjo di sebelah Selatan dan Kabupaten Gresik di sebelah Barat.

Luas Wilayah Kota Surabaya 33.306,30 km² dengan bentuk permukaan lahan wilayah Kota Surabaya 3 – 6 meter diatas permukaan laut (dataran rendah) kecuali di bagian selatan terdapat dua bukit landai di daerah lidah dan gayungan dengan ketinggian 25 – 50 meter di atas permukaan laut.

B. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya

Pemerintah Kota Surabaya merupakan organisasi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah, sebagai bagian dari pemerintah pusat selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri Pemerintah Kota Surabaya juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.

C. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kegiatan Operasional bagi Pemerintah Kota Surabaya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 serta

peraturan perundang-undangan lainnya yang spesifik mengatur kewenangan dari Pemerintah Kota Surabaya.

D. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan

Dalam Tahun 2013 terjadi beberapa kali mutasi dan penggantian beberapa pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

E. Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan

Pada periode Tahun Anggaran 2013 tidak terdapat penggabungan atau pemekaran entitas.

F. Putusan Pengadilan Terkait Hak dan Kewajiban Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013

Pada periode tahun anggaran 2013 terdapat hak dan kewajiban Pemerintah Kota Surabaya yang masih menunggu putusan pengadilan sebagai berikut :

No.	Permasalahan	Kewajiban Bayar Pemerintah Kota	Keterangan
1.	Pembelian suku cadang truck dari UD. Rahadiant oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan	1. Rp.149.946.000,- (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah). 2. 6% pertahun dari Rp.136.314.745,- (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap hingga seluruh harga pembelian suku cadang truck dibayar lunas.	- Berkekuatan hukum tetap. - Belum dibayar
2.	Perbuatan melanggar hukum tidak melaksanakan Perjanjian Perdamaian tanggal 5 Desember 2006 dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 624/Pdt.G/2006/PN.Sby tanggal 7 Desember 2006 dengan PT. Unicomindo	Rp.3.336.339.500,- + Rp.800.721.480,- = Rp.4.137.060.980,-.	- Belum berkekuatan hukum tetap. - Proses kasasi

No.	Permasalahan	Kewajiban Bayar Pemerintah Kota	Keterangan
3.	Wanprestasi atas Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 643.1/7825.17/436.5.2/2007 tanggal 10 Desember 2007 dan Permintaan Penyesuaian harga pembangunan Stadion Surabaya Barat dengan PT. Adhi Karya (Persero)	Rp.29.365.543.000,- (dua puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dibayarkan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap	<ul style="list-style-type: none"> - Belum berkekuatan hukum tetap. - Proses kasasi
4.	Wanprestasi atas kesepakatan pemeliharaan dan perbaikan kendaraan angkut sampah melalui Surat Perintah Kerja (SPK) antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan PT. Sarana Panca Sakti, cs	Rp.290.485.000,- (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	<ul style="list-style-type: none"> - Berkekuatan hukum tetap. - Belum dibayar
5.	Wanprestasi atas Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Jembatan Penyeberangan di Jalan Mayjen. Sungkono Surabaya tanggal 30 Juni 1996 Nomor : 611.52/3251/402.5.08/1996 dengan PT. Gawih Jaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. kerugian materiil Rp.245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah); 2. kerugian atas hilangnya prestasi dan hak pengelolaan Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) 3. kerugian immateriil Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) 4. uang paksa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap 	<ul style="list-style-type: none"> - Berkekuatan hukum tetap. - Belum dibayar
6.	Sengketa kepemilikan tanah yang digunakan untuk SDN Gading III terletak di Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Surabaya antara Pemerintah Kota dengan Ny. Sri Prapti, BA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ganti rugi materiil Rp.1.009.974.382,43,- (satu milyar sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua koma empat puluh tiga rupiah). 2. Uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai dengan adanya 	<ul style="list-style-type: none"> - Berkekuatan hukum tetap. - Belum dibayar - Proses Kasasi

No.	Permasalahan	Kewajiban Bayar Pemerintah Kota	Keterangan
		pelaksanaan putusan perkara ini	
7.	Ganti Rugi jalan tembus Mayjend. Sungkono menuju gudang peluru Kel. Dukuh Pakis kepada Linda Handayani Nyoto	Rp.3.835.065.000,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juta enam puluh lima ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus	<ul style="list-style-type: none"> - Berkekuatan hukum tetap. - Belum dibayar - Proses Peninjauan Kembali

BAB VII

PENUTUP

Dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran strategik yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai 100%. Diharapkan Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat menginformasikan kebijakan, asumsi, dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan dan menjelaskan Laporan Keuangan lembar muka (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas). Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Kota Surabaya selama ini akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Surabaya.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kota Surabaya dalam penyampaian laporan Keuangan.

Pemerintah Kota Surabaya telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Surabaya di masa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.

Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya.

Surabaya, .

WALIKOTA SURABAYA

TRI RISMAHARINI